



Bukittinggi Hebat

LKjIP 2022

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Kota Bukittinggi





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Bukittinggi, Kode Pos 26122
Telepon (0752) 33369, 21880, 22183 Faks. (0752) 32767

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2022, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bukittinggi, MARET 2023
INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI



ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt.MM.CFrA.CRMO.CA
Pembina TK-I
NIP.198103252005012008



WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pujian dan kesyukuran yang paling tinggi hanya milik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikanNya pula, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 sebagai tolak ukur atas capaian kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan capaian kinerja RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.



LKjIP Kota Bukittinggi tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Tahun ke-1 (satu) implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026. Tahun pertama ini, merupakan tahun-tahun penuh motivasi yang menjadi pondasi dasar pemerintah Kota Bukittinggi untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat dampak pandemic Covid-19. Sejalan dengan slogan Nasional yakni "*Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat*" yang mencerminkan harapan bagi seluruh masyarakat Kota Bukittinggi agar senantiasa dengan semangat tinggi dalam bertransformasi untuk terus bertumbuh di tengah tantangan pasca pandemi covid-19.

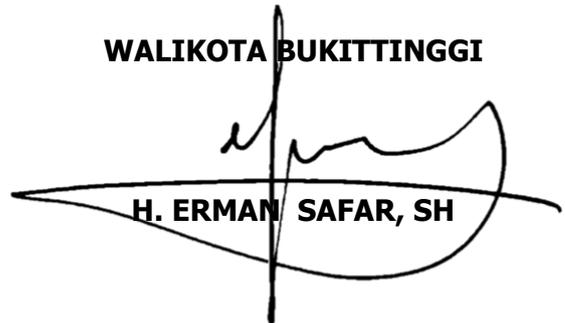
Secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemerintahan Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, meskipun secara regional dan nasional, pembangunan daerah dipenuhi tantangan dan isu krisis ekonomi global. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengerahkan segala sumber daya yang ada, menghimpun pikiran, ide dan gagasan, sehingga roda kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik khususnya perekonomian dan kesehatan.

Mengusung visi "***Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah***", melalui 7 (tujuh) misi yang ditunaikan, yakni: hebat dalam sektor peningkatan ekonomi kerakyatan, hebat dalam sektor pendidikan, hebat dalam sektor kesehatan dan lingkungan, hebat dalam sektor kepariwisataan, seni budaya dan olahraga, hebat dalam tata kelola pemerintahan, hebat dalam sektor sosial kemasyarakatan, dan hebat

dalam sektor pertanian, Kita optimis bahwa kedepan Bukittinggi akan mensejahterakan seluruh masyarakat Kota Bukittinggi.

Sekali lagi, dengan niat tulus dan ikhlas serta kerja keras semua pihak, Bukittinggi Hebat akan mewujudkan Bukittinggi yang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur* yakni Bukittinggi yang dikumpulkan atasnya kebaikan dan kebaikan pula bagi masyarakatnya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Bukittinggi, Maret 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI

H. ERMAN SAFAR, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi (LKjIP) tahun 2022 menyajikan informasi atas pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam penetapan kinerja Tahun 2022. capaian tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan gambaran bahwa peningkatan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur sipil negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian yang terintegrasi dengan pembaharuan sistem administrasi Negara.

Keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Keberhasilan/ kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 11 Tujuan, 25 sasaran strategis dan 44 indikator kinerja utama yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022.

Adapun rincian pencapaian misi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

MISI 1: HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 3 tujuan dan 5 sasaran yang diukur dengan 9 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terciptanya ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	3	4,68	156
			Indeks Gini	0,264	0,317	-19,80
	Terciptanya ekonomi yang merata					
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah		Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	3	4,55	152 %
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.509	13.633	100,91
		Meningkatnya investasi hijau	Pertumbuhan PMTB (%)	4,2	1,71	41%
			Persentase realisasi investasi hijau (%)	60	20,14 %	33,56
	Terbangunnya infrastruktur hijau	Indeks daya saing infrastruktur	76	73,72	97 %	
	Menurunnya	Tingkat kemiskinan	4,48	4,46	100,44	

kemiskinan	(%)				
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,18	4,9	131,75%	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 1</i>				88.09%	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 9 indikator kinerja utama adalah 88.09%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 2: HEBAT dalam Sektor Pendidikan.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 1 sasaran. Tujuan dan sasaran strategis tersebut diukur dengan 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	81,14	81,42	100,34
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,56	11,63	101%
			Harapan lama sekolah (Tahun)	14,99	14,99	100%
			Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	48,00	88,30	183,95 %
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 2</i>						121.32%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 121.32%, termasuk kategori memuaskan.

MISI 3: HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 7 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 11 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,48	51,77	81,55%
		Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	74,85	74,82	99,96 %

masyarakat	(Tahun)			
	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7056	0,6841	96,95
	Prevalensi Stunting (%)	13,3	16.8	126,31 %
Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	51,89	30	63,83 %
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	37,36	22,38	59.90
Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,64	87,89	103,83
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	73	89.09	122.04 %
	Persentase pengurangan sampah	26	7.09	27,26 %
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,50	60.19	98%
Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	3,15	3,48	106,36
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 3</i>				89.63%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 11 indikator kinerja utama adalah 89.63%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 4: HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 dengan 2 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 7 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	52,71	-
			Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	-	-
		Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,34	6,12	141%

inovatif	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	1	12,8	120%
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	559.316	1,262,590	226 %
Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	30	52,31	-
Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	-	-
Rata-rata Capaian Indikator Misi 4				162.33%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 7 indikator kinerja utama adalah 162.33%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

MISI 5: HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan 1 tujuan dan 6 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria B	100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	75,57	71,66	94,82%
			Nilai EKPPD	32,323	32,293	99,95
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	76	77,49	102 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	85,25	90,80	106,51 %
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD	21,91	18,73	85,48%

	terhadap Pendapatan (%)	
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 5</i>		98.12%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 98.12%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

MISI 6: HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Untuk pencapaian misi 6 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan dan 3 sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 4 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya kesejahteraan sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	86,89	100%
		Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial (%)	84,2	85,109	101,32
		Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS (%)	2	-4,495	-224,75
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	58,0	53,57	92,36
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 6</i>						17.23%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 6 yang diukur melalui pencapaian 4 indikator kinerja utama adalah 17.23%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik.

MISI 7: HEBAT dalam Sektor Pertanian

Untuk pencapaian misi 7 Pemerintah Kota Bukittinggi ditetapkan 1 tujuan dan 2 Sasaran. Tujuan dan sasaran tersebut memiliki 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan		Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,53	2.3	150.33 %

Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89,33	84,66	94.77%
Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	72,00	71.53	99.35%
<i>Rata-rata Capaian Indikator Misi 7</i>				114.81%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 114.81%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	IX

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2. Pemerintahan Kota Bukittinggi	2
1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi	5
1.4 Gambaran Umum Daerah	5
A. Geografi Kota Bukittinggi	5
B. Kependudukan	7
1.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	9
1.6. Dasar Hukum	16
1.7. Maksud Dan Tujuan	17
1.8. Sistematika Penulisan	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja	20
2.2. Visi Dan Misi	21
Visi	21
Misi	22
2.3. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022	26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	29
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	30
3.3. Analisis Capaian Kinerja	33
Pertumbuhan Ekonomi	33
Indeks Gini	37
Indeks Pembangunan Manusia	39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	43
Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	44
Indeks Pembangunan Kebudayaan	46
Indeks Pembangunan Olahraga	48
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	51
Indeks Kesejahteraan Sosial	56
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	57
Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	61

Pertumbuhan PMTB (%)	68
Persentase Realisasi Investasi Hijau (%)	63
Indeks Daya Saing Infrastruktur	65
Tingkat Kemiskinan (%)	67
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	75
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	79
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	88
Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik.....	85
Indeks Kesalehan Sosial	87
Angka Harapan Hidup (Tahun)	95
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	98
Prevalensi Stunting (%)	100
Indeks Kualitas Air	102
Indeks Kualitas Tutupan Lahan.....	105
Indeks Kualitas Udara	108
Presentase Penanganan Sampah	111
Presentase Pengurangan Sampah	113
Indeks Pembangunan Pariwisata	116
Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi (%)	118
Jumlah Kunjungan Wisata	120
Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	122
Prestasi Pada Event Olah Raga Propinsi	123
Nilai SAKIP	124
Nilai EKPPD	128
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	132
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	133
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%).....	136
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	139
Indeks Kenyamanan Kota.....	143
Presentase Penurunan PPKS (%)	143
Indeks Pembangunan Keluarga	147
Indeks Ketahanan Pangan.....	150
Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan.....	154
3.4 Realisasi Anggaran	160

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	115
4.2 Strategi Peningkatan Kinerja	116



BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah suatu sistem dari berbagai kegiatan, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan data, mengkategorikan, meringkas, dan melaporkan kinerja di instansi Pemerintah. Dalam rangka akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja juga merupakan wujud kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian misi dan tujuan kinerja organisasi secara terukur. Ditentukan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara berkala.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai dasar pembentukan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP telah mendorong percepatan perwujudan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sistem manajemen pemerintahan, sebagai agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan melalui Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem pemerintahan yang baik. Untuk itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus disusun dengan baik secara teknis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai acuan dari implementasi kebijakan nasional dan daerah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Bukittinggi untuk laporan tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 -2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026, siap untuk disajikan. Keberadaan LKjIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.



I.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Implementasi peraturan tersebut mendasari pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan,
 - 2) Bagian Hubungan Masyarakat,
 - 3) Bagian Hukum.
 - b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan,
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan,
 - 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan,
 - 3) Bagian Organisasi.
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD;
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh Inspektur;
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh Kepala Badan;
6. Badan Keuangan, dipimpin oleh Kepala Badan;
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
8. Dinas Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipimpin oleh Kepala Dinas;
11. Dinas Sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas;
12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Kepala Satuan;
13. Dinas Kebakaran, dipimpin oleh Kepala Dinas;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas;
15. Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas;
17. Dinas Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;

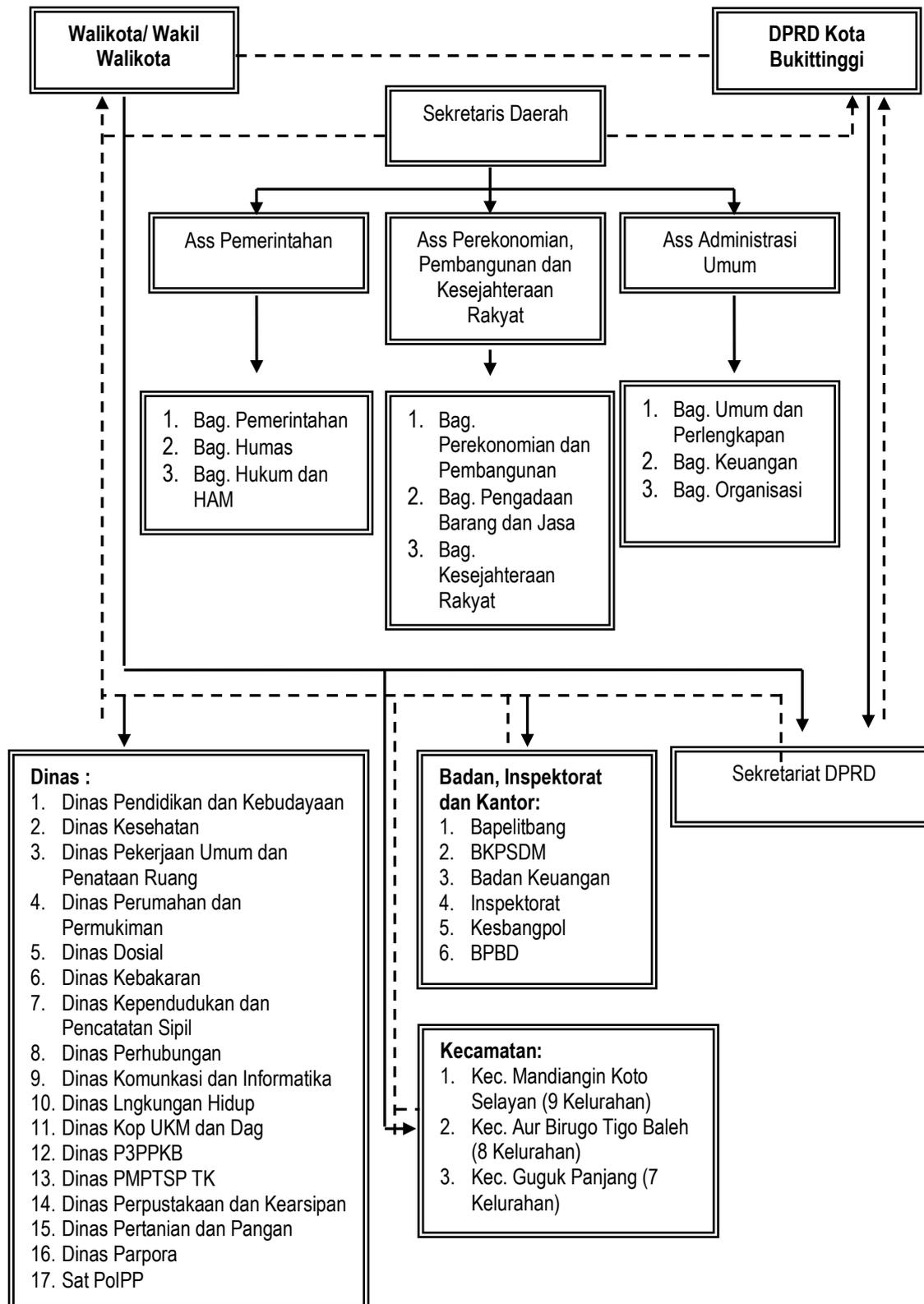


19. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas;
20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
22. Dinas Pertanian dan Pangan, dipimpin oleh Kepala Dinas;
23. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dipimpin oleh Kepala Dinas;
24. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepala Kantor;
25. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana;
26. Kecamatan, dipimpin oleh Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 Kelurahan,
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh membawahi 8 Kelurahan,
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan.

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :



Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi



— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi/ Konsultasi

Sumber Data: Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016

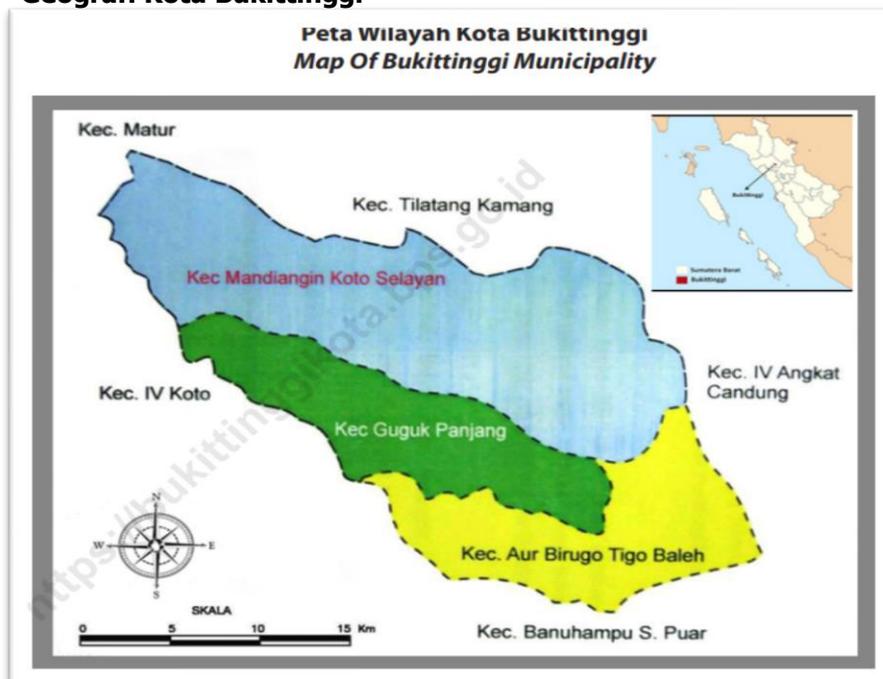
I.3. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam perkembangannya, secara administratif Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah;
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

I.4. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi



Sumber : Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022

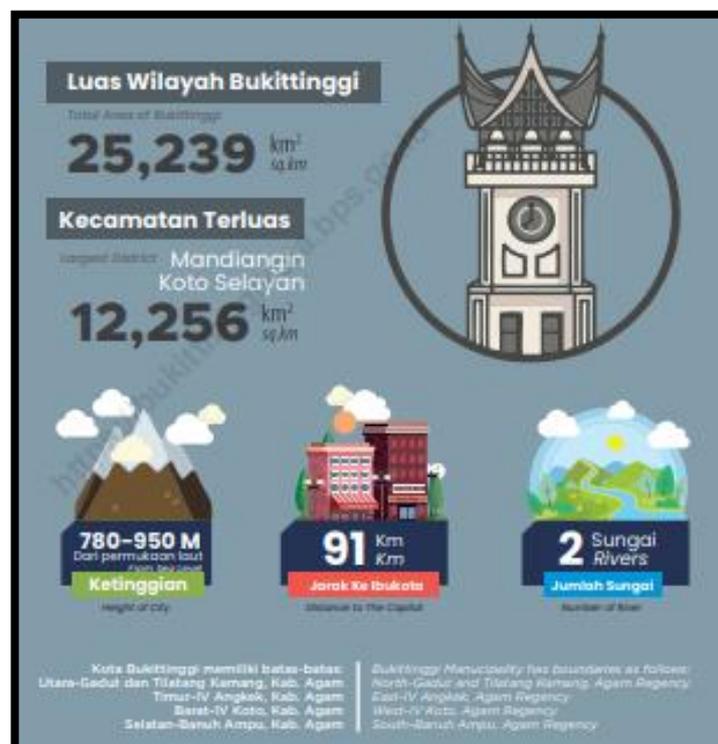
Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter diatas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Tabel I.4. A Luas Kota Bukittinggi dan Kecamatan di Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km2)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27	100°, 22' 49" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.256	48	100°, 22' 23" BT 0°, 17' 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	25	100°, 23' 22" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS

Sumber Data: BPS 2019



Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2022



B. Kependudukan

Secara administratif pemerintahan Kota Bukittinggi terbagi atas 3 kecamatan dan 24 kelurahan dengan sebaran Rukun Tetangga dan Rukun Warga Aktif yang terdiri dari:

Tabel I.4.B. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi berKTP

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Memiliki KTP
1	2	3	4
Guguk Panjang	45.926	32.238	32.217
Mandiingin Koto Selayan	55.772	38.961	38.936
Aur Birugo Tigo Baleh	28.513	19.647	19.637
<i>Jumlah / Total</i>	2021	130.211	90.846
	2020	101.745	88.327
	2019	123.296	85.296
	2018	121.590	84.845
	2017	119.183	82.723

Sumber Bukittinggi Dalam Angka 2022

Berikut perbandingan jumlah penduduk Kota Bukittinggi dengan jumlah penduduk Kab/Kota di Sumatera Barat, menurut Kabupaten/Kota dan jenis kelamin tahun 2020 dan 2021 serta laju pertumbuhannya.

Tabel I.4.B.1 Perbandingan Jumlah Penduduk Kab/ Kota Se Sumatera Barat

Kab/ Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2021	2021	2010-2020	2020-2021
Kep. Mentawai	87.623	88.389	1,36	1,17
Pesisir Selatan	504.418	509.619	1,57	1,38
Solok	391.497	394.237	1,13	0,93
Sijunjung	235.045	237.313	1,49	1,29
Tanah Datar	371.704	373.693	0,91	0,71
Padang Pariaman	430.626	433.018	0,94	0,74
Agam	529.138	534.202	1,47	1,28
Lima Puluh Kota	383.525	385.634	0,93	0,73



Kab/ Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
Pasaman	299.851	303.103	1,65	1,45
Solok Selatan	182.027	184.854	2,27	2,08
Dharmasraya	228.591	231.271	1,73	1,53
Pasaman Barat	431.672	436.313	1,63	1,44
Padang	909.040	913.448	0,84	0,65
Solok	73.438	74.469	2,07	1,88
Sawahlunto	65.138	65.687	1,32	1,13
Padang Panjang	56.311	56.971	1,76	1,57
Bukittinggi	121.028	121.588	0,81	0,46
Payakumbuh	139.576	141.184	1,74	1,54
Pariaman	94.224	95.294	1,71	1,52
Sumatera Barat	5.534.472	5.580.232	1,29	1,10

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka 2022



Sumber : Bukittinggi Dalam Angka 2023



I.5. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu strategis juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk itu, isu-isu strategis akan dianalisa dengan berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Identifikasi akan isu-isu strategis dalam pembangunan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi juga dikedepankan guna mencari alternatif solusi yang tepat yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena pada dasarnya salah satu dasar dalam proses perencanaan pembangunan adalah karena ditemuinya permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Berikut diuraikan isu-isu strategis pembangunan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021:

1. Peningkatan Pengamalan Agama dan Kearifan Lokal

Pemahaman agama dan budaya untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat kota menjadi isu strategis yang sangat penting dimasa mendatang. Sebab, meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun dalam implementasinya terlihat belum mampu untuk meningkatkan akhlak dan moral semua masyarakat. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negatif yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk



mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, Adaik Mamakai*". Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia.

Selanjutnya, yang ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari *rule government* menjadi *good governance* dan *clean government*. Membangun *good governance* bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku. Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lainlainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang. Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagus apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcomes*.

Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap



pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan terpercaya, yaitu :

- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi,
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik,
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK),
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan masyarakat,
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari *hardware* dan *software*. *Hardware* berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara *software* adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah *brainware* berupa sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Disinilah pentingnya *reinventing government* dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi fokus untuk dioptimalkan.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dan berada diatas rata-rata IPM Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan IPM



Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat maka IPM Kota Bukittinggi berada pada urutan tertinggi kedua setelah Kota Padang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan investasi jangka panjang Kota Bukittinggi yang dibangun sejalan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur daerah. Peningkatan pembangunan daerah yang tidak sejalan dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan berdampak kepada peningkatan kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang akan memberikan efek penggandaan terhadap pengembangan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah.

Pemerintah Kota Bukittinggi harus mampu mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Bukittinggi sehingga dapat mempertahankan predikat yang sejak lama dikenal sebagai kota pendidikan dan kota yang berbudaya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat yang selanjutnya diukur dengan pengeluaran perkapita masyarakat, peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang diukur melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui peningkatan angka harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan.

Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/ kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah.

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan



preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. Ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan perekonomian daerah yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi individu dan masyarakat berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran.

Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi.

Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini.

Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan :

- a. penurunan tingkat pengangguran;
- b. ketersediaan tenaga kerja terampil;
- c. peningkatan pendapatan masyarakat,



- d. meningkatnya produktivitas usaha;
- e. pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

5. Pengembangan Kepariwisata

Kegiatan pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan perekonomian Kota Bukittinggi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi paling besar pada PAD Kota Bukittinggi dan berkontribusi besar terhadap perkembangan sektor-sektor pada PDRB Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan aktifitas pariwisata. Oleh karena itu Perkembangan Kota Bukittinggi akan sangat dipengaruhi oleh pengembangan sektor kepariwisataan sebagai sektor dominan dan pilar penting pembangunan kota.

Sebagai sektor utama dan dominan dalam pengembangan perekonomian daerah Kota Bukittinggi, sektor pariwisata menjadi isu strategis pengembangan Kota Bukittinggi. Pengembangan daya tarik objek wisata dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata menjadi prioritas pengembangan pariwisata kedepan. Pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi secara jangka panjang diarahkan kepada pengembangan pariwisata yang berbudaya. Melalui konsep pariwisata yang berbudaya, Kota Bukittinggi dapat mengembangkan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi bagian atraksi wisata serta melindungi kebudayaan daerah dari masuknya kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan budaya daerah Kota Bukittinggi.

6. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai kota pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan kota kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representatif. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.



Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

7. Peningkatan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Pesatnya perkembangan Kota Bukittinggi berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan ruang bagi peruntukan infrastruktur dan kegiatan perekonomian. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi telah mengatur peruntukan ruang Kota Bukittinggi untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan Kota Bukittinggi serta mengendalikan angka alih fungsi lahan Kota Bukittinggi. Keberlangsungan sumber daya alam secara jangka panjang harus tetap dipertahankan untuk menyediakan lingkungan yang sehat untuk generasi berikutnya dan menjaga Kota Bukittinggi dari ancaman bencana alam. Namun demikian, menjaga keberlangsungan sumber daya alam juga tidak menghalangi perkembangan daerah. Rencana tata ruang wilayah menyediakan Batasan Batasan terhadap pengembangan infrastruktur tanpa menghambat perkembangannya.

8. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan. Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari



kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep *green city* juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

I.6. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2020 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 9) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 12) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;



- 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 15) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022;
- 16) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

I.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

I.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Dengan urutan sebagai berikut:

I.1. Latar Belakang



Berisikan latar belakang penyusunan LKjIP

I.2. Pemerintah Kota Bukittinggi

Berisikan tentang struktur pemerintahan Kota Bukittinggi

I.3. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bukittinggi

Berisikan tentang dasar hukum pembentukan Kota Bukittinggi

I.4. Gambaran Umum Daerah

Penjelasan mengenai tugas dan fungsi beserta struktur organisasi Perangkat Daerah.

I.5. Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi

Penjelasan mengenai isu-isu/ permasalahan-permasalahan strategis yang sedang dihadapi SKPD.

I.6. Dasar Hukum

Berisikan tentang dasar hukum penulisan LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2022

I.7. Maksud dan Tujuan

Berisikan tentang maksud dan tujuan penulisan

I.8. Sistematika Penulisan

Penjelasan mengenai sistematika penulisan LKjIP.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Dengan urutan sebagai berikut:

II.1. Rencana Strategis

Berisikan penjelasan mengenai rencana strategis yang telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi yang merupakan penjabaran dari pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah selama tahun 2021-2026.

II.2. Perjanjian Kinerja

Penjelasan mengenai Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2022.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Menguraikan metodologi pengukuran penghitungan capaian target kinerja.

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil pengukuran

III.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:



1. Perbandingan antara target kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2022;
2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (2020, 2021 dan 2022);
3. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Program/ kegiatan penunjang capaian indikator.

III.4. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

IV.1. Kesimpulan

Diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

Penjelasan mengenai strategi/langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang untuk meningkatkan kinerja.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 pada Tahun 2022 merupakan tahun pertama. RPJMD Kota Bukittinggi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026. Ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 -2026 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2006 – 2025 telah ditetapkan Visi pembangunan jangka Panjang Kota Bukittinggi adalah Visi “Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan pula Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dan telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No.19 Tahun 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradab berdasarkan iman dan taqwa;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*);
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
- 4) Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan Sumatera;

- 5) Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

2.2 VISI

Pelaksanaan RPJMD selama 3 periode telah memperlihatkan hasil yang sejalan dengan RPJPD tersebut. Pada tahun 2021 ini sampailah pada tahapan terakhir untuk melaksanakan semua misi tersebut. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah mengajukan visi

**"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT
BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"**

Terwujudnya masyarakat HEBAT berlandaskan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* adalah wujud dari masyarakat Kota Bukittinggi beradab, religius, unggul, berdaya saing tinggi, dan mandiri. Masyarakat yang beradab adalah perwujudan dari masyarakat madani, yang menjunjung nilai kemanusiaan, maju dan hebat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai - nilai Agama. Lebih jauh visi tersebut, Bukittinggi adalah sebagai kesatuan geografis, demografis dan budaya. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi akan bersifat terpadu dalam wilayah yang telah ditetapkan.

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari:

H = Humanis

E = Entrepreneurship

B = Bijak

A = Agamais/ Adil

T = Tauladan.

Sementara itu, "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*" adalah adat yang didasari/ ditopang oleh Syariat Agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Karena *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Oleh karena itu, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan falsafah yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan



yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an dan Hadist.

Gambar berikut memperlihatkan keterkaitan Visi RPJPD 2026 Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025			
Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan			
RPJMD 2005-2010	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2016-2021	RPJMD 2021-2026
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang dijiwai oleh agama dan adat, <i>Syarak Mangato Adaik Mamakai</i>	Terwujudnya Bukittinggi Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan dengan dilandasi nilai-nilai Agama dan Adat	Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Wisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	Menciptakan Bukittinggi HEBAT berlandaskan <i>Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i>

Visi RPJMD Kota Bukittinggi memperlihatkan konsistensi kondisi yang diinginkan pembangunan jangka panjang yaitu membangun Bukittinggi berlandaskan kepada Agama dan Budaya alam Minangkabau. Tahun 2025 pembangunan Kota Bukittinggi bercita-cita untuk menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota yang maju berbasiskan kepada *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

2.3 Misi

Visi yang spesifik ini memerlukan penjelasan agar setiap *stakeholders* memiliki satu pemahaman dan pandangan yang sama tentang visi pembangunan yang direncanakan. Untuk itu, Visi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dituangkan ke dalam tujuh Misi sebagai berikut :

2.3.1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan prinsip ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta putra bangsa kebanggaan Kota Bukittinggi yang dikenal juga sebagai Proklamator Kemerdekaan RI dan Bapak Koperasi. Konsep yang dibangun dengan ekonomi kerakyatan



adalah membangun Kota Bukittinggi berbasiskan kepada usaha ekonomi yang berasaskan kepada kekeluargaan, berkeadilan yang memihak kepada rakyat kecil. Hal ini sangat relevan dengan Visi yang berorientasi kepada membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (*enterprenur*).

Dengan demikian, HEBAT dalam sektor ekonomi kerakyatan berarti berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan sebanyak mungkin pelaku usaha dan dijiwai prinsip pemerataan dan keadilan. Lebih jauh mengingat pertumbuhan ekonomi konvensional telah menimbulkan *degradasi* sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup maka peningkatan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain bercirikan rendah karbon, berbasis peningkatan nilai tambah pada sumber daya yang diperbaharui.

2.3.2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang HEBAT, sebagaimana yang dimaksud Visi RPJPD 2005-2025 dan RPJMD periode 2021- 2026 Kota Bukittinggi. HEBAT dalam sektor Pendidikan mengandung makna bahwa Pendidikan yang akan dikembangkan adalah perubahan perilaku dan membentuk manusia yang berkarakter humanis, berjiwa *enterprenur*, bijak, agamais agar bersifat adil dan pantas menjadi tauladan untuk membangun Kota Bukittinggi Maju sesuai cita-cita RPJPD 2005-2025.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang demikian, maka semua potensi baik sumber daya manusia, infrastruktur (sarana dan prasarana pendukung), sistem dan proses pendidikan, serta teknologi harus dimanfaatkan secara optimal. Pendidikan berkarakter HEBAT ini akan dikembangkan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Selanjutnya, pembangunan pendidikan Kota Bukittinggi juga diarahkan pada meningkatnya kehidupan keagamaan. Hal ini dengan maksud agar pembangunan pendidikan searah dengan penguatan kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat yang berbasiskan ABS-SBK.

2.3.3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Sektor kesehatan dan keberadaan lingkungan hidup yang sehat akan menentukan kualitas kehidupan Kota. Diharapkan dengan kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat Kota Bukittinggi akan lebih produktif. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat menekan penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan akan menunjang sektor lain untuk juga menjadi lebih baik.

Melalui misi ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik yang ditandai dengan komponen kualitas lingkungan yang juga semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan diharapkan maka derajat kesehatan



masyarakat juga semakin tinggi. Perbaikan kualitas lingkungan ini diperlukan mengingat secara perlahan telah terjadi degradasi sumber daya air dan meningkatnya timbunan sampah. Penurunan kualitas lingkungan ini mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

2.3.4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Sejak awal RPJPD Kota Bukittinggi telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai sektor unggulan. Namun kontribusi Pariwisata dalam PDRB sulit diketahui mengingat banyak aspek yang terkait yang dapat dikategorikan sebagai bagian kepariwisataan. Mengingat bahwa kota Bukittinggi disebut juga sebagai kota wisata namun berdasarkan indeks Kepariwisata Indonesia Bukittinggi belum termasuk kategori 10 besar. Karena itu diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan pengelolaan wisata Kota Bukittinggi. Aspek-aspek penting yang berkontribusi dalam peningkatan kepariwisataan antara lain aspek lingkungan seperti kesehatan dan kebersihan serta keamanan. Selain itu aspek potensi wisata baik potensi alam maupun buatan perlu digali secara optimal.

Sementara itu di bidang seni budaya pembangunan diarahkan pada pengembangan ekspresi budaya yang dimaksudkan menguatkan budaya Minangkabau yang ABS-SBK. Hal yang sama juga terjadi pada aspek olah raga, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berperan penting dalam mengembangkan olah raga masih perlu dikembangkan.

2.3.5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan merupakan prasyarat utama pembangunan, baik nasional maupun daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Karena kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Pengembangan tata kelola pemerintahan yang direncanakan Kota Bukittinggi mengacu kepada *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*, dengan menekankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 menggunakan 3 pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Tiga pilar tersebut adalah Aparatur Sipil Negara, Kelembagaan dan Proses Bisnis Organisasi, dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan. Dengan demikian, Kota Bukittinggi juga akan menggunakan 3 pilar ini untuk mencapai misi HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan.



2.3.6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Aspek sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang berhubungan dengan hampir semua aspek lain dalam RPJMD. Pemerataan pendapatan dan akses kepada sumber daya ekonomi untuk membangun ketahanan sosial akan bersentuhan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya hal ini juga berhubungan dengan penyediaan infrastruktur publik, dukungan kepada kaum disabilitas dan perhatian yang tinggi kepada manula. Peningkatan nilai-nilai sosial keagamaan dan adat istiadat memerlukan dukungan yang intensif dari tokoh adat dan ulama. Pembangunan masyarakat yang HEBAT dalam artian dapat menjadi teladan memerlukan langkah-langkah yang nyata meskipun hasilnya tidak terlihat dalam waktu yang singkat.

2.3.7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

Walaupun Bukittinggi identik dengan kota yang berciri perdagangan dan pariwisata, namun masih ada sektor pertanian yang perlu dikembangkan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga masih menjadi perhatian pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, pada sub sektor pertanian ini, Kota Bukittinggi juga potensial untuk pengembangan komoditi hortikultura. Konsep yang cocok untuk dikembangkan di kota ini adalah pertanian perkotaan.

HEBAT dalam Bidang Pertanian merupakan misi yang akan membawa Kota Bukittinggi menjadi kota yang kuat, inovatif, produktif dan berkelanjutan di bidang pertanian dan pangan. Untuk itu, melalui misi ini Kota Bukittinggi akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai maksud ini, Kota Bukittinggi perlu menetapkan sasaran pembangunan pertanian yakni menuju kota yang ketahanan pangan yang tinggi dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat, baik dalam menyediakan kesempatan kerja, kesempatan usaha maupun menyediakan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya, seperti pada industri dan jasa.

2.4. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022

Dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi diuraikan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022**

No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	3
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	Nilai	0,264
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	81,14
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	63,48
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	%	3
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	kategori baik
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	Nilai	kategori baik
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Nilai	Kriteria B
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	kategori baik
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Nilai	1,53
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Rp.	13.509
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	%	4,2
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	%	60
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	Nilai	76
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	%	4,48
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	%	7,18
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Angka	11,56
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	Tahun	14,99
		19	Tingkat kecerdasan sosial	Angka	48,00



No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
			peserta didik		
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	%	84,2
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	Angka	74,85
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Nilai	0,7056
		23	Prevalensi Stunting (%)	%	13,3
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	Nilai	51,89
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	Nilai	37,36
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	Nilai	84,64
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	%	26
		28	Persentase pengurangan sampah	%	73
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	Nilai	4,34
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	%	1
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah	559.316
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Nilai	30
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olahraga Propinsi	Peringkat	Peringkat 3
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	Nilai	75,57
		35	Nilai EKPPD	Nilai	32,323
27	Sasaran 17 :Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	Nilai	76
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai	85,25
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	%	21,91
30	Sasaran 20 : Meningkatnya	39	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	61,50



No	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	Pengarusutamaan Gender		(IDG)		
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	Nilai	3,15
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	%	2
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	Nilai	58,0
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	89,33
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Nilai	72,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bentuk perwujudan dari kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mempertanggungjawabkan seluruh keberhasilan maupun ketidakberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Kota Bukittinggi Tahun 2022.

LKjIP disusun sebagai bentuk dan upaya dari Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Peraturan Walikota ini mencakup 11 Tujuan 25 Sasaran dan 44 Indikator Kinerja Utama.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan ukuran pencapaian target kinerja kelompok sasaran strategis indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah ukuran kinerja yang sederhana dengan membandingkan tujuan kinerja dengan pencapaian seperangkat indikator kinerja untuk kinerja tujuan strategis.

Pengukuran Indikator Kinerja dan Hasil Pencapaian tersebut digunakan untuk mengukur baik keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian tujuan strategis untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi, serta menganalisis alasan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan strategis diukur dengan pencapaian indikator kinerja kelompok tujuan strategis yang relevan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	> 100%	Memuaskan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik
3	75% - 84,9%	Baik
4	55% - 74,9%	Cukup
5	<55%	Kurang Baik

III.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 11 Tujuan, 25 sasaran strategis dan 44 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3	4,68	156
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0,264	0,317	-19,80
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	81,14	81,42	100,34
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	63,48	51,77	81,55%
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	3	4,55	152 %
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	52,71	Kategori baik
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	kategori baik	kategori baik
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria B	100%
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	86,89	100%
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,53	2.3	150.33 %
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.509	13.633	100,91
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	4,2	1,71	41%
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	60	20,14 %	33,56
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	76	73,72	97 %
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	4,48	4,46	100,44
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,18	4,9	131,75%
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,56	11,63	101%
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	14,99	14,99	100%
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	48,00	88,30	183,95 %



NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,2	85,109	101,32
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	74,85	74,82	99,96 %
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7056	0,6841	96,95
		23	Prevalensi Stunting (%)	13,3	16,8	126,31 %
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	51,89	30	63,83 %
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	37,36	22,38	59,90
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	84,64	87,89	103,83
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	73	89,09	122,04 %
		28	Persentase pengurangan sampah	26	7,09	27,26 %
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,34	6,12	141%
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	1	12,8	120%
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	559.316	1,262,590	226 %
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	30	52,31	120
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Propinsi	Peringkat 3	Peringkat 2	100
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	75,57	71,66	94,82%
		35	Nilai EKPPD	32,323	32,293	99,95
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	76	77,49	102 %
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	85,25	90,80	106,51 %
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	21,91	18,73	85,48%
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,50	60,19	98%
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3,15	3,48	106,36
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2	-4,495	-4,495
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	58,0	53,57	92,36

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	89,33	84,66	94.77%
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	72,00	71.53	99.35%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 44 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 23 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022. Namun demikian tidak seluruh IKU yang turut diperhitungkan dalam mengukur kinerja Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan, untuk IKU tersebut tidak dihitung dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 karena indeks tersebut dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Riset sampai tingkat Provinsi.
2. Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan, iKU tersebut tidak dilakukan penghitungan yang baik oleh Perangkat daerah penanggungjawab IKU, sehingga data yang disajikan belum bisa dijadikan sebagai data yang valid.
3. Prestasi pada Event olah raga Propinsi, IKU tersebut tidak dihitung dalam capaian kinerja Tahun 2022 mengingat event Pekan Olahraga Propinsi Sumatera Barat sudah lama tidak terselenggara. Event Porprov terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019, dan baru akan direncanakan kembali digelar pada pertengahan Tahun 2023.
4. Nilai EKPPD, IKU yang menjadi tanggung jawab Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi ini tidak dijadikan capaian kinerja karena untuk apresiasi pelaksanaan EKPPD terakhir dikeluarkan pada Tahun 2019 atas penilaian Tahun 2018. Hingga saat ini, belum ada apresiasi penilaian terbaru dari EKPPD.
5. Indeks Pembangunan Olahraga, IKU tersebut belum dilakukan pengukuran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. Dari data yang didapatkan, bahwa Indeks Pembangunan Olahraga baru mengukur sampai pada tingkat Provinsi.

**Tabel III.2.1 Klasifikasi Prediket Indikator Kinerja Utama
Sesuai Kategori Capaian Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	IKU
1	> 100%	Memuaskan	a. Pertumbuhan Ekonomi b. Indeks Pembangunan Manusia c. Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata d. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) e. Indeks Kesejahteraan Sosial f. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian g. Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu) h. Tingkat kemiskinan (%)

			<ul style="list-style-type: none"> i. Tingkat pengangguran terbuka (%) j. Rata-rata lama sekolah (Tahun) k. Harapan lama sekolah (Tahun) l. Tingkat kecerdasan sosial peserta didik m. Indeks kesalehan sosial (%) n. Prevalensi Stunting (%) o. Indeks kualitas udara p. Persentase penanganan sampah q. Indeks Pembangunan Pariwisata r. Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%) s. Jumlah Kunjungan Wisatawan t. Indeks integritas pemerintah daerah u. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public v. Indeks Kenyamanan Kota
2	85% - 99,9%	Sangat Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks daya saing infrastruktur b. Angka harapan hidup (Tahun) c. Indeks pembangunan kesehatan masyarakat d. Nilai SAKIP e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%) f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) g. Indeks Pembangunan Keluarga h. Indeks Ketahanan Pangan i. Indeks Komposit pertanian berkelanjutan
3	75% - 84,9%	Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
4	55% - 74,9%	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kualitas air b. Indeks kualitas tutupan lahan
5	<55%	Kurang Baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Gini b. Pertumbuhan PMTB (%) c. Persentase realisasi investasi hijau (%) d. Persentase pengurangan sampah e. Persentase Penurunan PPKS (%)

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2022 pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya akan disajikan analisis capaian kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terciptanya Ekonomi Kerakyatan

IKU 1 : Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Pertumbuhan Ekonomi** yang secara defenisi operasional dapat diartikan pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

1.1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Tahun 2022

Indikator pada Sasaran diatas adalah Pertumbuhan ekonomi dari tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Bukittinggi Tahun 2021 mencapai angka 3,61 persen, setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi. Hal ini tentu saja menjadi berita baik dan angin segar bagi stakeholder dan masyarakat Kota Bukittinggi.

Tabel 1.1 **Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	3	4,68	156

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang bisa dijadikan salah satu acuan untuk melihat kualitas negara kita pada setiap tahunnya. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi naik tentu kita harus mengetahui lebih dahulu bagaimana model model pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kota Bukittinggi berada di provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi tidak memiliki potensi sumber daya alam, tetapi memiliki potensi lain, seperti kondisi alam yang indah, udara yang sejuk, situs peninggalan sejarah, dan lokasinya yang strategis, yang membuatnya tujuan wisata yang potensial. Industri pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor terpenting di Kota Bukittinggi karena potensinya untuk menjadi penggerak ekonomi utama kota. Wabah virus corona yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan hidup kemakmuran suatu bangsa dalam jangka panjang, khususnya di Indonesia. sektor ekonomi, melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah untuk mengganggu siklus kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat.

Industri pariwisata di Bukittinggi merupakan salah satu sumber pendapatan PDRB terbesar bagi APBD, artinya industri pariwisata di Bukittinggi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap kerumunan berkat pariwisatanya yang menarik banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. jumlah pengunjung yang besar, aksesnya untuk sementara dibatasi, sehingga menghambat pertumbuhannya secara tidak langsung.

Pemasukan terbesar Kota Bukittinggi berasal dari sektor pariwisata. Berdasarkan catatan RKPD Kota Bukittinggi diketahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya 30% sampai 40% berasal dari sektor wisata. Namun, semenjak hantaman pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat berarti. Berbagai kebijakan pembatasan sosial menyebabkan lumpuhnya sistem perekonomian dari sektor ini. Sebagai kota yang menggantungkan perekonomian pada kedatangan wisatawan, Bukittinggi tentu ikut merasakan dampaknya. Hal ini terlihat pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota

Bukittinggi yang menunjukkan laju pertumbuhan perekonomian di Kota Bukittinggi pada Tahun 2020 akan berada pada presentase 5-6 %, namun dampak dari kondisi Covid-19 tingkat perekonomian Kota Bukittinggi kemudian turun pada presentase 1,13%.



1.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Pertumbuhan Ekonomi** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 1.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja **Pertumbuhan Ekonomi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		-1,74	
2021		3,61	
2022	3	4,68	156

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

1.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 1.3 Perbandingan antara Capaian Kinerja **Pertumbuhan Ekonomi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Kab/ Kota	Pertumbuhan Ekonomi 2021	Pertumbuhan Ekonomi 2022
Prov. Sumatera Barat	3,26	4,36
Kota Bukittinggi	3,61	4,68

1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Setelah meredanya wabah penyakit covid 19, dan dengan seiring kembali normalnya aktivitas masyarakat, fasilitas-fasilitas umum sudah kembali dibuka termasuk semua objek wisata di bukittinggi yang membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan PDRB daerah bukittinggi secara perlahan.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi pada akhir pekan mengikuti new normal mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya akibat pembatasan yang diberlakukan pandemi COVID-19 pada dua tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah tiket masuk yang terjual, seperti kebun binatang Taman Margasatwa Budaya Kinantan (TMSBK), Fort de Fort Kock dan taman panorama, dan lubang Jepang menarik banyak pengunjung. Saat libur lebaran, 4.000 orang mengunjungi tempat wisata baru. Jumlah itu kemudian mencapai 16.000 dan mencapai puncaknya 25.000 hingga 28.000 pengunjung pada 4 Mei 2022.

Perkembangan ekonomi kota Bukittinggi secara langsung dipengaruhi oleh peningkatan pengunjung. PAD Bukittinggi terus meningkat seiring dengan lonjakan akses objek wisata berbayar. Pada awal libur Idul Fitri pertama setelah pandemi, diperoleh Rp dari industri pariwisata 80 juta, dan kemudian Rp.360 juta, Rp.550 juta 600 juta, yang berarti keuntungan yang diperoleh industri pariwisata di kota Bukittinggi dari hari pertama libur lebaran hingga empat hari kemudian akan masuk ke PAD.2 miliar, menunjukkan bahwa pariwisata pasca pandemi di Bukittinggi berbeda secara signifikan dari pariwisata pandemi. Akibat perbedaan yang disebabkan oleh virus Covid-19, tingkat ekonomi Kota Bukittinggi turun menjadi 1,13 persen selama pandemi Covid-19. Namun, meningkat menjadi sekitar 5-6%.

1.5. Alternatif Solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target

Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi merumuskan program percepatan pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD tahun 2021-2026. Program yang akan dilaksanakan meliputi pembangunan di bidang infrastruktur dan non infrastruktur. Untuk pembangunan infrastruktur yakni pembuatan awning di Jalan Minangkabau yang nantinya menjadi

kawasan Night Market (Pasar Malam). Kemudian pembangunan tahap I Pasar Lereng, menjadi kawasan kuliner malam (Stasiun Street Food), pembangunan Gerbang Budaya, rehabilitasi taman depan kantor DPRD, dan pengembangan kawasan Benteng Fort de Kock. Selanjutnya pemanfaatan lokasi eks Lapas sebagai sentra penjualan produk-produk khas daerah dan city branding Bukittinggi.

Sedangkan untuk pembangunan non infrastruktur yaitu Tabungan Utsman sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Hal itu diperkirakan dapat membantu sekitar 7 ribu pelaku UMKM di Kota Jam Gadang tersebut. Program ini digulirkan melalui BPR Jam Gadang dan tanpa agunan.

Pemko Bukittinggi telah merealisasikan beberapa program yang dapat meringankan beban masyarakat. Di antaranya, memberikan bantuan pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan bantuan tambahan penghasilan kepada guru honorer tingkat SLTA.

Tujuan 2 : Terciptanya Ekonomi yang Merata

IKU 2 : Indeks Gini

2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama yakni **Indeks Gini** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh.

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \text{Target} - \frac{(\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \\ &= 0,264 - \frac{(0,317 - 0,264)}{0,264} \times 100 \\ &= 0,264 - \frac{0,053}{0,264} \times 100 \\ &= 0,264 - 20,07 \\ &= \mathbf{-19,80} \end{aligned}$$

Tabel 2.1 Capaian Indikator Indeks Gini

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Gini	0,264	0,317	-19,80

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

2.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator diatas dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Gini 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Gini		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		0,265	
2021		0,286	
2022	0,264	0,317	-19,80

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

2.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 2.3 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Gini dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat		
	2020	2021	2022
Sumatera Barat	0,305	0,306	0,300
Kab.Kep.Mentawai	0,273	0,321	0,233
Kab.Pesisir Selatan	0,264	0,253	0,246
Kab.Solok	0,277	0,246	0,243
Kab.Sijunjung	0,269	0,270	0,243
Kab.Tanah Datar	0,273	0,250	0,251
Kab.Padang Pariaman	0,257	0,269	0,245
Kab.Agam	0,278	0,272	0,298
Kab.Lima Puluh Kota	0,222	0,244	0,208
Kab.Pasaman	0,310	0,248	0,230
Kab.Solok Selatan	0,307	0,277	0,253
Kab.Dharmasraya	0,280	0,268	0,287
Kab.Pasaman Barat	0,258	0,261	0,277
Kota Padang	0,312	0,343	0,354
Kota Solok	0,286	0,277	0,288
Kota Sawahlunto	0,300	0,295	0,314
Kota Padang Panjang	0,394	0,306	0,296
Kota Bukittinggi	0,265	0,286	0,317

Kab/Kota	Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat		
	2020	2021	2022
Kota Payakumbuh	0,325	0,316	0,311
Kota Pariaman	0,310	0,301	0,272

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Tingginya angka inflasi diperkirakan berdampak terhadap turunnya pemerataan pendapatan masyarakat Kota Bukittinggi

2.5. Alternatif Solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator tidak/ belum mencapai target

Pemerintah Kota Bukittinggi memprioritaskan penanganan terhadap masyarakat yang masuk pada DTKS berupa jaminan sosial dan kesehatan, penyediaan pemakanan dan bantuan modal usaha pada tahun 2023

Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia

IKU 3 : Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Komponen Indeks Pembangunan Manusia

1. Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.
2. Angka Melek Huruf, Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

3. Rata-Rata Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.
4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Keterangan :

$C(i)$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 perkapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari

Tabel 1. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1. Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2. Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3. Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4. Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5. Teri	Ons	19. Garam	Ons
6. Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7. Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Gram
8. Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 batang
9. Susu kental manis	397 Gram	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg		

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel 1. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- . Sementara itu sempat tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000,- , sedangkan sejak tahun 1999, batas minimum penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000 sebagai penyesuaian adanya krisis ekonomi di Indonesia

3.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan 3 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan manusia** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	81,14	81,42	100,34

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023



3.2 Perbandingan antara Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 3.2 Perbandingan antara Capaian 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Indeks Pembangunan Manusia			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		80,58	
2021		80,70	
2022	81,14	81,42	100,34

3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 3.3 Perbandingan antara Capaian dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota [Metode Baru]		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	61,09	61,35	62,19
Kab. Pesisir Selatan	69,90	70,03	70,84
Kab. Solok	69,08	69,24	70,02
Kab. Sijunjung	67,74	67,86	68,69
Kab. Tanah Datar	72,33	72,46	73,29
Kab. Padang Pariaman	70,61	70,76	71,63
Kab. Agam	72,46	72,57	73,29
Kab. Lima Puluh Kota	69,47	69,68	70,28
Kab. Pasaman	66,64	66,77	67,41
Kab. Solok Selatan	69,04	69,23	69,71
Kab. Dharmasraya	71,51	71,76	72,30
Kab. Pasaman Barat	68,49	68,76	69,57
Kota Padang	82,82	82,90	83,29
Kota Solok	78,29	78,41	79,23
Kota Sawahlunto	72,64	72,88	73,73
Kota Padang Panjang	77,93	77,97	78,78
Kota Bukittinggi	80,58	80,70	81,42
Kota Payakumbuh	78,90	79,08	79,53
Kota Pariaman	76,90	77,07	77,65
Provinsi Sumatera Barat	72,38	72,65	73,26

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Rata-rata Lama Sekolah Meningkat

Rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi pada tahun 2020 berada pada angka 11,33 tahun pada tahun 2021, meningkat menjadi 11,34 tahun atau mengalami peningkatan sebesar 0,01. Sedangkan pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah meningkat menjadi 11,63 tahun dan berada di atas target tahun 2022 pada RPJMD sebesar 11,59 tahun. Capaian Rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi selama ini, berada pada urutan ketiga di Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Padang Panjang. Namun, pada tahun 2022, Kota Bukittinggi berada pada peringkat dua Sumatera Barat di bawah Kota Padang.

Harapan Lama Sekolah Alami Kenaikan

Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 14,97 tahun menjadi 14,98 tahun. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 14,99 tahun. Capaian ini sama dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi untuk tahun 2022.

Pengeluaran Perkapita Meningkat

Pengeluaran per kapita per tahun masyarakat Kota Bukittinggi mengalami peningkatan tahun 2021 dari Rp13,282 juta, menjadi Rp13,331 juta atau mengalami peningkatan Rp49 ribu. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita kembali meningkat sebanyak Rp302 ribu jadi Rp13,633 juta. Pengeluaran per kapita masyarakat Kota Bukittinggi tahun 2022 ini melampaui target pada RPJMD yang hanya sebesar Rp13,509 juta,

Usia Harapan Hidup Meningkat

Usia harapan hidup Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari 74,38 tahun pada tahun 2020, menjadi 74,50 tahun pada tahun 2021. Kemudian, tahun 2022, kembali terjadi peningkatan menjadi 74,82 tahun. Usia harapan hidup masyarakat Kota Bukittinggi ini tertinggi di Provinsi Sumatera Barat

Tujuan 5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

IKU 4 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tujuan 5 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit yang mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari aspek kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan.

4.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 4.1. Capaian Indikator Indeks IKLH

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks IKLH	63,48	51,77	81,55%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Tabel 4.1.1 : Klasifikasi Nilai Indeks IKLH

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90

Baik	70 < - ≤ 90
Sedang	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	25 ≤ - < 50
Sangat Kurang	< 25

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Pada tahun 2021, perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kabupaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional.

4.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator IKLH Kota Bukittinggi tiga tahun terakhir:

Tabel 4.2 Perbandingan antara IKLH 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	IKLH	
		Realisasi	Capaian Kinerja
2019			
2020			
2021			
2022	63,48	51,77	81,55%

Tujuan 6 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah
IKU 5 : Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata

5.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 5.1. Capaian Indikator Persentase Pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	3	4,55	152 %

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata diambil dari jumlah café dan restaurant, rumah makan, hotel, homestay dan pusat ekraf yang ada di Kota Bukittinggi Tahun 2022.

5.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Persentase Pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-	-	-
2021	2.67	4.18	157%
2022	3	4.55	152%

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

Sub indikator PDRB pariwisata setiap tahunnya cenderung sama terjadi penurunan dari tahun 2021 ke 2022 karena target tiap tahun cenderung meningkat.

5.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota di Sumatera Barat dan Nasional

5.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Proses pendataan kepariwisataan selalu dilakukan setiap tahun dengan melibatkan semua stakeholder agar data yang terkumpul dapat dipublikasikan tepat waktu.

5.5 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Menarik minat para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor pariwisata dengan penyederhanaan regulasinya. Karena akan dapat menyerap tenaga kerja dan menumbuh kembangkan usaha lain yang mendukung sektor pariwisata.

5.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} \text{*Efisiensi} &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &\text{capaian kinerja IKU} \\ \text{Efisiensi} &= 100\% - \frac{(79,155\% \times 100\%)}{152\%} \\ &= 47.93\% \end{aligned}$$

5.7 Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 5.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598,765,050	490,632,680	81.94%
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2,079,840,430	1,822,440,038	87.62%
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	337,298,500	219,632,150	65.12%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	598,765,050	490,632,680	81.94%
			79,155

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 2023

Tujuan 7 : Berkembangnya Seni Budaya Berbasis ABS-SBK

IKU 6 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

6.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan** yang secara defenisi operasional adalah sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Tabel 6.1 Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Kategori Baik	52,71	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Terkait dengan Indikator Pembangunan Kebudayaan yang merupakan indikator yang berformulasi atas berbagai kebijakan bidang kebudayaan didapatkan melalui hasil survey. Hingga saat ini Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Bukittinggi belum didapatkan. Termasuk Survey IPK Kota Bukittinggi belum ada dilakukan. IPK yang ada adalah IPK

Propinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi melalui web <https://ipk.kemdikbud.go.id>

6.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 6.2 Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		54,99	
2021		54,6	
2022	Kategori Baik	52,71	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

6.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 6.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan Kab/Kota Di Sumatera Barat

Tahun	Nasional	SUMATERA BARAT
2018	53.74	53.23
2019	55.91	54.99
2020	54.65	54.60
2021	51.90	52.71

Sumber : Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek 2021

6.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Dalam pencapaian IPK Kota Bukittinggi Dinas pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan Peningkatan pembangunan Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Ekpresi Budaya, Budaya Literasi, Gender.

6.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Peningkatan pembangunan SDM dibidang Kebudayaan

6.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

6.7. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 6.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	252,492,000	193,471,420	77.00%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	101,504,000.00	59,503,750	59%
Pembinaan Lembaga Adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota	442,140,000.00	345,860,760	0.78
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	386,375,000.00	386,315,000	1.00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	34,193,000.00	30,884,380	0.90
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	46,300,000.00	41,941,195	0.91
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	2,168,344,086.00	2,040,185,486	0.94
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	252,492,000	193,471,420	77.00%
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	101,504,000.00	59,503,750	59%

Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat Berbudaya Olahraga

IKU 7 : Indeks Pembangunan Olahraga

Tujuan 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Olahraga** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit pembangunan olahraga melalui empat indikator yaitu Indeks Ruang Terbuka, Indeks Sumber Daya Manusia, Indeks Partisipasi Masyarakat dan Indeks Kebugaran Jasmani.

7.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 7.1 Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Olahraga**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Olahraga	Kategori baik	Kategori baik	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi 2023

7.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Indeks Pembangunan Olahraga** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 7.2 Perbandingan antara Jumlah **Indeks Pembangunan Olahraga** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Olahraga		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019			
2020			
2021			
2022	Kategori baik	Kategori baik	100

7.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Apresiasi atas keinginan itu oleh siapa pun yang peduli terhadap kemajuan dan perkembangan daerah ini termasuk ditujukan bagi sector keolahragaan. Di Kota Bukittinggi sangat diharapkan berdiri sport hall atau sarana prasarana olahraga itu akan menjadi landmark tersendiri bagi kota ini.

Pemerintah Kota memiliki kepedulian dan cinta kepada kota ini, khususnya berkenaan dengan aspirasi bagaimana kota kita ini memiliki sport hall atau sarana prasarana olahraga yang sifatnya kolosal dan itu juga bisa menjadi landmarknya kota Bukittinggi. Keinginan atau aspirasi itu menjadi inovasi bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi minat dan bakat warga kota, termasuk generasi muda untuk mengembangkan talenta olahraganya.

Pemerintah Kota Bukittinggi juga mencermati usul atau masukan dari warga kota berkenaan dengan kesiapan pemerintah kota menyediakan beragam sarana prasarana untuk menampung bakat, minat anak –anak muda, ini barangkali dua hal yang menurut kami sangat positif.

7.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk Keberhasilan sasaran pemuda olahraga dalam mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga telah dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan sasaran pemuda olahraga dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapsitas daya saing keolahragaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan.

7.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

1. Mengantisipasi Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan dalam Renja tahun 2024.

2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan

7.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

7.7. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 7.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7,900,462,077	7,177,010,881	91%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2,648,432,250	2,542,349,570	96%
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1,556,523,000	1,506,573,920	97%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	140,929,550	118,940,850	84%
Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	39,457,950	33,566,900	85%
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1,376,135,500	1,354,066,170	98%
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,091,909,250	1,035,775,650	95%
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1,091,909,250	1,035,775,650	95%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4,752,029,827	4,134,661,311	87%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209,959,000	185,451,500	88%
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	209,959,000	185,451,500	88%
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	3,034,408,000	2,694,212,970	89%
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	3,034,408,000	2,694,212,970	89%
Pembinaan dan Pengembangan			83%

Olahraga Rekreasi	1,507,662,827	1,254,996,841	
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	396,430,000	275,729,200	70%
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1,111,232,827	979,267,641	88%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500,000,000	500,000,000	100%
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500,000,000	500,000,000	100%
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500,000,000	500,000,000	100%

Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

IKU 8 : Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)

Tujuan 9 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks perbaikan tata kelola pemerintahan instansi pemerintah daerah yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB.

8.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 8.1. Capaian Indikator **Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	Kriteria B	B	100 %

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi 2023

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara

prima. Selain itu, hasil penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 65,52 dengan kategori "B"

Nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukibinggi telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan nilai pada komponen hasil.

Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan pada hasil evaluasi tahun 2020 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukiginggi, sehingga belum terdapat perbaikan yang signifikan dalam penerapan reformasi birokrasi.

Selain tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Namun masih terdapat beberapa catatan antara lain:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi ke seluruh unit kerja, khususnya dalam pembangunan budaya kinerja;
2. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum semua memiliki rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
3. Proses deregulasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan belum berjalan secara komprehensif dengan mengidentifikasi, merevisi dan mencabut regulasi yang menghambat kinerja birokrasi sekaligus memetakan kebutuhan peraturan yang dapat mendorong tercapainya kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan;
4. Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengajukan surat kepada Kementerian PANRB perihal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional serta telah melakukan identifikasi jabatan yang akan disetarakan. Meskipun demikian belum seluruhnya jabatan struktural yang sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional;
5. Telah menyusun proses bisnis dan standard operating procedure (SOP) di level pemerintah daerah maupun di level OPD, namun perlu dipastikan hasil dari penyusunan tersebut dapat menjadikan proses kerja di Pemerintah Kota Buki2inggi lebih efektif dan efisien untuk mencapai kinerja yang diharapkan;
6. Telah melakukan transformasi digital dalam bidang proses bisnis utama, administrasi, dan pelayanan publik namun belum dilakukan evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari aplikasi- kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang ada dan kebermanfaatan dari aplikasi-aplikasi maupun sistem yang telah dibangun;

7. Penguatan sistem manajemen SDM masih belum sepenuhnya optimal, antara lain belum dimanfaatkannya seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Di samping itu, hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
8. Kualitas implementasi atas penerapan SAKIP belum optimal sehingga belum mendorong pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja;
9. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah dilakukan, namun hasilnya belum dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan; dan
10. Berbagai aplikasi dikembangkan guna meningkatkan kualitas koordinasi antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan stakeholder lainnya pada kondisi Covid-19, namun belum ada evaluasi terhadap efektivitas aplikasi tersebut dalam peningkatan pelayanan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal.

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Secara konsisten melaksanakan internalisasi arah perubahan yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada seluruh pegawai secara berkala terkait internalisasi nilai-nilai organisasi, budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi;
2. Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif, dan dinamis. Di samping itu, perubahan yang ingin diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter layanan utama pada masing-masing unit kerja;
3. Memastikan proses deregulasi kebijakan berjalan secara menyeluruh dengan melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat kinerja maupun pelayanan;
4. Menyelesaikan proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pengalihan jabatan dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan mekanisme hubungan kerja antara

- Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi;
5. Mereviu proses bisnis dan SOP untuk menyesuaikan dengan penyederhanaan birokrasi dan memastikan keduanya mendukung proses kerja di Pemerintah Kota Bukittinggi menjadi lebih efektif dan efisien;
 6. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut perbaikan untuk menjawab temuan yang ada;
 7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SOM dengan memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi serta memanfaatkan hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai;
 8. Memastikan implementasi AKIP dari pusat hingga unit-unit kerja secara merata dan optimal, sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan mendukung dalam pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
 9. Membangun SPIP lebih efektif dengan menerapkan manajemen risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi, benturan kepentingan, WBS, dan pengaduan masyarakat secara baik, yang akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan berintegritas; dan
 10. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi yang digunakan untuk pelayanan internal dan eksternal, serta secara periodik melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan berkelanjutan.

8.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator **Indeks Reformasi Birokrasi** dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 8.2 Perbandingan Capaian Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Indeks Reformasi Birokrasi			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	Kriteria B	B	100
2021	Kriteria B	B	100
2022	Kriteria B	B	100

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi 2023

8.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab/ Kota Di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 8.3 Perbandingan Capaian Kinerja **Indeks Reformasi Birokrasi** Dengan Kab/Kota Di Sumatera Barat

Kab/Kota	2021	2022
KOTA BUKITTINGGI	B	B
KAB.TANAH DATAR	B	B
KAB. SOLOK	CC	CC
KABUPATEN PESISIR SELATAN	CC	CC
KABUPATEN SIJUNJUNG	C	C
KOTA PAYAKUMBUH	B	B

Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 Indeks RB Pemerintah Kota Bukittinggi adalah B bersama daerah lain yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar dan untuk Predikat BB hanya diraih oleh Pemerintah Kota Padang.

8.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Indikator

Peningkatan nilai indeks RB terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dan/atau prioritas Presiden lainnya.

8.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = 100\% - \frac{(\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi} &= 100\% - \frac{(80\% \times 100\%)}{100\%} \\ &= 20\%\end{aligned}$$

8.6. Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator

Tabel 8.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			
SubKegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	16,321,000	13,113,780	80%

Tujuan 10 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial**IKU 9 : Indeks Kesejahteraan Sosial**

Tujuan 10 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kesejahteraan Sosial** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks komposit pembangunan kesejahteraan social melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subjektif.

9.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022Tabel 9.1 Capaian Indikator **Indeks Kesejahteraan Sosial**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori baik	86,89	100

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2023

Indeks kesejahteraan sosial bernilai baik jika berada pada angka diatas 80, oleh karena ditargetkan bernilai baik maka selama masih berada pada rentang 80 sampai 100 maka capaiannya adalah 100 persen. Perhitungan indeks kesejahteraan sosial Kota Bukittinggi tahun 2022 mencapai 86,89 dan masuk kategori baik, sehingga target yang ditetapkan pada RPJMD tercapai.

9.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kesejahteraan Sosial** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 9.2 Perbandingan antara **Indeks Kesejahteraan Sosial 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indeks Kesejahteraan Sosial		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021			
2022	Kategori baik	86,89	100

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi Tahun 2023

9.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya target indeks kesejahteraan sosial kota bukittinggi, diantaranya kemampuan pemerintah kota untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan fisiologi, keamana dan keselamatan, interaksi dan hak-hak sosial, serta kesempatan untuk berkompentasi dan penghargaan diri.

**Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Pertanian dan Pangan****IKU 10 : Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

Tujuan 11 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya

10.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022Tabel 10.1 Capaian Indikator **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1.53	2.84	185,62 %

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi 2023

Angka ini tercapai lebih dari target karena meningkatkan penggunaan teknologi budidaya, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran dan memaksimalkan fungsional prasarana pertanian, bantuan benih dan pakan ikan tersalurkan kepada pembudidaya ikan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan.

Walaupun dengan lahan terbatas, produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen, selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi selalu melakukan intensifikasi pertanian, pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan (LKMA) dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama.

10.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 10.2 Perbandingan **Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**
Tahun 2022 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019		0.42	
2020		1.34	
2021	1.44	3.06	212.5
2022	1.53	2.3	150.33

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2023

Tahun 2021 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,44 dengan realisasinya 3,06 dan capaian 212,5 %, sedangkan tahun 2022 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,53 dengan realisasi 2,3 dan capaian 150,33%. Angka ini tercapai lebih dari target karena Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran dan memaksimalkan fungsional prasarana pertanian, bantuan benih dan pakan ikan tersalurkan kepada pembudidaya ikan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan.

Walaupun dengan lahan terbatas produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen, selanjutnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi selalu melakukan intensifikasi pertanian, pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan (LKMA) dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama.

10.3 . Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggunaan teknologi budidaya, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran dan memaksimalkan fungsional prasarana pertanian
2. Memberikan bantuan benih dan pakan ikan kepada pembudidaya ikan, memberikan bimbingan dan pembinaan teknis tentang cara budidaya yang baik dan cara pengolahan hasil perikanan, dan lomba forikan tk kota, provinsi dalam rangka menggalakkan gemarikan dan peningkatan konsumsi ikan.

3. Walaupun dengan lahan terbatas produksi dapat ditingkatkan karena pertama menggunakan teknologi tepat guna antara lain dengan sistim bioflok yaitu dengan pemanfaatan lahan sempit dapat ditebar benih ikan dengan jumlah yang besar dengan pemberian pakan yang komposisinya sesuai, yang kedua dengan memberikan rangsangan kepada Pokdakan berupa bantuan benih dan pakan ikan serta melakukan peningkatan SDM petani ikan dalam bentuk studi banding dan pelatihan teknis, yang ketiga banyaknya kelompok memanfaatkan lahan kosong dan lahan terlantar menjadi kolam ikan, yang keempat adanya kelompok yang bergerak dibidang usaha pembesaran lele dalam 1(satu) bulan sudah bisa dipanen.
4. Melakukan intensifikasi pertanian
5. Pembinaan terhadap kelompok tani gapoktan dan LKMA
6. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi dan penanggulangan hama
7. Memfasilitasi penggunaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian alsintan

10.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2024.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

10.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)$$

$$= 100\% - (91,7\% \times 100\%)$$

$$= 39\%$$

10.6 Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 10.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,187,799,412.0	1,130,403,115.8	95.2%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD Balai Benih Ikan Hias)	394,339,412.0	385,485,559.4	97.8%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dinas Pertanian dan Pangan)	793,460,000.0	744,917,556.4	93.9%
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	327,952,340.0	305,709,209.0	93.2%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	327,952,340.0	305,709,209.0	93.2%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,945,846,104.0	1,786,424,633.4	91.8%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	349,967,200.0	315,184,150.0	90.1%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,480,769,904.0	1,386,934,683.4	93.7%
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115,109,000.0	84,305,800.0	73.2%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	131,049,300.0	87,720,607.7	66.9%
Pengembangan Prasarana Pertanian	58,767,500.0	50,291,132.0	85.6%
Pembangunan Prasarana Pertanian	72,281,800.0	37,429,475.7	51.8%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	562,067,151.0	537,510,340.0	95.6%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,429,804.0	68,745,604.0	97.6%
Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas)	259,934,690.0	244,492,579.0	94.1%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Pangan)	22,473,000.0	21,910,400.0	97.5%

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RPH)	209,229,657.0	202,361,757.0	96.7%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	346,810,658.0	280,551,508.0	80.9%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	346,810,658.0	280,551,508.0	80.9%
TOTAL	4,501,524,965.0	4,128,319,413.9	91.7%

Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat

IKU 11 : Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)

Sasaran 1 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)** yang secara defenisi operasional dapat diartikan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa

11.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 11.1. Capaian Indikator **Pengeluaran Per Kapita** Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengeluaran Per Kapita	13.509	13.633	100,91%

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

11.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pengeluaran Per Kapita** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 11.2. Perbandingan antara **Pengeluaran Per Kapita** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pengeluaran Per Kapita		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		13 282	
2021		13 331	
2022	13.509	13.633	100,91%

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

11.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan [Metode Baru] Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	6 281	6 321	6 567
Kab. Pesisir Selatan	9 212	9 270	9 686
Kab. Solok	10 171	10 215	10 539
Kab. Sijunjung	10 361	10 389	10 582
Kab. Tanah Datar	10 588	10 616	10 695
Kab. Padang Pariaman	10 998	11 050	11 159
Kab. Agam	9 651	9 662	10 171
Kab. Lima Puluh Kota	9 596	9 668	10 035
Kab. Pasaman	8 425	8 440	8 619
Kab. Solok Selatan	10 325	10 367	10 560
Kab. Dharmasraya	11 273	11 324	11 650
Kab. Pasaman Barat	9 047	9 089	9 381
Kota Padang	14 481	14 540	14 889
Kota Solok	12 117	12 168	12 515
Kota Sawahlunto	10 182	10 195	10 537
Kota Padang Panjang	10 734	10 754	11 153
Kota Bukittinggi	13 282	13 331	13 633
Kota Payakumbuh	13 281	13 317	13 687
Kota Pariaman	12 796	12 818	13 150
Provinsi Sumatera Barat	10 733	10 790	11 130

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi Hijau

IKU 12 : Pertumbuhan PMTB (%)

Sasaran 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Pertumbuhan PMTB** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya

12.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 12.1. Capaian Indikator **Pertumbuhan PMTB**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan PMTB	4,20	1,71	41%

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi 2023

12.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Pertumbuhan PMTB** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 12.2. Perbandingan Capaian **Pertumbuhan PMTB** 3 Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan PMTB		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019		5,47 % (2.378.812,11)	
2020	-0.4	min - 0,47% (2.389.776,54)	85%
2021	3,9	1,71% Rp. 2517276,69	44%
2022	4,2	1,71% Rp. 2517276,69	41%

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi 2023

12.3. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 12.3 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
Program Promosi Penanaman Modal	183,494,000	178,892,290	97%

Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi Hijau

IKU 13 : Persentase Realisasi Investasi Hijau (%)

Sasaran 2 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Persentase Realisasi Investasi Hijau** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase realisasi investasi hijau terhadap total realisasi investasi pada tahun tertentu.

13.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 13.1. Capaian **Persentase Realisasi Investasi Hijau**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Realisasi Investasi Hijau	60 %	20,14 %	33,56

Sumber: Dinas PMPTSP Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2023

Target Presentase Investasi Hijau Tahun 2022 tidak tercapai dikarenakan kondisi Investasi di Bukittinggi didominasi oleh UMKM atau kategori UMK dan masih sedikitnya pelaku usaha yang menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya pelaku usaha belum melakukan migrasi data NIB dari OSS1.1 ke OSS-RBA. Total nilai Investasi Tahun 2022 Rp. 1.388.765.962.703. Didalam OSS UMK adalah Usaha Mikro Kecil yaitu usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) baik orang perseorangan maupun badan usaha. Sedangkan Non-UMK adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) baik orang perseorangan ataupun badan usaha.

13.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Persentase Realisasi Investasi Hijau** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 13.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019			
2020			
2021	55		
2022	60	20.14	33,56

Untuk perbandingan data sebelum tahun 2022, tidak dapat dihitung dikarenakan adanya perubahan RPJMD Kota Bukittinggi dan indikator terhadap investasi hijau mengalami perubahan disebabkan perpindahan aplikasi OSS 1.1 ke OSS-RBA. sehingga ada beberapa KBLI yang berbeda.

13.3. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 13.3 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Program Promosi Penanaman Modal	183,494,000	178,892,290	97%

Sasaran 3 : Terbangunnya Infrastruktur Hijau**IKU 14 : Indeks Daya Saing Infrastruktur**

Sasaran 3 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Daya Saing Infrastruktur** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Indeks komposit capaian pembangunan infrastruktur dari indikator jalan, air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman dan perumahan.

14.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022Tabel 14.1. Capaian Indikator **Indeks Daya Saing Infrastruktur**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Daya Saing Infrastruktur	76	73,72	97 %

Capaian kinerja Tahun 2022 melebihi target karena beberapa indikator kinerja utama disebabkan hal sebagai berikut:

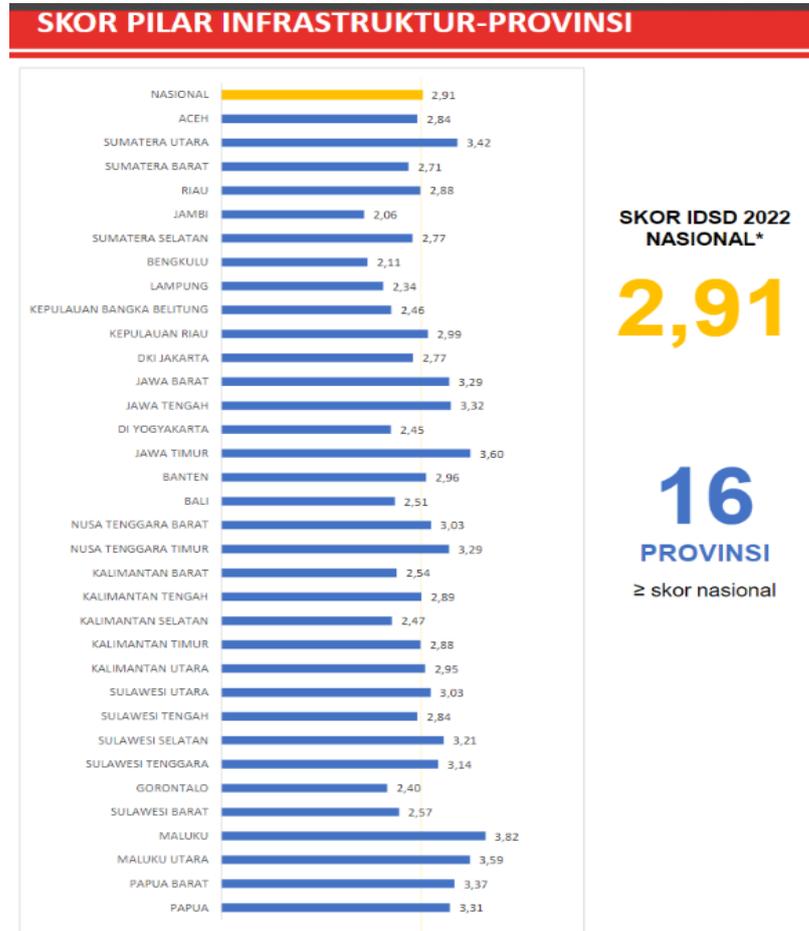
1. cakupan drainase perkotaan yan berkondisi baik naik signifikan 922, 16 %
2. persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan b=naik 415, 05 %

14.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 14.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Daya Saing Infrastruktur		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	75	94,61	126,14 %
2022	76	73,72	97 %

14.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional



*) Skor nasional adalah rata-rata skor IDSD provinsi

12

Pilar infrastruktur mengukur keberadaan dan kualitas Sarana dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi Di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar dan mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing

14.4. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 14.4 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Sasaran Program		Rencana Tingkat Capaian	Rencana (%)	Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Ket
URAIAN	Indikator Sasaran				
1	2	3	4	5	6
1 Tersedia Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar yang Berwawasan	Capaian Akses Air Minum Layak	100.00	94.99	94.99%	Dari Masukan
		50.00	83.33	166.67%	Dari Keluaran

Lingkungan					
	Cakupan Akses Sanitasi Layak	100.00	93.48	93.48%	Dari Masukan
		100.00	100.00	100.00%	Dari Keluaran
	Persentase Drainase Perkotaan yang Berkondisi Baik	100.00	85.10	85.10%	Dari Masukan
		100.00	922.16	922.16%	Dari Keluaran
	Persentase Jalan beserta Bangunan Pelengkap Jalan Berkondisi Mantap	100.00	71.89	71.89%	Dari Masukan
		100.00	415.05	415.05%	Dari Keluaran
2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang memenuhi standar teknis dan berwawasan lingkungan	Persentase Bangunan Gedung yang Telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	100.00	34.62	34.62%	Dari Masukan
		100.00	77.78	77.78%	Dari Keluaran
3 Tersedianya Ruang Publik dan Penataan Ruang yang optimal	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	100.00	67.28	67.28%	Dari Masukan
		100.00	87.73	2.00%	Dari Keluaran
4 Terwujudnya Pertanian Kota yang Berkelanjutan	Persentase Jaringan Irigasi berkondisi baik	100.00	51.31	51.31%	Dari Masukan
		100.00	53.33	53.33%	Dari Keluaran
	Jumlah Daerah Irigasi yang terbangun	100.00	91.09	91.09%	Dari Masukan
		100.00	52.41	52.41%	Dari Keluaran
TOTAL		100.00	73.72	73.72%	Dari Masukan
		93.75	223.98	238.91%	Dari Keluaran

Sasaran 4: Menurunnya Kemiskinan

IKU 14 : Tingkat Kemiskinan (%)

Sasaran 4 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kemiskinan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan terhadap total jumlah penduduk pada tahun tertentu.

I. Penduduk Miskin

Konsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

SumberData :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

II. Garis Kemiskinan (GK)

Konsep:

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).



Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

Dimana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi, sehingga:

Dimana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

Dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

Dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp).



V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD 2004).

i = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p .

p = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

III. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

IV. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep :

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

V. Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

15.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 15.1. Capaian Indikator **Tingkat Kemiskinan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kemiskinan	4,48	4,46	100,44 %

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

Target Tahun 2022 = 4,48

Realisasi Tahun
2022 = 4,46

Selisih capaian = 4,48 - 4,46
= 0,02

% Selisih Capaian = (0,02 / 4,48) 100 %
= 0,44 %

% Capaian = 100% + % Selisih Capaian
= 100% + 0,44 %
= 100,44 %

Sejumlah program berbasis kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam dua tahun terakhir menjadi unggulan bagi Wali Kota Bukittinggi. Sebut saja, Tabungan Utsman, subsidi uang komite untuk pelajar SLTA dan banyak bantuan sosial yang

dikurcurkan. Melalui arah kebijakan anggaran Wali Kota Bukittinggi untuk membangkitkan ekonomi UMKM, pada Tahun 2022, Kota Bukittinggi berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai titik terendah sepanjang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sampai sekarang.

15.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kemiskinan** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 15.2. Perbandingan antara **Tingkat Kemiskinan** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Tingkat Kemiskinan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020		4,54	
2021		5,14	
2022	4,48	4,46	100,44 %

Sumber : BPS Kota Bukittinggi 2023

Program program Pemerintah Kota Bukittinggi selama Tahun 2022 ternyata memang berdampak pada penurunan angka kemiskinan Kota Bukittinggi. Dari data BPS Bukittinggi, tingkat Kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2022, menurun dibanding dua tahun sebelumnya.

Tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada angka 4,54 persen. Tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 5,14 persen. Sementara, pada tahun 2022, program program Pemko Bukittinggi menunjukkan hasil positif, dengan menurunkan angka kemiskinan hingga 4,46 persen.

Capaian tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2022, merupakan capaian terbaik selama periode RPJPD Kota Bukittinggi sejak tahun 2006 hingga saat ini.

15.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
SUMATERA BARAT (Provinsi)	344,23	370,67	335,21
Kepulauan Mentawai	13,37	14,31	13,74
Pesisir Selatan	35,46	37,41	33,78
Kab.Solok	29,28	30,36	27,16
Sijunjung	16,28	16,81	15,07
Tanah Datar	15,34	15,89	14,91
Padang Pariaman	28,98	30,41	26,44

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)		
	2020	2021	2022
Agam	33,31	34,26	31,33
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26,00
Pasaman	20,29	21,57	19,94
Solok Selatan	12,39	13,41	11,81
Dharmasraya	15,70	17,60	15,08
Pasaman Barat	31,64	34,97	32,91
Padang	42,17	48,44	42,37
Kota Solok	1,99	2,31	2,28
Sawahlunto	1,36	1,52	1,47
Padang Panjang	2,84	3,28	2,89
Bukittinggi	6,01	6,98	6,16
Payakumbuh	7,74	8,66	8,08
Pariaman	3,66	3,99	3,80

Mulai 2007 penghitungan Kemiskinan per Juli sebelumnya Maret, 2011-2014 penghitungan September, 2015 - 2017 Kondisi Maret

15.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi berada pada angka 4,54 persen. Tahun 2021, terjadi peningkatan menjadi 5,14 persen. Sementara, pada tahun 2022, program program Pemko Bukittinggi menunjukkan hasil positif, dengan menurunkan angka kemiskinan hingga 4,46 persen. Hal itu tidak terlepas dari sejumlah program berbasis kemasyarakatan oleh pemerintah kota Bukittinggi dalam dua tahun terakhir, menjadi unggulan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Sebut saja, Tabungan Utsman, subsidi uang komite untuk pelajar SLTA dan banyak bantuan sosial yang dikururkan. Melalui arah kebijakan anggaran Wali Kota Bukittinggi untuk membangkitkan ekonomi UMKM, pada 2022, Bukittinggi berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai titik terendah sepanjang periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sampai sekarang. Program tersebut, ternyata memang berdampak pada penurun angka kemiskinan Kota Bukittinggi, sehingga tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi tahun 2022, menurun dibanding dua tahun sebelumnya.



15.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Inflasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 diperkirakan akan terus meningkat dan berpotensi berada di atas target sasaran yaitu sebesar 3,1%. Tingginya tingkat inflasi di Kota Bukittinggi disebabkan oleh keterbatasan pasokan komoditas akibat tingginya curah hujan, kenaikan harga pupuk dan kenaikan harga BBM. Sehingga secara nasional, Bukittinggi masuk peringkat 10 Nasional untuk angka inflasi tertinggi.

Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya menjaga kestabilan harga dengan memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi masyarakat. Salah satu terobosan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan pemberian subsidi kepada pelaku UMKM melalui Tabungan Utsman. Tabungan Utsman merupakan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membantu permodalan masyarakat dalam berusaha guna meningkatkan ekonomi mereka.

Sampai bulan Oktober 2022, warga Kota Bukittinggi telah memanfaatkan Tabungan Utsman sebanyak 1.663 orang dengan total kucuran pinjaman sebesar Rp 12.239.500.000,- dengan subsidi margin yang telah diberikan Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp 2.325.505.000,- dan pembayaran macet 0 (nol) %. Pemberian subsidi melalui Tabungan Utsman juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga UMKM dari tekanan kenaikan harga dan juga mengurangi angka kemiskinan.

Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menyusun program yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat dan lebih fokus pada program yang mengurangi beban masyarakat secara langsung. Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil mengangkat Perekonomian masyarakat Kota Bukittinggi di sektor UMKM hingga mencapai 300%. Pada Tahun 2022, total usaha meningkat menjadi 4.300 dan serapan tenaga kerja sebanyak 13.243 jiwa sehingga total serapan investasi meningkat menjadi Rp 1 Trilyun lebih.

Sasaran 5 : Meningkatnya Kesempatan Kerja**IKU 16 : Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**

Sasaran 5 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Pengangguran Terbuka** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

16.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022Tabel 16.1. Capaian Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka**

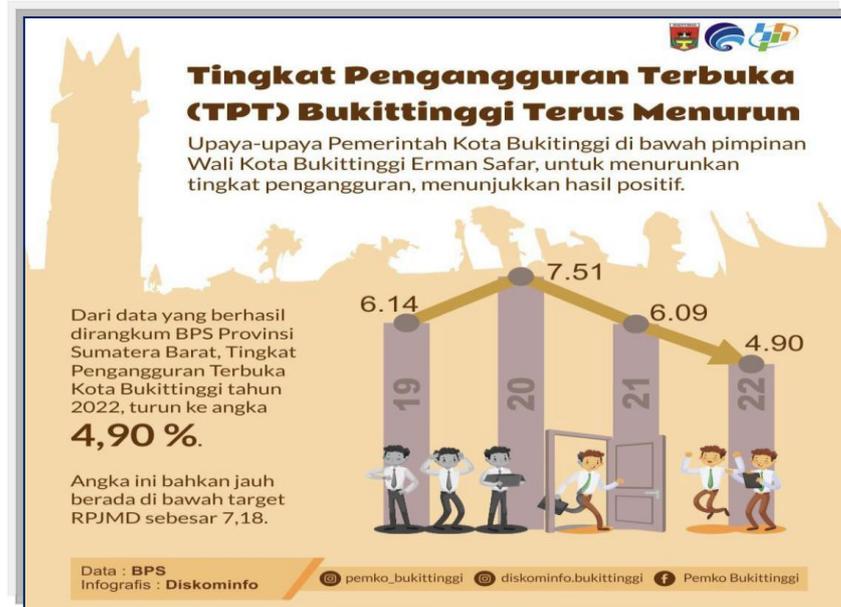
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,18	4,9	131,75%

Sumber : Dinas KopUKMNaker Kota Bukittinggi 2023

Target Tahun 2022 = 7,18

Realisasi Tahun
2022 = 4,9Selisih capaian = 7,18 - 4,9
= 2,28% Selisih Capaian = (2,28 / 7,18) 100 %
= 31,75 %% Capaian = 100% + % Selisih Capaian
= 100% + 31,75 %
= 131,75 %

Pada tahun 2022 realisasi tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi menurut data BPS adalah 4,9 dari target 7,18. Hal ini berarti pencapaian Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran melebihi ekspektasi/target yang telah ditetapkan. Nilai tingkat pengangguran terbuka didapatkan dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja. Sehingga semakin rendah tingkat pengangguran terbuka maka semakin sedikit penduduk usia kerja yang menganggur. Selain itu pelatihan kerja meningkatkan produktivitas calon tenaga kerja serta tumbuhnya peluang usaha pasca Covid-19.



16.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Pengangguran Terbuka** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 16.2 Perbandingan antara **Tingkat Pengangguran Terbuka 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019			
2020	7,51	7,51	100
2021	7,35	6,09	117,55
2022	7,18	4,9	131,75

Sumber : Dinas KopUKMNaker Kota Bukittinggi 2023

16.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39
Kab. Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61
Kab. Solok	4,65	4,67	5,89
Kab. Sijunjung	5,30	3,57	4,87
Kab. Tanah Datar	4,79	4,63	5,91
Kab. Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60
Kab. Agam	4,61	5,06	4,93

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab. Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72
Kab. Pasaman	5,04	4,92	5,38
Kab. Solok Selatan	5,62	4,84	3,71
Kab. Dharmasraya	5,31	5,00	6,23
Kab. Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33
Kota Padang	13,64	13,37	11,69
Kota Solok	8,35	5,15	3,90
Kota Sawahlunto	8,20	6,38	5,00
Kota Padang Panjang	7,22	4,90	4,84
Kota Bukittinggi	7,51	6,09	4,90
Kota Payakumbuh	6,68	6,47	5,16
Kota Pariaman	5,73	6,09	5,19
Provinsi Sumatera Barat	6,88	6,52	6,28

Catatan: 2011-2017: menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035. Tahun 2016, Data tenaga kerja per Kabupaten/Kota tidak tersedia karena sampel tidak mencukupi. 2018-2021 menggunakan estimasi dari hasil proyeksi SUPAS 2015

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari perbandingan dengan kabupaten dan kota disekitar wilayah Bukittinggi dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran di Bukittinggi mengalami penurunan yang cukup drastis selama tahun 2022. Dimana pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi berada pada angka 6,09 dan turun sebanyak 1,19 poin sehingga menjadi sebesar 4,9 pada tahun 2022. Hal ini berarti program dan kegiatan yang dijalankan pada urusan pemerintah bidang tenaga kerja mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi yang juga menggembirakan selama tahun 2022 pasca covid-19 juga turut memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Pada tahun 2020 peluang kerja menurun dikarenakan pada tahun ini pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat signifikan di segala aspek. Hal ini membuat perusahaan / pemberi kerja berada dalam kondisi yang tidak stabil dan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak boleh dilakukan. Pandemi covid-19 membuat pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilakukan termasuk pelatihan kerja yang merupakan salah satu program dan kegiatan pada Bidang Tenaga Kerja. Kemudian pada Tahun 2021 dampak pandemi sudah mulai berkurang

sehingga peluang dalam penambahan karyawan baik yang ada di daerah maupun di luar daerah mengalami pertumbuhan walaupun masih dinilai belum maksimal.

Sementara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri masih belum boleh dilaksanakan. Di tahun ini pelatihan tenaga kerja sudah mulai dilaksanakan kembali walaupun masih dalam skala yang kecil dalam rangka meningkatkan produktivitas calon tenaga kerja dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja. Pada Tahun 2022 kondisi pasca Covid-19 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya dan keadaan new normal membuka kembali peluang kerja baik di dalam daerah, luar daerah bahkan ke luar negeri sehingga tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

16.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Faktor - faktor yang menyebabkan keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka diantaranya:

1. Peluang kerja telah terbuka luas di semua sektor perekonomian
2. Adanya peluang kerja ke luar negeri yang sudah boleh dilaksanakan
3. Adanya bantuan sarana usaha baik melalui perbankan atau melalui tabungan Utsman yang merupakan salah satu program prioritas Walikota sehingga merangsang pertumbuhan usaha bagi para pelaku usaha kecil menengah (UMKM)
4. Kondisi new normal yang mulai membaik sehingga serapan tenaga kerja sudah mulai meningkat

16.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Pemko Bukittinggi melahirkan kebijakan pengangguran yang berpihak kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satunya, melalui Tabungan Utsman yang dapat memberikan pembiayaan modal kepada warga kota, sehingga dengan modal usaha tersebut mereka dapat membuka usaha secara mandiri. Upaya inilah yang bisa dilakukan untuk dapat mengurangi angka pengangguran dalam dua tahun terakhir.

16.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)$$

$$\begin{aligned} &= 100\% - \frac{(81.20\% \times 100\%)}{68.25} \\ &= -19\% \end{aligned}$$

16.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 16.6. Program/ Kegiatan Penunjang Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	652,160,100	522,466,461	80.11%
Program penempatan tenaga kerja	8,379,500	8,063,200	96.23%
Program hubungan industrial	26,904,784	18,097,400	67.26%

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

IKU 17 : Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Angka Rata-rata Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal

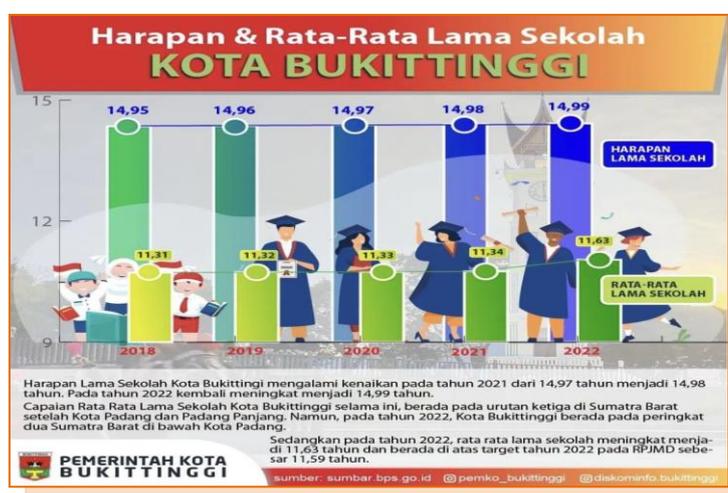
17.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 17.1. Capaian Indikator **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Rata-rata Lama Sekolah	11,5	11,63	101%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Angka lama sekolah 9 tahun sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP untuk umur 7 s/d 15 Tahun data capaian didapat dari BPS melalui <https://bukittinggikota.bps.go.id/>



17.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Angka Rata-rata Lama Sekolah** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 17.2 Perbandingan antara **Angka Rata-rata Lama Sekolah** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Angka Rata-rata Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Kinerja
2020	11.33	11.33	100%
2021	11.44	11.34	99%
2022	11.5	11.63	101%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Peningkatan Dana Operasional sekolah melalui Bosda selain BOS dan BOP Kesetaraan.

17.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	7,09	7,20	7,48
Kab. Pesisir Selatan	8,26	8,27	8,43
Kab. Solok	7,86	7,87	7,89
Kab. Sijunjung	8,11	8,12	8,30
Kab. Tanah Datar	8,61	8,62	8,90
Kab. Padang Pariaman	7,87	7,88	8,16
Kab. Agam	8,96	8,97	8,98
Kab. Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08
Kab. Pasaman	8,09	8,10	8,11
Kab. Solok Selatan	8,28	8,32	8,41
Kab. Dharmasraya	8,47	8,55	8,56
Kab. Pasaman Barat	8,19	8,27	8,55
Kota Padang	11,58	11,59	11,60
Kota Solok	11,03	11,04	11,35
Kota Sawahlunto	10,17	10,32	10,43
Kota Padang Panjang	11,62	11,63	11,92
Kota Bukittinggi	11,33	11,34	11,63
Kota Payakumbuh	10,73	10,81	10,82

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kota Pariaman	10,59	10,67	10,78
Provinsi Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional

17.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah dibayarkannya honorarium pegawai Non PNS pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disesuaikan dengan UMR, dan pemberian insentif bagi guru-guru di sekolah swasta

17.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi)

17.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned}
 \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\
 &= \frac{100\% - (95,57\% \times 100\%)}{101\%} \\
 &= \mathbf{5,38\%}
 \end{aligned}$$

17.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 17.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

program/ kegiatan	anggaran tahun 2022	realisasi anggaran 2022	persentase
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (UPTD)	20,397,252,862	19,493,362,996	95.57%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	10,678,614,250	10,300,841,591	96.46%
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6,478,272,000	6,023,078,067	92.97
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini	344,599,992	330,403,476	95.88
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Kesetaraan	383,700,000	376,315,080	98.08

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan**IKU 18 : Harapan Lama Sekolah (Tahun)**

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Harapan Lama Sekolah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang.

18.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022Tabel 18.1. Capaian Indikator Kinerja **Harapan Lama Sekolah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Harapan Lama Sekolah	14,99	14,99	100%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bukittinggi 2023

Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang 14,99 tahun
-----------------------------	---

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah 9 tahun sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP untuk umur 7 s/d 15 Tahun. data capaian didapat dari BPS melalui <https://bukittinggikota.bps.go.id/>

18.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Harapan Lama Sekolah** an Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 18.2 Perbandingan antara **Harapan Lama Sekolah** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Harapan Lama Sekolah		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	14.99	14.97	99.87%
2021	15	14.98	99.87%
2022	15.2	14.99	98.62%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Angka terkait Harapan Lama Sekolah Kota Bukittinggi Tahun 2021 melalui Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022 adalah 14,98. Sementara untuk pencapaian target kinerja Tahun 2022 tercatat 14,99.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama Sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79%. Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini adalah dalam bentuk fasilitasi dan koordinasi.

18.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89
Kab. Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35
Kab. Solok	13,04	13,05	13,30
Kab. Sijunjung	12,37	12,38	12,64
Kab. Tanah Datar	14,33	14,34	14,59
Kab. Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93
Kab. Agam	13,87	13,88	13,88
Kab. Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40
Kab. Pasaman	12,80	12,81	13,05
Kab. Solok Selatan	12,71	12,72	12,73
Kab. Dharmasraya	12,43	12,44	12,51
Kab. Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat [Metode Baru] (Tahun)		
	2020	2021	2022
Kota Padang	16,52	16,53	16,54
Kota Solok	14,32	14,33	14,34
Kota Sawahlunto	13,17	13,18	13,42
Kota Padang Panjang	15,06	15,07	15,07
Kota Bukittinggi	14,97	14,98	14,99
Kota Payakumbuh	14,26	14,27	14,29
Kota Pariaman	14,54	14,55	14,61
Provinsi Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10

Source : Socio Economic National Survey

18.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kini di dukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah peningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

Pemerintah Kota Bukittinggi untuk tetap mengakomodir 20% dari total anggaran APBD untuk pendidikan. Disamping itu kesadaran masyarakat Kota Bukittinggi terhadap pendidikan dengan juga merupakan factor pendorong tercapainya indikator ini.

18.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Peningkatan bantuan untuk siswa miskin (alat tulis, buku paket, pakaian seragam, sepatu, tas dan biaya transportasi)

18.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (97,65\% \times 100\%)}{98,62\%} \\ &= 0,99\% \end{aligned}$$

18.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 18.6. Program/ kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator

Program/Kegiatan /Sub.Kegiatan	Anggaran tahun 2021	Realisasi Anggaran tahun 2021	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55,648,124,002	54,219,905,509	97.43
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	30,648,021,022	29,846,247,182	97.38
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15,010,779,424	14,595,839,388	97.24
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9,009,534,136	8,879,217,818	98.55

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

IKU 19 : Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik

Sasaran 6 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Kemampuan peserta didik dalam mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya

19.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 19.1. Capaian Indikator **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik	48	88,30	183,95 %

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2023

Kemampuan peserta didik (sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan peserta didik SD dan SMP se Kota Bukittinggi) dalam mencapai kematangan pada kesadaran berpikir dan bertindak untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya, data survey dibawah

Indeks Kecerdasan Sosial Tahun 2022

N o.	Indikator	Kategori				Jlh	%	Keterangan
		Kurang Baik	Cukup	Baik	Sangat Baik			
1	Kecerdasan Situasional	0	0	135	0	135	100.00	Normal Kualiti
2	Kemampuan Membawa Diri	0	1	134	0	135	99.26	Normal Kualiti
3	Autentisitas atau Keaslian	1	5	62	67	135	45.93	Abnormal Kualiti
4	Clarity atau Kejelasan	0	2	133	0	135	98.52	Normal Kualiti
5	Empati	0	3	132	0	135	97.78	Normal Kualiti
	Persentase	0.74	8.15	441.48	49.63		88.30	Normal kualiti (Baik)

19.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 19.2 Perbandingan antara **Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Tingkat Kecerdasan Sosial Peserta Didik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021			
2022	48%	88.30%	184%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 20223

19.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Selain penerapan Kurikulum nasional dan pendidikan karakter terhadap peserta didik pemerintah daerah kota Bukittinggi juga menerapkan kurikulum muatan lokal yaitu PKBAM dan PUBP

19.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

Mengatasi berbagai kendala yang terjadi Pemerintah Kota Bukittinggi melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurikulum muatan lokal dapat dukungan penuh dari pimpinan daerah dan didukung dengan anggaran yang memadai.
2. Peningkatan pembelajaran karakter terhadap peserta didik di sekolah sekolah.

19.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (97\% \times 100\%)}{184\%} \\ &= \mathbf{47,29\%} \end{aligned}$$

19.6. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 19.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Anggaran tahun 2021	Realisasi Anggaran tahun 2021	%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	131,830,000	128,121,626	97.00%

Sasaran 7 : Meningkatnya Kehidupan Keagamaan

IKU 20 : Indeks Kesalehan Sosial

Sasaran 7 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kesalehan Sosial** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks capaian pembangunan manusia terkait kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika di ruang publik, melestarikan lingkungan dan kepatuhan kepada agama.

20.1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 20.1. Tabel Capaian Indikator **Indeks Kesalehan Sosial**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesalehan Sosial	84,2	85,109	101,32

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2023

Penelitian tentang Indeks Kesalehan Sosial Kota Bukittinggi merupakan upaya sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Bapelitbang Kota Bukittinggi bekerja sama dengan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk mengetahui perkembangan kesalehan sosial masyarakat Kota Bukittinggi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Tim Peneliti yang dipercayakan kepada Civitas Akademika UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga dengan usaha sungguh-sungguh pula mewujudkan terlaksananya penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana diamanatkan

Dari beberapa dimensi yang menentukan terhadap IKS yang dihitung, di antaranya berdasarkan dimensi kerjasama, kepedulian sosial, relasi antar manusia atau toleransi dan menjaga ketertiban umum kemudian hasil penghitungan tersebut dikategorikan ke dalam capaian sangat tinggi, tinggi, sedang dan rendah. Pengkategorian ini dilakukan dengan rentang nilai dan kemudian diinterpretasikan dengan sangat tinggi dengan A, tinggi dengan B, rendah dengan C dan sangat rendah dengan D, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Kategori Mutu IKS dan Kategori Capaian IKS

Nilai persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Kesalahan Sosial	Kategori Capaian IKS
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Rendah
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Sedang
3	3,0644 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Tinggi
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,0	A	Sangat Tinggi

Berdasarkan pengkategorian dan pengintervalan tersebut, ternyata mutu IKS Kota Bukittinggi dari hasil survey yang dilakukan pada tahun 2022 ini tergolong tinggi dengan reratanya berada pada angka 85,1090, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Jenis Indeks	Jenis Indeks	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Kesalahan Sosial	Tingkat Kesalahan Sosial
IKS	3,4043	85,1090	B	Tinggi

Tingginya IKS Kota Bukittinggi ini sangat dipengaruhi oleh masing-masing umat beragama telah melaksanakan ajaran agama untuk kepentingan kehidupan sosialnya. Umat beragama di Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai aktivitas sosial dengan baik yang terlihat dari nilai-nilai dimensi kesalehan sosial dari masyarakat Kota Bukittinggi pada masing-masing dimensi sikap kesalehan sosial; yakni mulai dari dimensi kerjasama, solidaritas sosial, menjaga ketertiban umum, relasi antar umat, dan seterusnya pada umumnya telah dilakukan dengan baik, bahkan ada yang sangat tinggi, seperti toleransi dan menjaga ketertiban umum sebagai kewajiban warga negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel

Unsur Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Nilai Interval (NI)	Mutu Kesalahan Sosial	Kategori Capaian IKS
Kerjasama	3.4148	B	Tinggi
Kepedulian/Solidaritas Sosial	3.2329	B	Tinggi
Toleransi dan Relasi Antar Manusia	3.5593	A	Sangat Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Kewajiban Warga Negara)	3.7733	A	Sangat Tinggi

Ketertiban Umum (Sub Dimensi Keterlibatan Dalam Organisasi)	3.3408	B	Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Keterlibatan dalam Pencegahan Kekerasan)	3.3721	B	Tinggi
Ketertiban Umum (Sub Dimensi Melestarikan Lingkungan)	3.0948	B	Tinggi
Rata-rata Capaian IKS	3.3983	B	Tinggi

Dari dimensi kesalehan sosial yang diukur di atas, diperoleh rerata sikap toleransi dan relasi antar umat manusia sangat tinggi dengan nilai interval 3.5593 dan begitu pula dengan menjaga ketertiban umum sebagai kewajiban warga negara berada nilai intervalnya sangat tinggi, dibandingkan nilai-nilai dimensi yang lainnya, yaitu 3.7733. Sementara dimensi-dimensi yang lainnya berada pada rerata kategori tinggi. Dengan demikian umat beragama di Kota Bukittinggi telah memerankan agama dalam sikap sosial kesehariannya. Ajaran agama telah mendorongnya untuk membangun sikap yang toleran, sikap kerjasama, sikap solidaritas dan sikapnya sebagai warga negara. Sebagai masyarakat yang kota yang heterogen ternyata masyarakatnya juga sudah memiliki sikap sosial yang sangat toleran mampu hidup berdampingan secara damai

20.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 20.2 Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	IKS		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	84,2	85,109	101,32

Sumber: Bapelitbang Kota Bukittinggi 2023

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kesalehan Sosial belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pengukuran IKS yang baru dilaksanakan pada Tahun 2022, sehingga data perbandingan tidak dapat ditayangkan dan hanya data capaian kinerja atas Tahun 2022 saja yang di tayangkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan survey IKS dilakukan Untuk mengetahui tentang Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kota Bukittinggi dilakukan dengan pengumpulan data kepada kelompok masyarakat atau responden atas dasar beberapa pertimbangan, mulai dari pertimbangan domisili, gender, usia, agama, suku bangsa, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, semuanya berjumlah sebanyak 600 orang. Dari jumlah 600 orang sebagai basis pengumpulan data itu, tingkat ketersebarannya atau distribusinya bermacam-macam. Data dikumpulkan terhadap responden dengan kriteria domisili, gender, Usia, agama, suku bangsa, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan.

20.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap tinggi atau rendahnya IKS Kota Bukittinggi. Diantaranya teridentifikasi faktor yang mempengaruhi IKS tersebut adalah adanya faktor pengetahuan, habituasi, sosio demografi, afiliasi organisasi keagamaan dan adat, serta ritualitas keagamaan masyarakat. Seberapa besar pengaruhnya masing-masing aspek tersebut menentukan IKS telah dipetakan berdasarkan rerata yang diperoleh pada masing-masing kecamatan, sampai pada rerata keseluruhan capaian IKS Kota Bukittinggi

Tingkat pengetahuan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap IKS jika dibandingkan dari masing-masing faktor lainnya. Seberapa besarnya tingkat pengetahuan masyarakat pada masing-masing kecamatan di Kota Bukittinggi menentukan IKS tersebut, ternyata pada Kecamatan Guguk Panjang tingkat pengetahuan tersebut berada pada kategori yang sangat tinggi menentukan IKS di kecamatan tersebut dengan rerata 3,645, sementara pada Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh berada pada rerata 3,500 kategori tinggi dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan rerata 3,353 berada pada kategori tinggi, sebagaimana dapat dilihat pada tabel

No	Kecamatan	Rata-rata	Kategori
1	ABTB	3,500	Tinggi
2	GP	3,645	Sangat Tinggi
3	MKS	3,353	Tinggi

Habituasi atau kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosialnya sebagai seorang umat beragama juga memiliki tingkat pengaruh yang tinggi dalam menentukan IKS pada masing-masing kecamatan, dimana reratanya berada pada kategori tinggi, seperti di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh reratanya habituasi masyarakatnya 3,316, di Kecamatan Guguk Panjang rerata habituasi masyarakatnya 3,424 dan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan rerata 3,274

20.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak / Belum Mencapai Target

IKS Kota Bukittinggi tahun 2022, berada pada kategori tinggi ini memiliki arti penting dalam mengetahui bahwa sikap sosial umat beragama masyarakat Kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan Kota Bukittinggi. Berdasarkan pada aspek-aspek penentu IKS Kota Bukittinggi dikemukakan beberapa rekomendasi kebijakan dan rencana aksi dari hasil penelitian ini seperti pada tabel berikut:

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
I.	Pengetahuan	Penguatan Pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> a) Penguatan kompetensi guru anti diskriminasi b) Penguatan program <i>tahfiz</i> dan ibadah <i>qira'ah</i> bagi setiap kelompok usia c) Optimalisasi program BKMT d) Optimalisasi kegiatan keagamaan bagi kelompok usia lanjut e) Kegiatan tahfiz untuk kelompok lanjut usia f) Optimalisasi Pendidikan Karakter dengan <i>field based training</i> di tingkat usia dini
		Penguatan moderasi beragama	<ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi berbagai program Kementerian Agama tentang moderasi beragama di tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi b) Sosialisasi program moderasi beragama di forum-forum pemuda lintas agama c) Sosialisasi program moderasi beragama di forum-forum pengajian dan di rumah-rumah ibadah d) sosialisasi dan edukasi kepada para Penyuluh Agama Islam tentang moderasi beragama e) Mengusut tegas kasus-kasus intoleransi dalam beragama
		Penguatan Pendidikan sadar lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a) Kebijakan pengadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik ramah disabilitas, ramah anak, dan lansia b) Mengefektifkan pengolahan sampah organik dan anorganik di tingkat kelurahan c) Melarang penggunaan kemasan plastik sekali pakai di ruang publik. d) Mempersiapkan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. e) Membuat regulasi terkait dengan revitalisasi budaya lokal dan penjagaan lingkungan f) Regulasi penjadwalan penggunaan listrik g) Sosialisasi cinta produk dalam negeri h) Program pengelolaan persampahan dan daur ulang di tingkat kelurahan dan kecamatan
			<ul style="list-style-type: none"> i) Sosialisasi program-program Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) j) Sosialisasi program-program <i>Green Economics</i> k) Sosialisasi program-program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup
		Penguatan Pengetahuan tentang budaya	<ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan multikultural dalam kurikulum b) Keterlibatan praktisi adat dalam kegiatan ekstra kurikuler atau muatan lokal c) Pendidikan multikultural dalam kurikulum d) Penguatan literasi budaya di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi e) Melestarikan budaya Minang dalam berbagai event nasional dan internasional
II.	Ritual Keagamaan	Optimalisasi fasilitas dan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> a) Menginisiasi pemakaman umum b) Penataan sarana ibadah dan kelompok-kelompok keagamaan c) Pembinaan materi dakwah oleh tokoh-tokoh agama d) Penataan penghimpunan dana-dana di jalanan

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
		Penguatan Regulasi	a) Regulasi sertifikasi ulama dan pemuka agama lainnya b) Jaminan kebebasan beribadat untuk semua umat beragama, sehingga masing-masing tidak terdiskriminasi c) Penganekaragaman materi dakwah; Dakwah Lingkungan, Dakwah Tertib Lalu Lintas, Dakwah Ekonomi, dll.
III.	Afiliasi	Optimalisasi Organisasi Keagamaan	a) Mengoptimiliasi organisasi keagamaan pemuda b) Pembinaan sanggar budaya di tingkat kelurahan c) Menyelenggarakan Forum Diskusi Lintas Agama d) Mengaktifkan berbagai forum yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama, seperti mendukung program Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB), program lintas agama yang lainnya.
		Aktif dalam mengelola rumah ibadah	a) Penataan rumah-rumah ibadah dan kelompok-kelompok keagamaan oleh berbagai afiliasi keagamaan b) Kerjasama Pemko dalam mensosialisasikan nilai nilai moderasi beragama c) Melakukan berbagai macam program penguatan pendidikan agama melalui ekstra kurikuler berbasis rumah ibadah
		Aktif dalam forum komunikasi lintas agama	Melaksanakan program pembinaan umat beragama di Kota Bukittinggi secara berkelanjutan yang tidak diskriminatif melalui kerjasama dengan masing-masing agama dan merancang program yang dapat menyatukan sikap umat beragama dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik.
		Aktif dalam organisasi /institusi/ forum-forum adat	a) Mengaktifkan berbagai forum-forum adat yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama b) Memperkuat eksistensi dan peran lembaga adat dan lembaga keagamaan untuk berperan aktif mengawasi dan memperkuat habituasi umat beragama di Kota Bukittinggi.
IV.	Habituasi	Penguatan Semangat Musyawarah dan gotong royong	a) Memberikan apresiasi kepada kelurahan-kelurahan yang berprestasi dalam merawat lingkungan. b) Penguatan Dasawisma masing-masing kelurahan. c) Optimalisasi peran KAN/ tokoh adat. d) Mengefektifkan peran Badan Musyawarah (Bamus) untuk mempertahankan semangat gotong royong
		Penguatan kebiasaan baik di lingkungan keluarga dan tetangga	a) Sosialisasi sadar pajak, sadar lalu lintas, dan lingkungan sedari dini b) Sosialisasi Keluarga Berencana dan program Kementerian Kesehatan lainnya c) Sadar Wabah penyakit menular
V	Kebijakan pemerintah	Sosialisasi Kebijakan Moderasi Beragama	Melaksanakan kebijakan-kebijakan bersama dengan pihak terkait untuk memperkuat moderasi beragama melalui sehingga sikap masing-masing umat beragama menunjukkan sikap beragama yang <i>rahmatallil'alamiin</i> ;
		Kebijakan Program Keluarga Bahagia	Merancang berbagai program pendukung dari program Keluarga Bahagia yang sudah digagas oleh Pemerintah Pusat

NO	Dimensi/ Faktor Penentu	Rekomendasi Kebijakan	Rekomendasi Aksi
		Kebijakan Inovatif Pemko	Merancang berbagai program program yang inovatif dalam pelayanan publik dan keummatan yang mendukung moderasi beragama
		Kebijakan pajak, retribusi, dan lainnya	a) Mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung pengembangan kota b) Mensosialisasikan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah c) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah
VI	Ritual	Optimalisasi Kegiatan Ibadah dan Berderma	a) Optimalisasi badan pengumpul zakat (BAZNAS) b) Merevitalisasi program Magrib Mengaji/ Didikan Shubuh c) Memperkuat perlindungan keagamaan untuk lansia d) Penataan kegiatan penghimpunan dana ibadah di ruang publik e) Penataan sarana rumah ibadah di lingkungan publik

IKS Kota Bukittinggi tahun 2022, berada pada kategori tinggi. Hal ini memiliki arti penting dalam mengetahui bahwa sikap sosial umat beragama masyarakat Kota Bukittinggi yang memiliki kontribusi terhadap kemajuan. Aspek yang mempengaruhi kesalehan sosial masyarakat ini (aspek kerjasama, solidaritas, keterlibatan sebagai warga negara dan melestrikan lingkungan) berada pada pada kategori tinggi. Bahkan pada dimensi tolerasi dan menjaga keterlibatan sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban umum berada pada kategori yang sangat tinggi. Kondisi ini membuktikan bahwa kesalehan sosial umat beragama di Kota Bukittinggi memiliki peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi Kota Bukittinggi.

Jika ditilik lebih jauh, aspek-aspek penentu IKS Kota Bukittinggi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi, di antaranya:

1. Pengetahuan

Aspek pengetahuan ini memiliki konstribusi yang tinggi terhadap penentuan IKS Kota Bukittinggi. Hal ini bermakna bahwa pendidikan sebagai agen trasformasi dan membentuk karakter sikap sosial masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan; bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat maka semakin tinggi pula kesalehan sosial dari masyarakat itu. Untuk memperkuat konstribusi aspek ini terhadap IKS Kota Bukittinggi ke depan diperlukan kebijakan, di antaranya:

- a. Memperkuat pendidikan karakter anak usia sekolah, dengan pendekatan nilai-nilai budaya lokal dan adat istiadat;
- b. Perlu melakukan program-program pendidikan keagamaan dasar untuk anak usia sekolah, seperti memperbanyak program tahfiz, didikan subuh, literasi agama dan sejenisnya;

- c. Memperkuat perlindungan keagamaan untuk lansia dengan memperhatikan pelaksanaan program-program pemberdayaan kepada lansia supaya kesalehan sosial tetap berkelanjutan dalam segala stratifikasi umur.

2. Habitiasi

Habitiasi memiliki kontribusi penentu IKS Kota Bukittinggi; dilihat dari aspek-aspek penentu habitiasi. Kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengaruh habitiasi pada IKS yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi di antaranya:

- a. Melakukan berbagai macam program penguatan pendidikan agama melalui ekstra kurikuler berbasis rumah ibadah;
- b. Memperkuat eksistensi dan peran lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga keagamaan untuk berperan aktif mengawasi dan memperkuat habitiasi umat beragama di Kota Bukittinggi.

3. Kerjasama

Aspek kerjasama juga memberikan kontribusi penentu terhadap IKS Kota Bukittinggi; di antara kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam memperkuat eksistensi kerjasama ini menentukan IKS Kota Bukittinggi ke depan, adalah:

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan bersama dengan pihak terkait untuk memperkuat moderasi beragama melalui sehingga sikap masing-masing umat beragama menunjukkan sikap beragama yang rahmatallil'alamiin;
- b. Melaksanakan program pembinaan umat beragama di Kota Bukittinggi secara berkelanjutan yang tidak diskriminatif. Hal ini dapat dilakukan bekerjasama dengan masing-masing tokoh agama membuat program yang dapat menyatukan sikap umat beragama dalam membangun hubungan sosial yang lebih baik.

4. Ritual dan Praktek Keagamaan

Pada aspek ini, bagian yang paling penting dilakukan oleh Pemerintah Kota, di antaranya:

- a. Membuat kebijakan untuk memberikan jaminan kebebasan beribadat untuk semua umat beragama, sehingga masing-masing tidak terdiskriminasi. Kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan supaya masing-masing umat beragama memiliki tindakan sosial yang berkontribusi untuk kepentingan kemajuan Bukittinggi yang semakin heterogen;
- b. Mengaktifkan berbagai forum yang dapat membangun anti diskriminasi dalam beragama, seperti mendukung program Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), program lintas agama dan lain sebagainya.

20.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$*Efisiensi = \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$

$$100\% - (89,095\% \times 100\%) / 101,32\%$$

12,07%

20.7. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 20.7. Program/Kegiatan Penunjang Indikator **IKS**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
Pemerintahan dan Kesra	28.855.864.600.00	26.539.289.242.05	91.97%
1. Fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	2,401,180,600.00	1,827,804,088.00	76.12%
2. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	15,903,269,000.00	14.393.172.261.00	90.50%
3. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	10,551,415,000.00	10.318.312.893.05	97.79%

Sumber: Bagian Kesra Setda Kota Bukittinggi 2023

SASARAN 8 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 21 : Angka Harapan Hidup (Tahun)

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup yang secara defenisi operasional dapat diartikan Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu.

21.1. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 21.1. Capaian Indikator Angka Harapan Hidup (Tahun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,85	74,82	99,96 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

Angka harapan hidup pada tahun 2022 adalah 74,82 dimana capaiannya terhadap target adalah sebesar 99,96%

21.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 21.2 Perbandingan antara Angka harapan hidup 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Pertumbuhan PDRB Sektor Sekunder		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019	74.22	74.22	100.00
2020	74.52	74.38	99.81
2021	74.7	74.5	99.73
2022	74.85	74.82	99.96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

21.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 21.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/ Kota di Sumatera Barat

Kabupaten/Kota2	Angka Harapan Hidup (Persen)		
	2019	2020	2021
Sumatera Barat (Provinsi)	69,31	69,47	69,59
Kepulauan Mentawai	64,68	64,73	64,73
Pesisir Selatan	70,73	70,86	70,96
Kabupaten Solok	68,34	68,58	68,79
Sijunjung	66,02	66,21	66,36
Tanah Datar	69,73	69,94	70,12
Padang Pariaman	68,58	68,79	68,97
Agam	72,17	72,37	72,53
Lima Puluh Kota	69,70	69,79	69,84
Pasaman	67,18	67,40	67,59
Solok Selatan	67,58	67,81	68,01
Dharmasraya	71,10	71,33	71,53
Pasaman Barat	67,67	67,82	67,94
Padang	73,57	73,65	73,69
Kota Solok	73,45	73,61	73,73
Sawahlunto	69,87	70,00	70,10
Padang Panjang	72,77	72,82	72,82
Bukittinggi	74,22	74,38	74,50

Kabupaten/Kota2	Angka Harapan Hidup (Persen)		
	2019	2020	2021
Payakumbuh	73,61	73,74	73,84
Pariaman	70,15	70,28	70,38

Apabila dibandingkan dengan angka harapan hidup Propinsi Sumatera Barat maka angka harapan hidup masyarakat di Kota Bukittinggi lebih tinggi daripada angka harapan hidup rata-rata masyarakat di Propinsi Sumatera Barat

21.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Angka harapan hidup mengalami peningkatan sering membaiknya pola perilaku hidup sehat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat

21.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. Penjaringan faktor resiko penyakit degeneratif pada kelompok usia produktif
2. Peningkatan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi, diabetes melitus
3. Peningkatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

21.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$*Efisiensi = \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$

$$100\% - (81,06\% \times 100\%) / 99,96\%$$

18.90

21.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 21.7 Program/ Kegiatan Penunjang Indikator Angka Harapan Hidup

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187,130,000	171,751,840	91.78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3,320,000	3,246,800	97.80
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	140,045,000	131,214,713	93.69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	861,185,600	766,795,043	89.04
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100,007,882	57,506,044	57.50

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

Sasaran 8 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**IKU 22 : Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Capaian pembangunan kesehatan yang meliputi kesehatan balita, kesehatan ibu, penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi, dan status gizi

22.1. Program Atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian IndikatorTabel 22.1. Capaian Indikator Kinerja **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	0,7056	0,6841	96,95

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

22.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 22.2 Perbandingan antara **Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019			
2020			
2021	0.7002	0.6841	97.70
2022	0.7056	0.6841	96.95

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2022

Karena belum tersedianya data yang terbaru dari Kemenkes tentang IPKM ini, maka masih menggunakan data yang lama yaitu data tahun 2018 dimana realisasi IPKM Kota Bukittinggi masih di bawah target yang ditetapkan.

22.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 22.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/ Kota	2021	2022
Prov. Sumatera Barat	0.6177	0.6177
Kota Bukittinggi	0.6841	0.6841
Kab. Lima Puluh Kota	0.6034	0.6034

Dibandingkan dengan IPKM Propinsi Sumbar dan Kab. Lima Puluh Kota, IPKM Kota Bukittinggi masih lebih tinggi

22.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan pelaksanaan Layanan kesehatan yang mendukung indikator IPKM ini, karena ada dukungan dari LS dalam peningkatan pencapaian layanan kesehatan, namun pelayanan yang di berikan belum memenuhi target yang di harapkan karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi, sehingga ada beberapa indikator tidak dapat terpenuhi.

22.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Pemetaan Sasaran dengan melibatkan Lintas Sektor terkait, Promosi Kesehatan secara berkelanjutan, membuat inovasi dalam meningkatkan capaian IKKM

22.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = 100% -	(serapan anggaran x 100 %)
	capaian kinerja IKU
100% -	(81,06/96,95) x 100
	16,39

22.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 22.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	187,130,000	171,751,840	91.78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	173,101,164	102,799,711	59.39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	119,288,000	110,736,320	92.83
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89,800,000	70,881,769	78.93
Pengelolaan Pelayanan			93.69

Kesehatan pada Usia Lanjut	140,045,000	131,214,713	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19,956,000	18,015,350	90.28

Sasaran 8 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 23 : Prevalensi Stunting (%)

Sasaran 8 juga diturunkan pada Indikator Kinerja Utama : **Prevalensi Stunting** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Persentase anak dibawah lima tahun yang mengalami kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) menggunakan standar WHO:



23.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 23.1. Capaian Indikator **Pravelansi Stunting**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	13,3	16.8	126,31 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

Data prevalensi stunting tahun 2022 belum tersedia, karena belum dipublish nya data hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, sehingga data yang digunakan masih data capaian tahun 2021.

23.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Prevalensi Stunting** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 23.2 Perbandingan antara **Prevalensi Stunting** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Prevalensi Stunting		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019			
2020			
2021	14.1	19	134,75
2022	13.3	16.8	126,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2023

Masih tingginya prevalensi stunting kota Bukittinggi dibandingkan dengan target, untuk itu perlunya peningkatan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting

23.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 23.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/ Kota	2021	2022
Prov. Sumatera Barat	23.3	23.3
Kota Bukittinggi	19	19

Prevalensi stunting untuk kota Bukittinggi sudah berada di bawah prevalensi stunting propinsi Sumatera Barat.



23.4 . Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Penyebab belum berhasilnya pencapaian indikator prevalensi stunting dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. pemantauan pertumbuhan di posyandu yang belum berjalan sesuai seharusnya.
- b. Melakukan kerja sama dengan Universitas Fort De Kock untuk meningkatkan jumlah penimbangan balita.
- c. Mempersiapkan media yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita (Antropometri).

23.5. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 23.5 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran	%
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	861,185,600	766,795,043	89.04

Sasaran 9 : Meningkatnya Kualitas Air

IKU 24 : Indeks Kualitas Air

Sasaran 9 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Air** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi air suatu daerah menggunakan metode indeks pencemar.

Indeks Kualitas Air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survey kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Nilai indeks yang semakin tinggi akan menunjukkan kualitas air yang semakin baik pula.

24.1.Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 24.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Air**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Air	47	30	63,83 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Transformasi nilai Indeks Kualitas Air dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II berdasarkan PP

No.82/ 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Pembobotan indeks kualitas air diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. memenuhi baku mutu = 70
- b. tercemar ringan = 50
- c. tercemar sedang = 30
- d. tercemar berat = 10

Sehingga, dari capaian 63,83 % diatas dapat disimpulkan bahwa klasifikasi Indeks Kualitas Air di Kota Bukittinggi berada pada kriteria Tercemar Sedang.

24.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Air** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 24.2 Perbandingan antara **Indeks Kualitas Air** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Air		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	83.98	47.33	56.47 %
2021	83,98	48,06	57,22 %
2022	47	30	63,83 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 masih jauh dari japaian yang diharapkan. Beberapa hal yang menyebabkan diantaranya tingkat kepadatan penduduk Kota Bukittinggi yang tinggi dan jumlah penduduk serta sungai-sungai yang melintas di Kota Bukittinggi relatif pendek

24.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	35,83	55,46	63,21
Kab. Pesisir Selatan	87,08	76,23	85,83
Kab. Solok	79,08	78,09	81,02
Kab. Sijunjung	61,23	64,12	70,27
Kab. Tanah Datar	85,63	86,50	87,80
Kab. Padang Pariaman	88,73	86,09	88,22
Kab. Agam	88,04	87,46	92,80

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2020	2021	2022
Kab. Lima Puluh Kota	74,75	68,93	71,33
Kab. Pasaman	70,98	82,57	75,77
Kab. Solok Selatan	77,04	81,01	77,46
Kab. Dharmasraya	69,93	70,27	69,61
Kab. Pasaman Barat	69,56	81,47	77,76
Kota Padang	98,51	95,52	97,93
Kota Solok	97,83	96,55	97,17
Kota Sawahlunto	91,25	88,27	92,75
Kota Padang Panjang	96,58	98,45	98,09
Kota Bukittinggi	100,00	97,05	98,56
Kota Payakumbuh	98,76	99,43	98,83
Kota Pariaman	95,61	97,69	95,46
Provinsi Sumatera Barat	83,37	83,40	85,23

Catatan: 1. Sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs dimana rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak (access to improved water) yaitu jika sumber air minum utama yang digunakan adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindungi dan mata air terlindungi. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindungi, mata air terlindungi, dan air hujan. 2. Data tahun 2019-2020 merupakan data Backcasting

24.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Ketaatan usaha/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku
2. usaha kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku

24.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan pengelolaan lingkungan
2. melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan

24.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = 100% -	(serapan anggaran x 100 %)
	capaian kinerja IKU
100% -	(84,34 / 63,83) x 100

24.7 Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian

Indikator

Tabel 24.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	282.832.058	251.060.653	88.77
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	282.832.058	251.060.653	88.77
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	88.348.650	82.740.000	93.65
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	128.868.408	114.454.703	88.82
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	39.612.400	30.053.029	75.87
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.612.400	30.053.029	75.87
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27.717.500	21.099.446	76.12
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.894.900	8.953.583	75.27
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.130.050	5.283.500	30.84
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17.130.050	5.283.500	30.84
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17.130.050	5.283.500	30.84
TOTAL	339.574.508	286.397.182	84.34

Sasaran 10 : Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan

IKU 25 : Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sasaran 10 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Tutupan Lahan** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi tutupan lahan

menggunakan parameter tutupan hutan, belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan atau kawasan berfungsi lindung:

25.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 25.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Tutupan Lahan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	37,36	22,38	59.90

Indek Kualitas Tutupan Lahan merupakan IKU baru yang dimunculkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada Tahun 2021, dan juga menjadi IKU pada RPJMD 2021-2026. Penghitungan Indek Kualitas Tutupan Lahan merupakan target yang ditetapkan dengan nilai 37.36 didapatkan realisasi dengan nilai sebesar 22,38 dengan persentase capaian indikator sebesar 59,90 %.

25.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 25.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	22,9	22,9	100 %
2021	22,9	22,38	97,73 %
2022	37,36	22,38	59.90

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya mendapatkan nilai 22,38 dengan persentase kinerja sebesar 59,90 %. Untuk tahun 2017-2019 data indeks kualitas tutupan lahan belum tersedia pada instansi terkait karena memang belum diadakan penghitungan secara sistematis oleh SKPD terkait.

25.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Kota Bukittinggi sebagai wilayah administratif yang terus berkembang di berbagai sektor kehidupan sangat berdampak terhadap jumlah pemanfaatan lahan. Alih fungsi lahan menjadi bangunan maupun sebagai tempat usaha dan kegiatan masyarakat terus saja terjadi. Namun dalam hal ini penataan dan penertiban menjadi langkah penting Pemerintah dalam mengatur kualitas tutupan lahan di Kota Bukittinggi.

Pencapaian kinerja IKU Indeks Kualitas Tutupan Lahan dapat dikatakan berhasil apabila seluruh masyarakat Kota Bukittinggi ikut serta dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan termasuk menjaga pohon, menambah jumlah biopori (daerah resapan) dan memberikan kontribusi yang positif terhadap tutupan lahan pada lingkungan sekitar.

Penyebab kegagalan diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan keberadaan RTH, serta tidak tersedianya dana dukungan dari pemerintah untuk merawat tutupan lahan Kota Bukittinggi.

25.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk mencapai target yang telah ditentukan, Pemerintah Kota telah berupaya untuk merealisasikannya. Namun karena keterbatasan lahan untuk RTH pada RTRW yang juga dilatarbelakangi oleh kondisi dan luas kota Bukittinggi selama ini, maka indeks kualitas tutupan lahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak mungkin lagi membuka lahan untuk tujuan perhijauan karena sudah ditentukan secara jelas. Namun masih ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan adanya fungsi ruang terbuka hijau yang cukup. Hal tersebut adalah dengan penggalakkan dan mengoptimalkan upaya penanaman pepohonan di lahan yang tersedia termasuk pohon pelindung diberbagai titik di Kota Bukittinggi dilakukan secara terus menerus dan masif. Selain itu, secara konkrit langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator luas tutupan lahan sebagai berikut:

- Penanaman 200 pohon di Tahun 2021
- Pembenahan beberapa taman kota untuk RTH

25.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = 100% -	(serapan anggaran x 100 %)
	capaian kinerja IKU
100% -	(85 / 59.90) x 100
	-41,9

25.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 25.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.150.402.330	2.746.598.227	87.18
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.150.402.330	2.746.598.227	87.18
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	97.990.000	97.065.600	99.07
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.052.412.330	2.649.522.627	86.80
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	542.235.500	388.242.373	71.60

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	542.235.500	388.242.373	71.60
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	152.447.000	135.928.593	89.16
Total	3.692.637.830	3.134.840.600	85

Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Udara

IKU 26 : Indeks Kualitas Udara

Sasaran 11 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Kualitas Udara** yang secara defenisi operasional dapat diartikan indeks kondisi udara yang diukur menggunakan parameter SO₂ dan NO₂ atau :

Indeks Kualitas Udara = Nilai yang diperoleh dari pemantauan kualitas udara
87,89

26.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 26.1 Capaian Indikator **Indeks Kualitas Udara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Udara	84,64	87,89	103,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Menghitung Indeks Kualitas Udara adalah dengan menghitung rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan udara dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref eu dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref eu. Sebagai acuan dalam menentukan kualitas udara, hasil nilai Indeks Kualitas Udara diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel : Klasifikasi Nilai Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks	Rentang Nilai
Sangat Baik	> 90
Baik	70 < - ≤ 90
Cukup	50 ≤ - ≤ 70
Kurang	30 ≤ - < 50
Sangat Kurang	< 30

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Semakin tinggi angka indeks akan menunjukkan kualitas yang semakin tinggi pula. Saat ini indeks standar kualitas udara yang digunakan secara resmi adalah indeks standar pencemaran udara (ISPU). Indeks kualitas udara tahun 2022 adalah 87,89, sebuah angka yang menunjukkan **kualitas baik**.

26.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indeks Kualitas Udara** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 26.2. Perbandingan antara **Indeks Kualitas Udara** 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kualitas Udara		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	88.37	83.54	94.53 %
2021	88,37	85,46	96,70 %
2022	84,64	87,89	103,83

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

26.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Berikut 4 kota dengan Indeks Kualitas Udara terendah di Sumbar pada 2021 dikutip dari BPS Sabtu 19 Maret 2022.

1. Padang

Tak dapat dipungkiri Padang adalah kota dengan kualitas udara terendah di Sumbar. Di sini pusat industri, banyak kendaraan, dan padat penduduk. Nilai IKU Padang adalah 74,83. Sedikit naik karena 2020 sebesar 74,51 dan 2019 sebesar 73,77.

2. Dharmasraya

Dharmasraya menjadi daerah ke 2 dengan IKU terendah. Nilainya 84,49, menurun ketimbang tahun sebelumnya yang 86,11.

3. Bukittinggi

Bukittinggi saat ini adalah kota wisata yang padat penduduk dan pengunjung. Daerahnya terkenal akan kesejukan udaranya. Tapi, polusi udara membuat IKU Bukittinggi 85,46 pada 2021. Kabar baiknya, kualitas udara Bukittinggi meningkat di 2021 ketimbang 2020 silam yang 83,54.

4. Sawahlunto

Kota Sawahlunto IKU-nya berada di angka 87,65. Jumlahnya sedikit mengalami kenaikan yang sebesar 87,54 pada 2020. Sementara, daerah dengan IKU tertinggi atau paling sedikit polusi adalah Mentawai 95,26. Kemudian Sijunjung 94,35 dan Padang Pariaman 93,54.

26.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Diantara penyebab keberhasilan pencapaian indikator sebagai berikut.

1. Petausahaan/ kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku,
2. Terjadinya beberapa kasuistik terhadap usaha dan kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.
3. Melakukan pemantauan dan penindakan terhadap usaha maupun kegiatan yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

26.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Melihat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup telah dilakukan langkah-langkah strategis seperti:

1. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/ kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
2. terhadap pelaku usaha dan kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap kualitas lingkungan di Kota Bukittinggi secara teratur dan berkala.

26.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = $100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)$

$$= 100\% - \frac{(84,34\% \times 100\%)}{103,83}$$
$$= 18,78\%$$

26.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 26.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	282.832.056	251.060.653	88.77
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	282.832.056	251.060.653	88.77
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	88.348.650	82.740.000	93.65

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	65.615.000	53.865.950	82.09
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	39.612.400	30.053.029	75.87
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.612.400	30.053.029	75.87
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	27.717.500	21.099.446	76.12
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.890.900	8/953.583	75.27
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.130.050	5.283.500	30.84
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17.130.050	5.283.500	30.84
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	17.130.050	5.283.500	30.84
TOTAL	339.574.508	286.397.182	84.34

Sasaran 12 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

IKU 27 : Presentase Penanganan Sampah

Sasaran 12 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Presentase Penanganan Sampah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase sampah yang melalui tahapan penanganan terhadap total sampah.

27.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 28.1 Capaian Indikator **Presentase Penanganan Sampah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Penanganan Sampah	73	89.09	122.04 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Tingginya tingkat aktivitas masyarakat di Kota Bukittinggi berimplikasi juga pada tingginya volume sampah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah kota. Hal ini juga

ditambah dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membuang sampah ataupun dalam pengelolaan pemanfaatan sampah hingga berdaya guna. Perilaku membuang sampah sembarangan tidak hanya bagi penduduk kota, tetapi juga para pengunjung, masyarakat yang tinggal diperbatasan serta dari aktifitas perdagangan.

Fenomena lain juga dapat dilihat dari kondisi di lapangan pada temuan awal yang menunjukkan bahwa masih banyak beberapa daerah di Kota Bukittinggi yang memiliki volume timbunan sampah yang belum terangkat semuanya, diantaranya Pasar Atas, Pasar Bawah, Pasar Simpang Aur dan Terminal Aur Kuning. Timbunan sampah untuk pasar di Kota Bukittinggi menurut data dari Dinas Kop UKM Perdagangan berkisar antara 6 m³ /hari. Puncak timbunan sampah pasar terjadi saat libur dan lebaran, yakni mencapai 8 m³ /hari. Pasar Kota Bukittinggi terdiri dari atas 3 pasar yakni Pasar Atas, Pasar Bawah dan Pasar Simpang Aur, dimana ketiga pasar ini dilengkapi masing-masing 1 (satu) kontainer.

27.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 27.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) tahun Terakhir

Tahun	Presentase Penanganan Sampah	
	Jumlah Penduduk	Sampah yang terangkut ke TPA
2015	122.621	28.573
2016	124.175	27.098
2017	126.479	29.305

Sumber : Jurnal SAWALA Vol 6 No 2, Oktober 2018. Hlm 148-161

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat bahwasannya seiring dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya maka terjadi peningkatan produksi sampah dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Pada tahun 2016 sampah yang terangkut ke TPA sebesar 27.098 ton dengan jumlah penduduk sebesar 124.175 jiwa. Peningkatan volume sampah terjadi seiring dengan penambahan jumlah penduduk setiap tahunnya.

27.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Sebagai kota pariwisata, Kota Bukittinggi tidak luput dari permasalahan persampahan, banyaknya pengunjung di kota ini terutama dihari libur, peningkatan jumlah penduduk kota menyebabkan produksi sampah juga ikut meningkat, sementara daerah dan tingkat pelayanan sampah kota ini belum merata yang menyebabkan pengelolaan sampah yang ada di Kota Bukittinggi ini tidak tertata dengan baik pada kondisi tertentu. Rendahnya praktek pemanfaatan sampah (3R) juga menjadi permasalahan dalam pengelolaan persampahan kota. Selain permasalahan tersebut, adanya sampah kiriman dari Kabupaten Agam yang berasal dari masyarakatnya yang bekerja di Kota Bukittinggi juga menyebabkan jumlah timbunan sampah Kota Bukittinggi meningkat. Untuk itu pada

perencanaan ini diharapkan dapat direncanakan kegiatan pengembangan yang sesuai dengan kondisi eksisting wilayah perencanaan.

27.5 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Dalam menjalankan Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, DLH Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan Perda Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala DLH Kota Bukittinggi Nomor 188.45-36/DLH/III-2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Persampahan dengan tugas pokok dan fungsi menindak warga atau masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 11, Setiap Orang atau badan dilarang membuang, menumpuk, membakar sampah/kotoran dijalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu. Oleh sebab itu Pasal 35 ayat (5) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 dikenakan biaya penegakan/pelaksanaan Perda sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau sanksi administratif penahanan sementara waktu KTP, kartu identitas lainnya dan/atau pengumuman di media massa.

Warga yang kedapatan membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal yang telah disediakan dan ditentukan yakni diluar pukul 06.00 WIB- 18.00 WIB pada saat tim penegakan kebijakan perda melaksanakan razia. Petugas menahan kartu identitas yang dimiliki oleh si pelanggar dan urusannya diselesaikan di Kantor Satpol PP Kota Bukittinggi. Penegakan kebijakan perda ini berlaku untuk semua masyarakat yang terutama berdomisili di Kota Bukittinggi serta masyarakat daerah tetangga yang membuang sampah ke Kota Bukittinggi.

Sasaran 12 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah

IKU 28 : Presentase Pengurangan Sampah

Sasaran 12 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Presentase Pengurangan Sampah** yang secara defenisi operasional dapat diartikan persentase sampah yang melalui

tahapan pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan/ atau pemanfaatan kembali sampah terhadap total sampah.

28.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 28.1 Capaian Indikator **Presentase Pengurangan Sampah**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Pengurangan Sampah	26	7.09	27,26 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi 2023

Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merekap volume sampah kota tahun 2022. Dimana, selama satu tahun terakhir jumlah sampah yang dibersihkan DLH dan dibuang ke TPA regional Payakumbuh sebanyak 38.238 ton. Jumlah timbulan sampah yang terangkut ke TPA Regional Payakumbuh selama tahun 2022 sebanyak 38.238 ton. Timbulan sampah tahun ini cenderung menurun selama 3 tahun terakhir. Tahun 2020, tercatat timbulan sampah di Kota Bukittinggi mencapai 40.424 ton. Tahun 2021 produksi sampah naik hingga 44.206 ton. Namun pada tahun 2022 kemarin, timbulan sampah hanya 38.238 ton.



sudah mulai banyak warga yang memilah sampah dan menjadikan sampah sebagai barang yang bisa diolah kembali untuk dijadikan barang bernilai ekonomis. Selama libur Natal dan Tahun Baru 2023, peningkatan volume sampah di Kota Bukittinggi meningkat 7 persen per hari. Dan Khusus malam tahun baru, kenaikan timbulan sampah mencapai 15,2%. Meningkatnya jumlah sampah ini karena banyak pengunjung yang datang berwisata ke Bukittinggi.

Dengan kesigapan petugas DLH, pasukan orange, semua sampah bisa dibersihkan dengan cepat. Petugas kebersihan tak kenal lelah dalam menjaga kebersihan kota kita ini.

28.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Data jumlah timbulan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah 405,431.45 ton. Dari 13 kabupaten/ kota di Sumatera Barat, yang menghasilkan sampah terbanyak setiap tahunnya adalah Kabupaten Agam 78,412.95 ton, Kabupaten Lima Puluh Kota 56,285.41 ton, Kabupaten Tanah Datar 46,806.83 ton, Kota Bukittinggi 46,225.43 ton dan Kabupaten Pasaman 44,253.04 ton.

28.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bukittinggi, pemerintah kota melakukan pensterilan tong sampah. Hal ini diwujudkan dengan cara menyuruh masyarakat memasukkan sampah ke dalam plastik, kemudian diletakkan di depan rumah. Setelah itu akan ada petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yang mengangkut sampah tersebut. Terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi terdapat Peraturan Daerah No 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yang disahkan oleh Walikota Bukittinggi.

Untuk mengatasi permasalahan sampah Kota Bukittinggi sejak tahun 2013 sudah melakukan pembuangan sampah ke TPA Regional yang berada di Kota Payakumbuh dimana pengelolaannya memakai sistem Sanitary Landfill. Sebelum sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA), maka dilakukan pemilahan terhadap sampah. Di Kota Bukittinggi belum semua kelurahan menerapkan sistem pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah baru dilakukan di 6 kelurahan (25%) dari total 24 kelurahan yang ada di Kota Bukittinggi, yaitu Kelurahan Birugo, Bukik Apik Puhun, Manggis Gantiang, Parik Antang, Puhun 9 Pintu Kabun, dan Campago Guguak Bulek. Sampah yang belum dilakukan pemilahan di bawa ke tempat penampungan sementara (TPS), sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Proses pengelolaan sampah di Kota Bukittinggi masih menggunakan sistem kumpul angkut buang.

28.4 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Bagi Masyarakat :

1. Melakukan pemilahan antara sampah kering dan basah sebelum dibuang.
2. Memanfaatkan alat pencacah sampah kering yang sudah ada di kelurahan.
3. Memanfaatkan kembali sampah yang bisa didaur ulang.

Bagi Dinas Lingkungan Hidup :

1. Memperbarui kebijakan strategi daerah setiap tahunnya.

2. Jumlah pengawas dan petugas pengumpul sampah ditambah, agar proses pengumpulan sampah dapat rutin dilakukan.
3. Pengawas dari DLH lebih tegas dalam melakukan pengawasan, mengingatkan ketika ada petugas yang lalai dalam menjalankan tugas.
4. Memperbesar tempat pengolahan sampah menjadi kompos, menambah mesin penggiling sampah di setiap kelurahan.
5. Mempermudah dan meningkatkan informasi terkait prosedur penyaluran pupuk kompos gratis yang sudah selesai diolah.

Bagi Kelurahan :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak DLH, RT, RW dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ikut serta dan berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebelum dibuang ke TPS.

Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif

IKU 29 : Indeks Pembangunan Pariwisata

Sasaran 13 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indeks Pembangunan Pariwisata** yang secara defenisi operasional Indeks capaian pembangunan pariwisata menggunakan pendekatan faktor kebencanaan, posisi target pasar, karakteristik dan kualitas produk, serta indeks experience dan hospitality:

29.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 29.1. Capaian Indikator **Indeks Pembangunan Pariwisata**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Pariwisata	4,34	6,12	141%

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

29.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 29.2 Perbandingan capaian kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

Tahun	Indeks Pembangunan Pariwisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			

2021	4.3	0.92	21%
2022	4.34	6.12	141%

Sumber Data: Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi Tahun 2023

IPP pada Tahun 2022 cenderung meningkat karena faktor jumlah kunjungan wisman yang meningkat drastis dari Tahun sebelumnya.

29.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional



INDIKATOR PENILAIAN

- Lingkungan pendukung
- Kebijakan perjalanan dan pariwisata.
- Infrastruktur
- Penggerak permintaan perjalanan dan pariwisata..
- Keberlanjutan perjalanan dan pariwisata

TINDAK LANJUT

- Menguatkan komitmen para pimpinan daerah untuk membangun kepariwisataan di daerahnya masing-masing.
- Mengajak pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kebijakan untuk menciptakan inovasi keparowisataan.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Kemenparekraf demi perbaikan IPKN.

29.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Rendahnya realisasi pada tahun 2021 terjadi karena pandemi covid dan kebijakan PSBB yang diberlakukan. Meningkatnya angka indikator ini terjadi selama masa adaptasi new normal dan penyisiran kembali entitas-entitas pariwisata sesuai dengan RIPPAR.

29.5 Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Membuat kerangka kerja, dimana Kerangka kerja tersebut tidak hanya menitikberatkan pada bagaimana cara peningkatan pembangunan pariwisata berdasarkan capaian atas data yang dimiliki, namun lebih jauh lagi melihat apakah

pemerintah daerah memiliki perencanaan strategis yang mampu mendorong kemajuan (progress) pembangunan kepariwisataan dengan komitmen pemerintah daerah.

29.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$*Efisiensi = \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$

$$100\% - (91\% \times 100\%) / 141\%$$

35,47 %

29.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 29.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Tahun 2021	Realisasi 2021	Persentas
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14,103,868,461	2,812,178,865.00	91%

Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi Sebagai Destinasi Wisata Inovatif

IKU 30 : Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi (%)

Sasaran 13 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi (%)** yang secara defenisi operasional adalah Persentase jumlah usaha ekonomi kreatif yang terstandardisasi terhadap jumlah seluruh usaha ekonomi kreatif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi	1	12,8	120%

Data diambil dari data ekraf (sesuai dengan penyisiran data dari OSS) dengan formulasi perhitungan:

Jumlah tenaga kerja pariwisata x 100 % tersertifikasi	258	12.08%
Jumlah tenaga kerja pariwisata	2136	

30.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 30.1 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Usaha Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	1	48.47%	48.47%
2022	1	12.08%	12.08%

Terjadi penurunan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi pada tahun 2021 ke tahun 2022, karena pada tahun 2022 kita sudah menggunakan OSS dan data yang masuk di tahun 2021 tidak semua yang termasuk kedalam sektor pariwisata

30.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Secara umum setiap tahun untuk indikator jumlah usaha yang tersertifikasi sudah melewati target yang ditetapkan, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hal ini merupakan penurunan positif karena perbaikan data pelaku ekonomi pariwisata yang dilakukan untuk menciptakan data yang akurat dan akuntabel.

30.3. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk menefisiensikan indikator ini kita terus mengupayakan semua pelaku usaha pariwisata yang belum tersertifikasi untuk mengurus sertifikasi usaha pariwisata mereka. Pada Tahun 2023 ini kita sudah menganggarkan kegiatan untuk sertifikasi bagi pegawai hotel dan akan melakukan pelatihan digitalisasi kepada pegawai hotel untuk menyiapkan data kepariwisataan Tahun 2023.

30.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$
$$= \frac{100\% - (81,94\% \times 100\%)}{\%}$$
$$\%$$

30.5. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 30.5 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan	598,765,050	490,632,680	81.94%

**Sasaran 13 : Terwujudnya Kota Bukittinggi
Sebagai Destinasi Wisata Inovatif
IKU 31 : Jumlah Kunjungan Wisata**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Jumlah Kunjungan Wisata** yang secara defenisi operasional adalah jumlah wisatawan yang mengunjungi objek wisata pada satu tahun tertentu

31.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 31.1 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Kunjungan Wisata	559,316	1,262,590	226 %

Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan wisatawan ke objek wisata berbayar pada Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) dan Taman Panorama Lobang Jepang (TPLJ)

31.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 31.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020			
2021	532,682	750,021	141%
2022	559,316	1,262,590	226%

Kunjungan yang dimaksud adalah kunjungan wisatawan ke objek wisata berbayar (TMSBK dan TPLJ).

31.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (orang)		
	2019	2020	2021
Kab. Kepulauan Mentawai	994 655	122 793	318
Kab. Pesisir Selatan	971 989	177 017	354 297
Kab. Solok	601 244	703 649	703 300
Kab. Sijunjung	12 434	149 889	60 533
Kab. Tanah Datar	627 057	527 635	340 363
Kab. Padang Pariaman	307 316	261 615	100 144
Kab. Agam	756 750	664 318	509 428
Kab. Lima Puluh Kota	639 840	654 334	624 155
Kab. Pasaman	101 141	747	11 812
Kab. Solok Selatan	68 084	41 809	61 199
Kab. Dharmasraya	9 745	11 676	54 908
Kab. Pasaman Barat	28 603	2 486	23 503
Kota Padang	843 296	2 621 929	376 534
Kota Solok	120 411	134 450	181 154
Kota Sawahlunto	237 490	101 649	91 027
Kota Padang Panjang	166 364	107 642	215 073
Kota Bukittinggi	933 609	1 471 542	748 074
Kota Payakumbuh	298 479	46 930	77 747
Kota Pariaman	450 640	239 758	252 317
Provinsi Sumatera Barat	8 169 147	8 041 868	4 785 886

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat

31.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Angka realisasi jumlah kunjungan wisatawan tiap tahunnya melebihi target, hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya promosi yang selalu dilakukan dan pola wisatawan.

31.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Pengembangan atraksi wisata dilakukan meliputi daya tarik wisata alam, budaya, serta buatan. Sementara itu, untuk mempermudah pergerakan wisatawan menuju destinasi pariwisata dilakukan peningkatan aksesibilitas berupa prasarana transportasi, sarana transportasi, dan sistem transportasi. Pada pengembangan amenities destinasi pariwisata, fokus ditujukan pada pembangunan prasarana umum, penyediaan fasilitas umum, dan pembangunan fasilitas pariwisata. Bukan hanya fasilitas dan aksesibilitas, pengembangan masyarakat juga dianggap penting dalam strategi pengembangan destinasi pariwisata. Pengembangan masyarakat tersebut meliputi, peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, dan peningkatan kesadaran dan peran masyarakat.

31.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengembangan destinasi pariwisata haruslah bertujuan customer-centric strategy yang mencakup tiga hal. Pertama, customer satisfaction di mana wisatawan puas dengan destinasi wisata yang kita tawarkan. Kedua, customer retention/loyalty di mana wisatawan berkunjung kembali dan loyal dengan destinasi wisata kita. Ketiga, customer advocacy di mana wisatawan merekomendasikan destinasi wisata kita kepada wisatawan lain.

$$\begin{aligned} \text{*Efisiensi} &= \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}} \\ &= \frac{100\% - (91\% \times 100\%)}{226\%} \\ &= \mathbf{59,74\%} \end{aligned}$$

31.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 31.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	14,103,868,461	12,812,178,865.00	91%

Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi Budaya Daerah

**IKU 32 : Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan
Kebudayaan**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan** yang secara defenisi operasional adalah Upaya yang

dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

32.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 32.1 Perbandingan Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	30	52,31	174,36 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya sebagai salah satu indikator dalam penilaian indeks pembangunan kebudayaan

Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di Bidang Olahraga
IKU 33 : Prestasi Pada Event Olah Raga Propinsi

33.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

33.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

33.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

33.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

33.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

33.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

33.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

**Sasaran 16 : Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
IKU 34 : Nilai SAKIP**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP** yang secara defenisi operasional adalah Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

Nilai SAKIP = Peringkat yang diperoleh dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

34.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 4.1. Capaian Indikator Nilai SAKIP

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai SAKIP	75,57	71,66	94,82%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomr 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kota Bukittinggi. Evaluasi terhadap SAKIP Kota Bukittinggi yang telah dilakukan oleh Menpan RB bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai 71,66 atau prediket BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Bukittinggi masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut

34.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai SAKIP		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	B	B	100 %

2018	BB	BB	100 %
2019	-	-	-
2020	-	71,13	-
2021	-	71,66	-
2022	75,57	-	-

34.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/Kota	Prediket
Provinsi Sumatera Barat	B
Kota Bukittinggi	BB
Kota Padang	BB
Kota Payakumbuh	BB
Kota Pariaman	B
Padang Panjang	B
Kabupaten Agam	B
Kabupaten 50 Kota	B

34.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Uraian singkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bukittinggi belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut:
 - a. Penjabaran kinerja yang disusun masih belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat, serta belum menggambarkan pemecahan masalah secara utuh sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Hal ini mengakibatkan hubungan lintas fungsi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja belum terbangun secara baik dan alternatif solusi belum terlihat;
 - b. Implementasi SAKIP terlihat masih pada tahap administrasi karena belum didukung dengan kepemilikan kinerja oleh OPD. Selain itu, keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan dalam upaya pencapaian kinerja masih perlu ditingkatkan;
 - c. Refocusing program telah dilakukan dan menghasilkan efisiensi, namun

- demikian perlu dimaksimalkan dengan memprioritaskan penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memiliki kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- d. Terdapat aplikasi yang merupakan upaya penerapan teknologi dalam pengukuran kinerja individu. Hal ini dilakukan untuk membantu memberikan reward and punishment dalam rangka memotivasi peningkatan kinerja pegawai. Namun demikian, sebagian kinerja individu yang diukur masih berorientasi pada rutinitas dan belum berorientasi pada hasil konkret dalam meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini menyebabkan reward and punishment yang diterapkan belum mampu memaksimal kinerja pegawai;
 - e. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap OPD, belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan dan menyeluruh; dan
 - f. Upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum signifikan mendukung pencapaian kinerja, karena perbaikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ada belum menjadi pengungkit utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain seperti dalam proses penyusunan proses bisnis dan penyederhanaan struktur organisasi;

34.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Bukittinggi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan terciptanya keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan yang diambil kegiatan sehingga memastikan seluruh anggaran digunakan secara efektif dalam pencapaian kinerja, serta melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
2. Melakukan proses internalisasi pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada lini pimpinan. Hal ini dilakukan untuk mendorong penerapan dialog kinerja sehingga terjadi proses diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward and punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
3. Memaksimalkan upaya refocusing program/kegiatan dengan menghapus program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggap tidak berkontribusi signifikan

- terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam penerapan reward and punishment melalui perbaikan aplikasi pengukuran kinerja serta kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada kontribusi kinerja yang diberikan setiap individu pegawai bagi organisasinya. Hal ini dilakukan kaitannya dengan upaya memaksimalkan kontribusi setiap pegawai dalam pencapaian kinerja organisasi;
 5. Mendorong peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, memberikan professional judgement secara akurat, serta memberikan rekomendasi yang berkontribusi pada perbaikan akuntabilitas kinerja OPD. Hal ini juga perlu ditambah dengan memastikan seluruh hasil rekomendasi evaluasi untuk dapat ditindaklanjuti; dan
 6. Memastikan perbaikan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi sampai unit kerja sehingga hasil reformasi birokrasi lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

34.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = \frac{100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\text{capaian kinerja IKU}}$$
$$\frac{100\% - (83,3\% \times 100\%)}{94,82\%}$$

12.15 %

34.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 1.5. Program/kegiatan Penataan Organisasi

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	%
Kegiatan Penataan Organisasi	377.399.330	314.368.861	83,3

**Sasaran 16 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan****IKU 35 : Nilai EKPPD**

Sasaran 16 juga diturunkan pada indikator **Nilai EKPPD** (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau yang sekarang disebut dengan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang secara defenisi operasional adalah nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau dapat dilihat melalui rumus berikut :

$$\text{Nilai EKPPD} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh atas penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah}}{3,2293} \text{ dengan status kinerja } \mathbf{Sangat\ Tinggi}$$

35.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 5.1 Capaian Indikator Nilai EKPPD

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai EKPPD	32,308	32,293	99,95

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Hingga laporan ini dibuat, Nilai EKPPD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri masih didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018. Hal ini dibuktikan melalui piagam penghargaan yang diberikan kepada Kota Bukittinggi tertanggal 25 April 2020 dengan skor 3,2293 dan status kinerja **Sangat Tinggi**.

Dalam evaluasi EKPPD tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variable yakni : 1. Indeks Capaian Kinerja 95% yang terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dan 2. Indeks Kesesuaian Materi 5%. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek dan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sedangkan pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang terdiri dari aspek Administrasi dan Urusan Pemerintahan yang meliputi 8 aspek dengan 21 IKK yang mencakup urusan wajib, pilihan, fungsi penunjang umum pemerintahan dan urusan pemerintahan dengan jumlah IKK sebanyak 630 mendapatkan skor dengan kategori prestasi Tinggi.

Penilaian indeks capaian kinerja terhadap tataran pengambil kebijakan, yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada “tataran pelaksana kebijakan daerah”, yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah. Tataran pengambil kebijakan terdiri dari 13 aspek dengan 43 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada “tataran pengambil kebijakan” mendapat skor 3,2293 atau dengan kategori prestasi **Sangat Tinggi**.

Sementara untuk indeks Kesesuaian Materi, dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci mendapatkan nilai dengan peringkat sangat tinggi.

Dari hasil LHE atas EKKPD dan LPPD Kota Bukittinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terhadap 3 IKK pada Tataran Pengambil Kebijakan yang memperoleh nilai Rendah agar ditingkatkan capaian kerjanya,
2. Terhadap 132 IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan pada kelompok Administrasi Umum dengan prestasi Rendah untuk dilakukan peningkatan capaian penilaian kerjanya.

Terhadap 1 Urusan Wajib (Kepemudaan dan Olahraga) dan 1 urusan Pilihan (Perindustrian) dengan prestasi Rendah untuk juga ditingkatkan capaian kerjanya

35.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian indikator Nilai **EKPPD** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai **EKPPD** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Nilai EKPPD		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2017	3.360	3.1668	94.25 %
2018	3.361	3.2293	96.08 %
2019	3.362	-	Belum diterima
2020	3.365	-	Belum diterima
2021	3.367	-	Belum diterima

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2018 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2017. Dan hingga saat ini Pemerintah Kota

Bukittinggi masih menunggu hasil penilaian EKPPD Tahun 2019 dan 2020 dari Kementerian Dalam Negeri.

35.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Keberhasilan indikator ini adalah adanya upaya yang serius dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dari indikator penilaian dapat terpenuhi secara maksimal.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah adalah dengan membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Mandiri Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota Bukittinggi dengan tugas utamanya melakukan *self assessment* terhadap kinerja pemerintah daerah sebelum dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi dan Nasional. Dengan adanya tim ini diharapkan lebih awal dapat mengukur capaian kinerja dan dapat mengukur strategi untuk meningkatkan kinerja secara nasional. Upaya yang dilakukan yakni :

1. Membentuk Tim Penilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021;
2. Melakukan *interview* langsung dengan SKPD terkait dengan data IKK yang disampaikan serta membandingkan dengan data tahun sebelumnya;
3. Melakukan konsultasi yang intensif dengan Tim Daerah yang terdiri dari Inspektorat, BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dan Biro Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat;
4. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan agar SKPD meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, dalam upaya lain yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan proses verifikasi Inspektorat Kota Bukittinggi agar perangkat daerah dapat memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mengadakan/ menyediakan data yang diminta, namun kondisi pada Tahun 2020 dimana perangkat daerah rata-rata hanya menyampaikan form isian IKK namun tidak melampirkan data pendukung dalam bentuk *hardcopy* sehingga Inspektorat belum mampu memaksimalkan dalam melakukan verifikasi data pendukung IKK

35.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Tidak ada kendala berarti, namun hanya ditemui saat penyusunan laporan LPPD. Tim Pengolah Data yang dibentuk dengan beranggotakan Kasubag Perencanaan SKPD yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dari masing-masing SKPD dan untuk

selanjutnya diserahkan ke Tim Penyusun yang akan menyusun LPPD masih kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.

Anggota tim dikeluhkan dengan data-data dan informasi dari SKPDnya masing-masing yang masih belum rampung, sehingga belum memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap indikator yang dibutuhkan.

Selain itu, hasil mutakhir penilaian LPPD dari Kementerian Dalam Negeri yakni baru sampai tahun 2018 tidak mampu menjawab target dan capaian laporan SAKIP untuk tahun 2021.

Namun demikian rata-rata persoalan yang terjadi adalah dari proses menyajikan data yang tidak maksimal dari SKPD untuk tiap-tiap indikator kinerja kunci sesuai dengan ketentuan, serta penyampaian data pendukung IKK tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga proses *review* Inspektorat yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Februari tidak berjalan maksimal.

Setelah LPPD selesai disusun, selanjutnya akan diserahkan ke SKPD untuk di *review* jika terdapat ketidaksesuaian akan diperbaiki dan setelah itu akan dilakukan *review* oleh Inspektorat.

Bagian Pemerintahan Setda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab dalam penyelesaian penyusunan LPPD juga intens dalam melakukan komunikasi dengan berbagai SKPD terkait sehingga LPPD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi terus menginformasikan kepada SKPD dengan capaian IKK yang rendah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan data dan capaian kinerja secara mandiri sebelum dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun berkenaan dan sebagai bahan evaluasi pada tahun selanjutnya

35.5. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 5.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pengelolaan administrasi pemerintahan	147.700.000	85.869.970	58.14 %
Pengelolaan administrasi	161.007.000	152.783.935	94.89 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi 2023

Sasaran 17 : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih**IKU 36 : Indeks Integritas Pemerintah Daerah**

Sasaran diatas diturunkan pada indikator **Indeks Integritas Pemerintah Daerah** yang secara defenisi operasional adalah Nilai kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi

36.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	76	77,49	102 %

36.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019			
2020			
2021	75	78.3	104
2022	76	77.49	102

36.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kab/Kota	2021	2022
Kota Bukittinggi	78.3	77.49
Nasional	72.4	71.94

36.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Efisiensi = $100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\% - \text{capaian kinerja IKU})$

Efisiensi = $100\% - (71\% \times 100\%)$
 100%

= 29%

36.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian**Indikator**

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi			
SubKegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	94,359,600	67,309,350	71%

Sasaran 18 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**IKU 37 : Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik**

Sasaran 18 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik** yang secara defenisi operasional adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat mesyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

37.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	85,25	90,80	106,51 %

Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur pemerintahan pada khususnya yang merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat juga acuan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, dengan itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dari masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara teliti, santun, responsif, akurat dan akuntabel agar menjadi penyelenggara layanan yang berkualitas.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 82,54 sampai dengan 97,50 dengan nilai rata-rata adalah **90,80** masuk kedalam kategori **A** bernilai **Sangat Baik**.

37.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 5.2 Perbandingan antara Nilai **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	-	82,7	-
2021	84,06	84,29	100,27
2022	85,25	90,80	106,51

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2022 di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi.

37.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil analisis data dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas sebagaimana dalam bahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Secara umum pelayanan yang telah diberikan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 82,54 sampai dengan 97,50 dengan nilai rata-rata adalah **90,80** masuk kedalam kategori **A** bernilai **Sangat Baik**.
2. Nilai tertinggi diperoleh oleh Dinas Perpustakaan dan nilai **97,50** sedangkan nilai terendah diperoleh Oleh Puskesmas Nilam Sari dengan nilai **83,86**.

37.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Dari hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas terhadap unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menggunakan 9 indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan pelayanan yang kurang baik secara konsisten.
2. Melakukan evaluasi dan peningkatan kompetensi pelaksana (sumber daya manusia) yang bertugas di unit pelayanan.
3. Menyediakan dan mengefektifkan loket informasi, penanganan pengaduan, masukan dan saran.
4. Memaksimalkan produk spesifikasi pelayanan (kebersihan, keamanan, kenyamanan) pada unit pelayanan.
5. Meningkatkan dan mengganti sarana dan prasarana pada unit pelayanan yang dirasa masih kurang dan telah berumur.
6. Perlu dikaji kembali besaran tarif retribusi pada unit pelayanan yang memungut retribusi agar tidak membebani masyarakat.
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

37.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - \frac{(\text{serapan anggaran} \times 100\%)}{\% \text{ capaian Kinerja}} \\ &= 100\% - \frac{(92\% \times 100\%)}{106,51} \\ &= 15,63\% \end{aligned}$$

37.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 37.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	192.327.830	177.762.852	92 %

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Bukittinggi 2023

Sasaran 19 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

IKU 38 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)

Sasaran 19 diatas diturunkan pada indikator **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan** yang secara defenisi operasional adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan

38.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 38.1 Capaian Realisasi Indikator Kinerja **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan	21,91	18.73	85,48%

Realisasi Pendapatan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2022 adalah sebesar Rp698.396.718.823,22, realisasi sebesar Rp130.796.925.183,85 atau sebesar 18,73%. Target yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebesar 21,91 %, sehingga tingkat capaian menjadi 85,49 %.

38.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 38.2 Perbandingan antara Nilai **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan** dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2020	18,83	12,20	64,79
2021	18,89	13,33	70,56
2022	21,91	18,73	85,48

Sumber : Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2023

Sesuai dengan table perbandingan capaian kinerja diatas bahwa realisasi kinerja tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 112,89% dan terendah pada tahun 2021 yaitusebesar 70,49%, sedangkan untuk tahun 2022 hanya dapat mencapai 85,49%. Kalau dilihat dari persentas ememang capaian kinerja tahun 2022 tergolong rendah. Namun jika dibandingkan secara nominal realisasi tahun 2022 merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang paling tinggi yaitu sebesar Rp 130,797 Miliar, tahun 2019 sebesar Rp111,896 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp 84,087 Miliar, tahun 2021 sebesar Rp 99,397 Miliar.

38.3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Target Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/PAD terhadap Pendapatan adalah sebesar 21,91 dengan realisasi adalah 18,73 dengan capaian sekitar 85,49%. Tidak tercapainya realisasi dari target yang telah ditetapkan dapat kita lihat dari table diatas:

1. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan capaiannya sebesar 88,49%, hal ini disebabkan pendapatan pada bagian hasil laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, Bank Nagari dan BPRS Jam Gadang yang belum maksimal.
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, capaiannya sebesar 94,53%, hal ini disebabkan adanya jenis Pendapatan yang masih rendah dari yang di targetkan yaitu Pendapatan jasa giro dan jasa bunga atas penempatan uang daerah masih dibawah 80%.
3. Retribusi Daerah, capaiannya sebesar 95,85%, ada beberapa jenis Pendapatan pada Retribusi Daerah yang masih rendah capaiannya diantaranya Retribusi tempat khusus parkir sebesar 77,14%, Retribusi izin taryek sebesar 85,51%, Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar 87,05 serta pelayanan pemakaman & pengabuan mayat sebesar 45,50%.
4. Pajak Daerah, capaiannya sebesar 98,61%, realisasi ini merupakan realisasi tertinggi diantara capaian PAD, namun masih ada jenis Pendapatan yang masih rendah dari yang lainnya yaitu Pajak Restoran yang hanya mencapai sebesar 80,96%. Hal ini di sebabkan masih rendahnya kesadaran perpajakan dari Wajib Pajak restoran walaupun

telah dilakukan sosialisasi dan pemanggilan oleh Tim Penagih Kota Bukittinggi yang beranggotakan Instansi Vertikal.

38.4. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. Meningkatkan kinerja Pemungutan Pajak Daerah dengan cara memaksimalkan pendataan objek pajak baru, melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dinilai beresiko
2. Meningkatkan pelayanan jasa terhadap objek-objek yang dikenai retribusi daerah seperti pelayanan pasar, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, pelayanan pasar grosir dan pertokoan, dan pelayanan parker tepi jalan umum.
3. Melaksanakan upaya Penagihan terhadap piutang pajak dan retribusi daerah melalui tim penagih yang terdiri dari Kejaksaan, Polri, TNI. Serta mengoptimalkan kerjasama dengan KPP/DJP dan DJPK melalui pertukaran data.
4. Meningkatkan kinerja penerimaan daerah dari Pajak dan Retribusi Daerah dengan pelaksanaan digitalisasi penerimaan daerah melalui penerimaan non tunai.
5. Mengoptimalkan asset daerah yang dimiliki Pemerintah Kota Bukittinggi melalui mekanisme Pemanfaatan berupa Sewa, BGS/BSG, Pemindahtanganan berupa penjualan barang milik daerah, dll
6. Meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah melalui peningkatan pembagian laba usaha hasil penyertaan modal dengan berupaya amenggenjot kinerja BUMD Bank Nagari, BPR serta PDAM Tirta Jam Gadang.
7. Peningkatan ekonomi daerah terutama pada sector-sektor yang menyumbang PAD seperti akomodasi, perdagangan jasa, serta pariwisata.

38.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(87,76\% \times 100\%)}{85,48} \\ &= - 2,66\% \end{aligned}$$

38.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 37.6 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1,820,373,000.00	1,573,886,913.00	86.46

Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1,820,373,000.00	1,573,886,913.00	86.46
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	122,070,000.00	77,941,701.00	63.85
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	176,014,376.00	170,923,000.00	97.11
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	104,317,608.00	91,674,296.00	87.88
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	234,816,000.00	202,614,759.00	86.29
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	210,705,000.00	201,766,400.00	95.76
Penetapan Wajib Pajak Daerah	151,843,408.00	148,435,896.00	97.76
Penagihan Pajak Daerah	668,368,408.00	534,296,711.00	79.94
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	152,238,200.00	146,234,150.00	96.06
		Rata rata	87,76

Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender

IKU 39 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sasaran 20 diturunkan pada Indikator Kinerja Utama **Indek Pemberdayaan Gender** yang secara defenisi operasional dapat diartikan Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemberdayaan gender berperan aktif dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan dan ekonomi.

39.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 39.1 Capaian Indikator **Indek Pemberdayaan Gender**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indek Pemberdayaan Gender	61,5	60.19	98% (angka 2021)

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2023

Pemberdayaan Perempuan diukur melalui indeks komposit Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini merupakan nama lain dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang dikembangkan United Nations Development Programs (UNDP). IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender sudah terbangun melalui partisipasi perempuan di bidang politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi.

39.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Berikut realisasi capaian **Indek Pemberdayaan Gender** Kota Bukittinggi dibandingkan dengan capaian tiga tahun terakhir:

Tabel 39.2 Perbandingan **Indeks Pemberdayaan Gender 3 (Tiga) Tahun Terakhir**

Tahun	Indek Pemberdayaan Gender		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2019	73.84	60.99	83%
2020	60.33	60.33	100%
2021	61.25	60.19	98%
2022	61.5	60.99	-

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2021 turun dari tahun sebelumnya. Realisasi capaian indikator Tahun 2021 dari data yang didapat dari Dinas DP3AP2KB Kota Bukittinggi yakni 60,99.

39.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Agam	63,32	63,06	63,07
Kab. Dharmasraya	51,42	50,87	50,66
Kab. Kepulauan Mentawai	48,36	48,13	47,36
Kab. Lima Puluh Kota	50,18	51,09	50,59
Kab. Padang Pariaman	49,10	48,79	46,64
Kab. Pasaman	64,22	61,57	62,74
Kab. Pasaman Barat	60,88	60,16	60,38

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2019	2020	2021
Kab. Pesisir Selatan	55,79	56,93	53,39
Kab. Sijunjung	59,96	59,93	60,46
Kab. Solok	63,89	62,23	61,57
Kab. Solok Selatan	50,23	49,19	47,86
Kab. Tanah Datar	58,35	58,46	59,70
Kota Bukittinggi	60,99	60,33	60,19
Kota Padang	67,49	67,53	65,33
Kota Padang Panjang	66,57	65,24	66,62
Kota Pariaman	54,47	54,41	53,42
Kota Payakumbuh	67,81	71,01	71,58
Kota Sawahlunto	66,18	65,87	65,48
Kota Solok	58,47	57,46	63,09
Provinsi Sumatera Barat	59,09	58,28	65,12

Data perbandingan yang disajikan merupakan data perbandingan Tahun 2019 sampai Tahun 2021, sementara untuk Tahun 2022 data belum rilis.

39.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Memaksimalkan pelaksanaan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender:

1. Masih terbatasnya dana untuk kegiatanKebijakan
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang profesional bidang Pengarusutamaan GenderSumber daya
3. Masih belum pulihnya perekonomian masyarakat akibat Covid 19Alat analisis
4. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender di hampir semua aspek kehidupan masyarakat di Kota Bukittinggi
5. Masih kurangnya partisipasi perempuan dilembaga legislative

39.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Alternatif solusi yang telah dilakukan jika pencapaian indikator diperkirakan tidak mencapai target :

- a. Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RANPERDA PP PA)
- b. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- c. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di Kota Bukittinggi
- d. Mengoptimalkan peran Pokja PUG dan Focal Point dalam merealisasikan Anggaran Berbasis Gender melalui PPRG

39.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(98\% \times 100\%)}{99,17} \\ &= 1,18\% \end{aligned}$$

39.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 39.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Prog/ Sub Kegiatan	Anggaran TH 2022	Realisasi Tahun 2022	%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	91,445,000	90,507,671	98%
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	285,354,600	283,933,094	99.50%
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	52,703,000	51,765,400	98.22%
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota	17,340,000	17,340,000	100%
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota	697,849,554	677,798,773	97.13
Pengembangan kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	678,049,420	663,252,271	97.81%

Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota**IKU 40 : Indeks Kenyamanan Kota****40.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022**Tabel 40.1 Capaian Indikator **Indeks Kenyamanan Kota**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kenyamanan Kota	3,15	3,48	110,35%

Sumber : Bapeitbang Kota Bukittinggi 2023

Indeks kenyamanan kota Bukittinggi berada pada angka 3,35 dari target 3,15 (indeks maksimal 4), ini menggambarkan bahwa keamanan pribadi, lingkungan, dan keamanan dari bencana di Kota Bukittinggi dapat diwujudkan dengan baik dan ini sangat diperlukan untuk mendukung iklim pariwisata dan investasi yang baik di Kota Bukittinggi.

40.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

pencegahan terhadap terjadinya konflik sosial dan politik, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat dan pengurangan resiko bencana pada yang dilaksanakan pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kantor Kesbangpol, Satpol PP, BBPD, dan Dinas Kebakaran telah berhasil selama tahun 2022, keberhasilan ini terlihat dari capaian indikator tingkat kenyamanan kota yang berada diatas target yang ditetapkan pada RPJMD untuk tahun 2022.

Sasaran 22 : Meningkatnya Kehidupan Sosial**IKU 41 : Presentase Penurunan PPKS (%)**

Sasaran 22 diatas diturunkan pada indikator **Presentase Penurunan PPKS** yang secara defenisi operasional adalah Persentase jumlah PPKS tahun tertentu terhadap PPKS tahun sebelumnya.

41.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022Tabel 41.1 Capaian Indikator **Presentase Penurunan PPKS**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Penurunan PPKS	2	-4,495	-224,75

Sumber : DP3AP2KB Kota Bukittinggi 2023

Perhitungan Penurunan PPKS
 Tahun 2022 = 12,898
 Tahun 2021 = 12,595

Target Penurunan PPKS Tahun 2022 sebesar 2 %

Realisasi Penurunan PPKS = 2% x Realisasi 2021
 = 2% x 12,595
 = 251,9

Target 2022 = 12,595 - 251.9
 12,343

Persentase Penurunan PPKS = $\frac{\text{Target 2022} - \text{Realisasi 2022}}{\text{Target 2022}} \times 100\%$
 = $\frac{12,343 - 12,898}{12,343} \times 100\%$
 = $\frac{-5549}{12,343} \times 100\%$
 = **-4,495**

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

41.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 41.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

NO	JENIS PMKS	SATU AN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Anak Balita Terlantar	Anak	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	Anak	28	14	42	28	14	42	28	14	42
3	Anak Yang berhadapan Dengan Hukum	Anak	5	8	13	3	5	8	9	16	25
4	Anak Jalanan	Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas	Anak	34	16	50	34	16	50	34	16	50
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Anak	4	-	4	5	2	7	5	2	7
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	-	2	2	-	2	2	-	2	2
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	204	246	450	204	252	456	204	252	456

NO	JENIS PMKS	SATU AN	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Penyandang Disabilitas	Orang	119	72	191	358	205	563	358	205	563
10	Tuna Susila	Orang	-	1	1	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	Orang	-	-	-	37	24	61	37	24	61
12	Pengemis	Orang	1	-	1	4	2	6	4	2	6
13	Pemulung	Orang	14	5	19	14	5	19	14	5	19
14	Kelompok Minoritas	Orang	-	-	-	25	-	25	25	-	25
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	7	-	7	75	3	78	75	3	78
16	Orang Dengan HIV/AIDS	Orang	-	-	-	-	-	275	-	-	275
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	6	-	6	30	-	30	30	-	30
18	Korban Traficking	Orang	-	-	3	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	-	-	15	-	-	21	-	-	21
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	Orang	-	-	184	-	-	197	-	-	483
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-	-	27	-	-	20	-	-	20
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	-	632	632	-	632	632	-	632	632
24	Fakir Miskin	KK	-	-	4,977	-	-	10,083	-	-	10,083
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	KK	-	-	14	-	-	20	-	-	20
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			28	638	6,639	817	1,162	12,595	823	1,173	12,898

41.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bukittinggi Barat saat ini cenderung mengalami peningkatan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan berbagai kondisi terutama perekonomian. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Kota Bukittinggi. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Kota Bukittinggi.

41.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Untuk berhasilnya sasaran dinas sosial dalam mewujudkan peningkatan kehidupan sosial masyarakat yang termasuk dalam PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang merupakan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena

suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos no 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial) untuk menunjang pencapaian sasaran dinas sosial di tunjang oleh program pemberdayaan sosial, Program Rehabilitas Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

41.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah disediakan sarana sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) dengan memberi layanan kepada masyarakat seperti rujukan lanjut usia panti sosial, pelayan rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dan pelayan rekomendasi adopsi

41.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

41.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			92.65%
	479,639,500	444,401,899	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	479,639,500	444,401,899	92.65%
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	237,657,500	230,067,500	96.81%
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	31,935,500	22,337,500	69.95%
Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/ kota	210,046,500	191,996,899	91.41%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	919,315,342	716,022,804	77.89%
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	657,455,742	535,132,024	81.39%
Penyediaan Permakanan	106,730,000	84,057,500	78.76%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	117,067,750	96,795,400	82.68%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta	174,644,000	155,123,380	88.82%

Gelandangan, Pengemis dan masyarakat			
Pemberian Layanan Kedaruratan	122,284,000	87,268,847	71.37%
Pemberian Layanan Rujukan	136,729,992	111,886,897	81.83%
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	261,859,600	180,890,780	69.08%
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	35,741,000	19,408,500	54.30%
Pemberian Layanan Kedaruratan	54,000,000	14,225,750	26.34%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	172,118,600	147,256,530	85.56%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,900,698,284	1,660,280,943	87.35%
Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar	129,298,750	63,157,870	48.85%
Rujukan anak - anak Terlantar	59,350,250	21,747,150	36.64%
Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar	69,948,500	41,410,720	59.20%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1,771,399,534	1,597,123,073	90.16%
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	637,426,250	574,370,545	90.11%
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	311,323,784	226,060,330	72.61%
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	822,649,500	796,692,198	96.84%

Sasaran 23 : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

IKU 42 : Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran 23 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Pembangunan Keluarga** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari aspek ketentraman keluarga, kemandirian keluarga, dan kebahagiaan keluarga

42.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 42.1 Capaian Kinerja Indikator **Indeks Pembangunan Keluarga**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga	58	53,57	92,36

Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga yang ditampilkan saat ini masih data berdasarkan PK 2021, karena hasil pemutakhiran PK 2021 pada tahun 2022 belum rilis

42.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 42.2 Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019			
2020			
2021	56,5	53,57	94,81%
2022	58	53,57	92,36

42.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Tabel 42.3 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kab/Kota di Sumatera Barat

Kab/ Kota	2021	2022
Prov. Sumatera Barat	53.54	
Kota Bukittinggi	53.57	
Kab. Lima Puluh Kota	53.5	
Kota Padang	53.49	

Pembangunan Keluarga merupakan isu lintas sektor (cross cutting issue) artinya pembangunan keluarga menjadi tanggung jawab lintas sektor kementerian/lembaga di Indonesia. Capaian keberhasilan Program Pembangunan Keluarga diukur menggunakan Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*). *iBangga* menjelaskan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. *iBangga* memberikan gambaran peran dan fungsi keluarga di Indonesia untuk mewujudkan kualitas keluarga. Dengan adanya *iBangga* maka suatu wilayah dapat diketahui keberhasilan terkait program pembangunan keluarga di wilayahnya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian realisasi *iBangga* Kota Bukittinggi tahun 2021 adalah 53.57 sedangkan untuk Provinsi Sumatera Barat adalah 53.54.

42.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Masih terjadi disintegrasi Pembangunan Keluarga lintas sektor. Belum pahamnya stakeholder tentang alat ukur *iBangga* masih baru Sosialisasi tentang *iBangga* belum optimal

42.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Adanya Peraturan di Daerah tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, Terdapatnya lintas sektor yang melaksanakan tugas pembangunan keluarga · Terdapat peran serta organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

42.6. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran 2022	Persentase
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	476,760,000	471,521,168	98.90%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	172,649,290	161,308,055	93.43%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	239,425,000	234,602,550	97.99%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	615,920,000	267,263,875	43.39%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	165,250,000	163,500,000	98.94%
Pembinaan Terpadu Kampung KB	79,105,500	77,373,628	97.81%
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	103,500,000	96,839,800	93.57%
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	267,408,600	180,090,525	67.35%
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	55,514,800	45,005,875	81.07%
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,168,106,546	1,145,709,367	98.08%

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	55,474,000	54,911,400	98.99%
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	121,500,000	121,290,300	99.83%
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	74,400,000	41,412,240	55.66%
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	26,175,000	26,038,700	99.48%

Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat

IKU 43 : Indeks Ketahanan Pangan

Sasaran 24 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Ketahanan Pangan** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan

43.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 43.1 Capaian Kinerja Indikator **Indeks Ketahanan Pangan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan	89,33	84,66	94.77%

Angka ini tercapai lebih dari target disebabkan karena adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait pola konsumsi B2SA dan kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi yang beragam, terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan penurunan bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas, meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan melalui penerapan inovasi teknologi, komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan program panganekaragaman pangan (produksi, ketersediaan, konsumsi), terjaminnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah sehingga terjaminnya stabilitas pengadaan pangan, penguatan kelembagaan lokal dalam program bantuan pangan.

Adanya peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan (pekarangan, lahan tidur, intensitas tanam), berkembangnya diversifikasi usaha rumah tangga, mengembangkan/ revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), posyandu,

dasawisma, selalu memantau perubahan pola konsumsi pangan rumahtangga dan fasilitas peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.

43.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 43.2 Capaian Kinerja 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019		88.02	
2020		89.01	
2021	89.17	88.90	99.70
2022	89.33	84,66	94.77

Tahun 2021 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 84,66 dengan realisasi 88,9 dan capaian 99,70, sedangkan tahun 2022 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,33 dengan realisasi 84,66 dan capaian 94,77. Angka ini tercapai lebih dari target disebabkan karena adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait pola konsumsi B2SA dan kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi yang beragam, terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan penurunan bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas, meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan, melalui penerapan inovasi teknologi, komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan program penganeekaragaman pangan (produksi, ketersediaan, konsumsi), terjaminnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah sehingga terjaminnya stabilitas pengadaan pangan, penguatan kelembagaan lokal dalam program bantuan pangan.

Peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan (pekarangan, lahan tidur, intensitas tanam), berkembangnya diversifikasi usaha rumahtangga, mengembangkan/ revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), posyandu, dasawisma, memantau perubahan pola konsumsi pangan rumahtangga dan fasilitas peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.

43.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

Data yang ditampilkan adalah data Tahun 2021. Hasil perhitungan IKP 2021 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi

daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 28 kabupaten Prioritas 1; 17 kabupaten Prioritas 2; dan 25 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten), Papua Barat (6 kabupaten), Maluku, Riau, dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten. Sedangkan pada wilayah kota ada 4 kota (4%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah, terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 3).

Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (93,97), Pekanbaru (90,56), Bukittinggi (88,90), Balikpapan (88,68) dan Batam (88,60). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (27,85), Tual (41,83), Gunungsitoli (45,67), Pagar Alam (47,09) dan Lubuklinggau (53,91). Peringkat dan IKP kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel

Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	93.97
2	Kota Pekanbaru	90.56
3	Kota Bukittinggi	88.90
4	Kota Balikpapan	88.68
5	Kota Batam	88.60
6	Kota Padang	87.73
7	Kota Solok	87.45
8	Kota Bontang	87.24
9	Kota Ternate	86.74
10	Kota Semarang	86.67

43.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

1. Hal ini disebabkan karena adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat terkait pola konsumsi B2SA dan kecenderungan konsumsi masyarakat Bukittinggi yang beragam
2. Terjaminnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan penurunan bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas
3. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan, melalui penerapan inovasi teknologi;
4. Komitmen dan konsisten dalam pelaksanaan program penganeekaragaman pangan (produksi, ketersediaan, konsumsi)

5. Terjaminnya kelancaran distribusi pangan antar wilayah sehingga terjaminnya stabilitas pengadaan pangan
6. Penguatan kelembagaan lokal dalam program bantuan pangan
7. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan (pekarangan, lahan tidur, intensitas tanam);
8. Berkembangnya diversifikasi usaha rumahtangga
9. Mengembangkan/ revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), posyandu, dasawisma
10. Memantau perubahan pola konsumsi pangan rumahtangga
11. Fasilitasi peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan.

43.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2024.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

43.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\begin{aligned} *Efisiensi &= 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100\%) \\ &= 100\% - \frac{(62,1\% \times 100\%)}{94,77} \\ &= 34,47\% \end{aligned}$$

43.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 41.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2022	Realisasi 2022	%
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,646,032,500	1,062,116,858	64.5%

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1,023,895,000	498,614,400	48.7%
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	622,137,500	563,502,458	90.6%
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	129,181,000	26,286,400	20.3%
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	21,421,000	21,184,150	98.9%
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	107,760,000	5,102,250	4.7%
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	43,825,000	40,995,000	93.5%
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	43,825,000	40,995,000	93.5%
TOTAL	1,819,038,500	1,129,398,258	62.1%

Sasaran 25 : Terwujudnya Pertanian Kota Yang Berkelanjutan

IKU 44 : Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan

Sasaran 25 diatas diturunkan pada indikator **Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan** yang secara defenisi operasional adalah Indeks komposit dari dimensi ekomoni, dimensi sosial, dan dimensi ekologi kegiatan pertanian

44.1. Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi Tahun 2022

Tabel 44.1 Capaian Kinerja Indikator Indeks Komposit Pertannian Berkelanjutan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan	72	71.53	99.35%

Angka ini tidak tercapai lebih dari target namun angka ini meningkat dari tahun lalu sebesar 0,68. Hal ini disebabkan karena Pertanian Kota Bukittinggi telah mensosialisasikan kepada petani agar menerapkan pertanian organik untuk dapat meminimalisasir penggunaan pestisida kimia sehingga tanaman yang ditanam menjadi tanaman sehat, Mensosialisasikan kepada peternak-peternak ayam/itik agar mengusahakan peternakan miliknya jauh dari pemukiman dan lingkungan masyarakat banyak untuk menghindari pencemaran udara karena bau kotoran ayam/ itik. Hal ini selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya, Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu pendekatan untuk

mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik dan kimia, dalam upaya untuk meminimalkan; biaya, kesehatan dan resiko-resiko lingkungan.

Menerapkan sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, rotasi dimaksudkan pula untuk memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Areal peternakan yang dipadukan dengan rumput atau kebun buah-buahan dapat memiliki keuntungan ganda, antara lain ternak dapat menghasilkan pupuk kandang yang merupakan pupuk untuk areal pertanian.

Optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat, menciptakan efisiensi rantai pemasaan produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani serta menjaga petani tetap sehat, sejahtera dan semangat agar terus memproduksi. Menerapkan metode konservasi lahan termasuk penanaman alur, mengurangi atau tidak melakukan pembajakan lahan, dan pencegahan tanah hilang baik oleh erosi angin maupun erosi air. Menjaga Kualitas Air/Lahan Basah karena lahan basah berperan penting dalam melakukan penyaringan nutrisi (pupuk anorganik) dan pestisida. Menanam tanaman pelindung yang dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma (weed), pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah.

Melakukan diversifikasi Lahan dan Tanaman sehingga dapat mengurangi kondisi ekstrim dari cuaca, hama pengganggu tanaman, dan harga pasar. Peningkatan diversifikasi tanaman dan jenis tanaman lain seperti pohon-pohon dan rumput-rumputan, juga dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan, habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik yang dapat meningkatkan kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Peningkatan penggunaan sumberdaya nutrisi di lahan pertanian, seperti pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan (sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan).

44.2. Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tabel 44.2 Perbandingan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019		88.02	
2020		89.01	
2021	70	70.85	101.2142857
2022	72	71.53	99.35

Tahun 2021 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 70 dengan realisasinya 70,85 dan capaian 101,2 %, sedangkan tahun 2022 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 72 dengan realisasi 71,53 dan capaian 99,35%. Angka ini tidak tercapai lebih dari target namun angka ini meningkat dari tahun lalu sebesar 0,68. Hal ini disebabkan karena Pertanian kota Bukittinggi telah mensosialisasikan kepada petani agar menerapkan pertanian organik untuk dapat meminimalisir penggunaan pestisida kimia sehingga tanaman yang ditanam menjadi tanaman sehat, Mensosialisasikan kepada peternak-peternak ayam/itik agar mengusahakan peternakan miliknya jauh dari pemukiman dan lingkungan masyarakat banyak untuk menghindari pencemaran udara karena bau kotoran ayam/ itik. Hal ini selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya, Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik dan kimia, dalam upaya untuk meminimalkan; biaya, kesehatan dan resiko-resiko lingkungan.

Menerapkan sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, rotasi dimaksudkan pula untuk memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Areal peternakan yang dipadukan dengan rumput atau kebun buah-buahan dapat memiliki keuntungan ganda, antara lain ternak dapat menghasilkan pupuk kandang yang merupakan pupuk untuk areal pertanian. Optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat, menciptakan efisiensi rantai pemasaan produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani serta menjaga petani tetap sehat, sejahtera dan semangat agar terus berproduksi.

Menerapkan metode konservasi lahan termasuk penanaman alur, mengurangi atau tidak melakukan pembajakan lahan, dan pencegahan tanah hilang baik oleh erosi angin maupun erosi air. Menjaga Kualitas Air/Lahan Basah karena lahan basah berperan penting dalam melakukan penyaringan nutrisi (pupuk anorganik) dan pestisida. Menanam tanaman pelindung yang dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma (weed), pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Melakukan diversifikasi Lahan dan Tanaman sehingga dapat mengurangi kondisi ekstrim dari cuaca, hama pengganggu tanaman, dan harga pasar.

Peningkatan diversifikasi tanaman dan jenis tanaman lain seperti pohon-pohon dan rumput-rumputan, juga dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan, habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik yang dapat meningkatkan kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Peningkatan penggunaan sumberdaya nutrisi di lahan pertanian, seperti pupuk

kandang dan tanaman kacang-kacangan (sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan.

44.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Kab / Kota di Sumatera Barat dan Nasional

44.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Indikator

Beberapa hal diantaranya :

1. Mensosialisasikan kepada petani agar menerapkan pertanian organik untuk dapat meminimalisir penggunaan pestisida kimia sehingga tanaman yang ditanam menjadi tanaman sehat
2. Mensosialisasikan kepada peternak-peternak ayam/itik agar mengusahakan peternakan miliknya jauh dari pemukiman dan lingkungan masyarakat banyak untuk menghindari pencemaran udara karena bau kotoran ayam/ itik. Hal ini selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya
3. Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik dan kimia, dalam upaya untuk meminimalkan; biaya, kesehatan dan resiko-resiko lingkungan
4. Menerapkan sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, rotasi dimaksudkan pula untuk memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Areal peternakan yang dipadukan dengan rumput atau kebun buah-buahan dapat memiliki keuntungan ganda, antara lain ternak dapat menghasilkan pupuk kandang yang merupakan pupuk untuk areal pertanian
5. Optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat, menciptakan efisiensi rantai pemasaan produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani serta menjaga petani tetap sehat, sejahtera dan semangat agar terus memproduksi
6. Menerapkan metode konservasi lahan termasuk penanaman alur, mengurangi atau tidak melakukan pembajakan lahan, dan pencegahan tanah hilang baik oleh erosi angin maupun erosi air.
7. Menjaga Kualitas Air/Lahan Basah karena lahan basah berperan penting dalam melakukan penyaringan nutrisi (pupuk anorganik) dan pestisida
8. Menanam tanaman pelindung yang dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma (weed), pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah.
9. Melakukan diversifikasi Lahan dan Tanaman sehingga dapat mengurangi kondisi ekstrim

dari cuaca, hama pengganggu tanaman, dan harga pasar. Peningkatan diversifikasi tanaman dan jenis tanaman lain seperti pohon-pohon dan rumput-rumputan, juga dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan, habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat

10. Pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik yang dapat meningkatkan kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Peningkatan penggunaan sumberdaya nutrisi di lahan pertanian, seperti pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan (sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan.

44.5. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Jika Pencapaian Indikator Tidak/ Belum Mencapai Target

Beberapa hal diantaranya:

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2024.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

44.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{*Efisiensi} = 100\% - (\text{serapan anggaran} \times 100 \%)$$

$$= 100\% - \frac{(91,7\% \times 100 \%)}{99,35}$$
$$= 7,7 \%$$

44.7. Program atau Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Indikator

Tabel 414.7 Program/ Kegiatan Penunjang Capaian Indikator

Program/Kegiatan	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1,187,799,412.0	1,130,403,115.8	95.2%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD Balai Benih Ikan Hias)	394,339,412.0	385,485,559.4	97.8%
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dinas Pertanian dan Pangan)	793,460,000.0	744,917,556.4	93.9%



PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	327,952,340.0	305,709,209.0	93.2%
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	327,952,340.0	305,709,209.0	93.2%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,945,846,104.0	1,786,424,633.4	91.8%
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	349,967,200.0	315,184,150.0	90.1%
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1,480,769,904.0	1,386,934,683.4	93.7%
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	115,109,000.0	84,305,800.0	73.2%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	131,049,300.0	87,720,607.7	66.9%
Pengembangan Prasarana Pertanian	58,767,500.0	50,291,132.0	85.6%
Pembangunan Prasarana Pertanian	72,281,800.0	37,429,475.7	51.8%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	562,067,151.0	537,510,340.0	95.6%
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,429,804.0	68,745,604.0	97.6%
Pengelolaan Pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas)	259,934,690.0	244,492,579.0	94.1%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dinas Pertanian dan Pangan)	22,473,000.0	21,910,400.0	97.5%
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (UPTD RPH)	209,229,657.0	202,361,757.0	96.7%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	346,810,658.0	280,551,508.0	80.9%
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	346,810,658.0	280,551,508.0	80.9%
TOTAL	4,501,524,965.0	4,128,319,413.9	91.7%

III.4 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan guna mendukung kinerja turut ditopang dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan Realisasi anggaran utama tahun 2022 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 11(sebelah) tujuan, 23 (dua puluh tiga) sasaran dan 44 (empat puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022.

Pada tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar Rp. 714,157,721,650.00 dengan realisasi sebesar Rp. 698,396,718,823.22 atau dengan persentase realisasi sebesar 88,88%.

Tabel 3.4.1 Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN 2022	RELAISASI 2022	%
PENDAPATAN DAERAH	714,157,721,650.00	698,396,718,823.22	97,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136,257,791,456.00	130,796,925,183.85	95,99
Pajak Daerah	50,269,852,262.00	49,571,169,198.00	98,61
Retribusi Daerah	48,684,034,000.00	46,662,398,969.00	95,85
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,505,000,000.00	6,641,291,925.00	88,49
Lain-lain PAD yang Sah	29,798,905,194.00	27,922,065,091.85	93,70
PENDAPATAN TRANSFER	577,899,930,194.00	567,387,873,682.00	98,18
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	543,423,791,657.00	532,574,902,562.00	98,00
Dana Perimbangan	543,423,791,657.00	532,574,902,562.00	98,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,476,138,537.00	34,812,971,120.00	100,98
Pendapatan Bagi Hasil	34,076,138,537.00	34,412,971,120.00	100,99
Bantuan Keuangan	400,000,000.00	400,000,000.00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	211,919,957.37	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	211,919,957.37	0,00
BELANJA DAERAH	837,145,281,505.00	744,066,742,849.66	88,88
BELANJA OPERASI	675,422,845,486.00	611,269,675,255.10	90,50
Belanja Pegawai	325,444,707,669.00	301,391,117,365.66	92,61



URAIAN	ANGGARAN 2022	RELAISASI 2022	%
Belanja Barang dan Jasa	301,912,139,291.00	264,538,931,912.28	87,62
Belanja Subsidi	3,385,520,000.00	2,910,989,266.00	85,98
Belanja Hibah	42,425,478,526.00	40,198,636,711.16	94,75
Belanja Bantuan Sosial	2,255,000,000.00	2,230,000,000.00	98,89
BELANJA MODAL	147,955,769,352.00	124,005,630,244.56	83,81
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60,312,518,236.00	48,131,479,720.00	79,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33,140,307,759.00	25,739,508,574.06	77,67
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49,760,228,857.00	45,500,951,384.50	91,44
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,742,714,500.00	4,633,690,566.00	97,70
BELANJA TIDAK TERDUGA	5,000,000,000.00	271,437,350.00	5,43
Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	271,437,350.00	5,43
BELANJA TRANSFER	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	97,19
Belanja Bantuan Keuangan	8,766,666,667.00	8,520,000,000.00	97,19
SURPLUS / (DEFISIT)	(122,987,559,855.00)	(45,670,024,026.44)	37,13
PEMBIAYAAN DAERAH	132,987,559,855.00		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		132,987,559,855.90	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	132,987,559,855.00	132,987,559,855.90	100,00
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100,00
Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	122,987,559,855.00	122,987,559,855.90	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	77,317,535,829.46	0,00

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2023

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Bukittinggi secara berkesinambungan membangun serius dan berkomitmen tinggi atas terselenggaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) hingga Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil dan *output* dari implementasi SAKIP dapat dilihat dengan jelas dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bukittinggi.

LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2022 berhasil menyajikan keberhasilan dan kemajuan maupun kendala yang dihadapi dalam capaian setiap sasaran strategis melalui target Indikator Kinerja Utama (IKU). Keberhasilan setiap IKU telah dibandingkan perkembangannya dari tahun ke tahun. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen yang ada termasuk, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* termasuk kondisi pandemi Covid-19 yang melanda.

Berdasarkan uraian yang dituangkan pada BAB III LKjIP dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2022 memberikan informasi kepada *stakeholders* atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian 11 Tujuan, 25 Sasaran, dan 44 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022.
2. Kategori keberhasilan 44 (empat puluh empat) indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 24 IKU berhasil dengan kategori **Memuaskan** dengan capaian >100%.
 - b. Sebanyak 10 IKU berhasil dengan kategori **Sangat Baik** dengan capaian >86% - 100%.
 - c. Sebanyak 2 IKU berhasil dengan kategori **Baik** dengan capaian >56% - 85,99%.
 - d. Sebanyak 8 IKU berhasil dengan kategori **Cukup** dengan capaian 55% - 74,9%

4.2. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Sesuai dengan rekomendasi atas *reviu* LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2021 yang dilakukan oleh Inpektorat Kota Bukittinggi yang dituangkan ke dalam laporan hasil *reviu* nomor 8/LHP-REV/Insp-Bkt/2022 Tanggal 21 Maret 2022 disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

A. Format

1. Menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target RPJMD dan standar nasional untuk LKjIP mendatang.
2. Mempertajam analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dengan tidak hanya menyajikan upaya peningkatan keberhasilan yang telah dilakukan saja tetapi disebutkan juga faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan atau tidak berhasilnya suatu pencapaian kinerja.
3. Membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menyebutkan secara jelas sumber daya yang diefisiensikan dan berapa kalkulasinya (khusus untuk efisiensi anggaran).
4. Memastikan realisasi anggaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah sama dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 hasil *Reviu* Inspektorat Kota Bukittinggi.
5. Menyusun Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang diformalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan diedarkan ke seluruh SKPD untuk menyamakan pemahaman, pola pikir dan format laporan kinerja, baik sistematika, penulisan, pemakaian huruf, spasi, ukuran kertas dan lain sebagainya yang diperlukan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil *reviu* tahun yang lalu.
6. Memperbaiki dan mempertajam narasi sehingga serta mencantumkan sumber data pada setiap data sekunder yang disajikan sehingga laporan kinerja dapat dipahami oleh pembaca laporan.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Menetapkan penanggungjawab pengumpulan data dan informasi kinerja di tingkat Pemerintah Kota Bukittinggi dan di setiap SKPD untuk menjamin kehandalan data dan informasi kinerja yang dilaporkan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil *reviu* tahun-tahun yang lalu.
2. Menyusun mekanisme pelaporan dan kinerja dalam bentuk formal SOP dan diedarkan kepada seluruh SKPD, sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja setiap tahunnya, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil *reviu* tahun-tahun yang lalu.
3. Menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan semester untuk melihat kemajuan pencapaian sasaran strategis dan memudahkan dalam menyusun laporan kinerja

tahunan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil *reviu* tahun-tahun yang lalu.

C. Substansi

1. Menyempumakan semua data yang tidak sesuai dan tidak selaras dalam laporan Kinerja dan dokumen terkait, baik dengan menyamakan indikator kinerja, target dan realisasi serta capaian kinerja termasuk analisisnya secara lebih mamadai
2. Melengkapi semua kekurangan data, baik yang belum valid atau yang belum *up to date* sehingga data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja bisa diandalkan dan valid.
3. Menetapkan skala pengukuran capaian kinerja secara formal dengan keputusan Walikota Bukittinggi dan bisa dijadikan pedoman/ acuan yang jelas bagi SKPD dalam menyusun LKjIP SKPD.

D. Penelaahan Penyelenggaraan SAKIP

Meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi baik perbaikan sistem yang terus menerus, pemantapan pencapaian kinerja dengan orientasi *outcome*, penggunaan teknologi informasi yang optimal, pemanfaat system yang terintegrasi, peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja, membentuk bank data untuk kevalidan sumber data, dan sebagainya.

E. Tindak Lanjut hasil *reviu*

1. Menindaklanjuti hasil *reviu* tahun yang lalu untuk poin-poin yang masih belum ditindaklanjuti sebelumnya.
2. Menindaklanjuti hasil *reviu* ini segera setelah Laporan Hasil *Reviu* ini diterima.

Menindaklanjuti LHE *Reviu* Inspektorat diatas, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah sebagai leading unit *dalam* penyusunan dokumen LKjIP Kota Bukittinggi Tahun 2022 telah melakukan beberapa perbaikan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan sebagai berikut :

A. Format

1. Dalam menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target RPJMD dan standar nasional untuk LKjIP mendatang, telah dilakukan penurunan analisis dengan melakukan perbandingan capaian realisasi masing-masing IKU dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026 dan yang juga telah diturunkan pada Perwako IKU Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026.
2. Guna mempertajam analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan dengan tidak hanya menyajikan upaya peningkatan keberhasilan yang telah dilakukan saja tetapi disebutkan juga faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan atau tidak

berhasilnya suatu pencapaian kinerja, telah dilakukan oleh Bagian Organisasi melalui surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2022.

3. Telah dilakukan upaya membuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan menyebutkan secara jelas sumber daya yang diefisiensikan dan berapa kalkulasinya (khusus untuk efisiensi anggaran), sesuai dengan surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2022.
4. Untuk memastikan realisasi anggaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah sama dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2022 hasil Reviu Inspektorat Kota Bukittinggi, bagian organisasi meminta realisasi anggaran yang juga disampaikan pada dokumen yang disampaikan ke Bagian Organisasi.
5. Telah dilakukan penyusunan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja yang untuk menyamakan pemahaman, pola pikir dan format laporan kinerja, baik sistematika, penulisan, pemakaian huruf, spasi, ukuran kertas dan lain sebagainya yang diperlukan namun belum diformalkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan diedarkan ke seluruh SKPD hanya disampaikan dalam bentuk surat yakni pada surat penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Nomor 061/ 05/ Org/I-2023 Tanggal 13 Januari 2023, yang didalamnya juga dilampirkan pedoman penyusunan LKjIP Tahun 2022.
6. Bagian organisasi juga terus berkomunikasi dengan perangkat daerah pengampu IKU untuk memperbaiki dan mempertajam narasi sehingga serta mencantumkan sumber data pada setiap data sekunder yang disajikan sehingga laporan kinerja dapat dipahami oleh pembaca laporan.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Telah dilakukan penetapan penanggungjawab pengumpulan data dan informasi kinerja di tingkat Pemerintah Kota Bukittinggi dan di setiap perangkat daerah untuk menjamin kehandalan data dan informasi kinerja yang dilaporkan, sekaligus merupakan tindak lanjut dari hasil reviu tahun-tahun yang lalu yang dituangkan melalui Keputusan Walikota Bukittinggi nomor 188.45 – 246 - 2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Tim penyusun tim penanggung jawab data dan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dipertegas melalui Surat Sekretaris daerah Nomor 061/ 416/ Org/ XI – 2022 Tanggal 1 November 2022 perihal SK Tim Penyusun LKjIP dan Penanggungjawab data dan Dokumen LKjIP.
2. Sudah dilakukan mekanisme pelaporan dan kinerja dalam bentuk formal SOP dan diedarkan kepada seluruh PD, sehingga memudahkan dalam penyusunan Laporan Kinerja namun belum disampaikan ke Perangkat Daerah.

3. Belum dilakuka menyusun laporan kinerja bulanan, triwulanan dan semester untuk melihat kemajuan pencapaian sasaran strategis dan memudahkan dalam menyusun laporan kinerja tahunan.

C. Substansi

1. Belum dilakuka menyempurnaan semua data yang tidak sesuai dan tidak selaras dalam laporan Kinerja dan dokumen terkait, baik dengan menyamakan indikator kinerja, target dan realisasi serta capaian kinerja termasuk analisisnya secara lebih mamadai mengingat untuk hal diatas dibutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan Bapelitbangda Kota Bukittinggi.
2. Terkait dengan kelengkapan data, jelang dirampungkannya penyusunan LKjIP beberapa Perangkat Daerah pengampu IKU terus melengkapi semua kekurangan data, baik yang belum valid atau yang belum *up to date* sehingga data dan informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja bisa diandalkan dan valid terkait dengan data yang dikeluarkan oleh Instansi lain seperti Kementerian dan BPS.

D. Penelaahan Penyelenggaraan SAKIP

Untuk memberikan penguatan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan SAKIP Kota Bukittinggi perlu dilakukan peningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Kota Bukittinggi baik perbaikan sistem yang terus menerus, pemantapan pencapaian kinerja dengan orientasi *outcome*, penggunaan teknologi informasi yang optimal, pemanfaat system yang terintegrasi, peningkatan mekanisme pengumpulan data kinerja, membentuk bank data untuk kevalidan sumber data, dan sebagainya. Hal ini akansangat terkait dengan koordinasi lintas Perangkat Daerah seperti Bapelitbangda selaku leading SAKIP Kota Bukittinggi, Inspektorat Daerah selaku pengawas internal SAKIP, dan Sekretariat Daerah selaku Koordinator dan penyusun dokumen LKjIP Kota Bukittinggi.

E. Tindak Lanjut hasil reuiu

1. Terkait tindak lanjut reuiu Bagian organisasi dengan keterbatasan sumber daya yang ada tetap berupaya kiranya penyajian LKjIP Kota Bukittinggi setiap tahunnya mampu memberikan laporan yang dapat dipahami dan memiliki keakuratan dan terukur terhadap capaian dari perjanjian kinerja daerah yang telah diperjanjikan diawal tahunnya.
2. Terhadap tindaklanjut dari hasil *reuiu* tahun yang lalu telah dilakukan upaya dan tindaklanjut perbaikan, walaupun masih terdapat beberapa perbaikan yang belum dilaksanakan dengan baik.

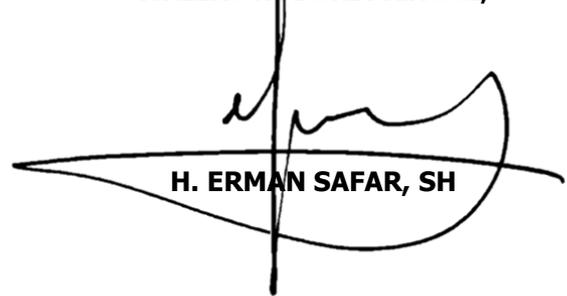
Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bukittinggi, Maret 2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,



H. ERMAN SAFAR, SH